e-ISSN. 2775-6289
Vol. 4, No. 2, Hlm. 85-236, Desember 2024

BAYANI
Jurnal Studi Islam

Pemanfaatan Ecobrick untuk Mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan SDN Palasari 03
Mukhlishah, Afanin, Fadila, E.S, Hanifah, G.N., Khairunnisya, N.R

Pola Asuh Orang Tua di Era Digital dalam Membentuk Karakter Anak
Mukhlishah, Adhistria Rahma Anjani, Annisa Khomsyatun Munawaroh, Sarla Pebrianti Rahayu, Silma Kaffah Millati

The Role of Pancasila in Facilitating Religious Moderation in Indonesia
Edy Saputra, Rahmat Hidayat, Sumper Mulia Harahap, Muhmmad Husni Abdulah Pkarti, Diana Farid

Edukasi Tata Cara Wudhu dan Shalat sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius Siswa SD Palasari 3 Bandung
Dewi Nurdinar, Tuti Alawiyah, Dra.Hj. Mukhlishah, M.Ag., Iqlima Amelia, Riyan Supriatna, Andfrean Hutri Niaga, Kania Nurjanah, Putri Lathifa Halis, Kevin Alamsyah, Yogi Gumilar, Halida Hafni Sulisti

Peran Agama Islam dalam Mengatasi Masalah Sosial di Masyarakat RW 4 Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpek
Dewi Nurdinar, Tuti Alawiyah, Dra.Hj. Mukhlishah, M.Ag., Iqlima Amelia, Riyan Supriatna, Andfrean Hutri Niaga, Abdul Majid, Kania Nurjanah, Putri Lathifa Halis, Kevin Alamsyah, Yogi Gumilar, Halida Hafni Sulisti

Modernisasi sebagai Pergeseran Akhlak dan Identitas Manusia Modern
Muhammad Danil, Amri Effendi, Jamalludin Mak'ruf, Syukri Iska

Implementasi Pendidikan Multikultural untuk Meningkatkan Keharmonisan dalam Keberagaman
Mohammad Ridwan, Edy Saputra, Rahmat Hidayat, Sumper Mulia Harahap

Exploring Strategic Communication: A Theoretical Framework or Paradigm in Communication Study
Erita Riski Putri, Ahmad Rifai

Implementasi Strategi Pemasaran Digital untuk Pengembangan UMKM di Pesantren Khalifa: Pendekatan Halal dan Digitalisasi Pasar
Mukhlishah, Imas Kurniasih, Muhtadin, Yani Mulyani

Translation of Mangkobar text by Novice Translators and Distribution of Time on Translation Tasks
Lili Suryani Batubara

BAYANI Jurnal Studi Islam

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyahan
Universitas Muhammadiyah Bandung

9 772775 628017

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Pemanfaatan Ecobrick untuk Mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan SDN Palasari 03

Mukhlishah[1*], **Afanin**[2], **Fadila, E.S.**[3], **Hanifah, G.N.**[4], **Khairunnisya, N.R.**[5]
[1*] PAI/Agama Islam/Universitas Muhammadiyah Bandung
[2] Farmasi/Sains dan Teknologi/Universitas Muhammadiyah Bandung
[3] Teknologi Pangan/Sains dan Teknologi/Universitas Muhammadiyah Bandung
[4] Psikologi/Sosial dan Humaniora/Universitas Muhammadiyah Bandung
[5] Farmasi/Sains dan Teknologi/Universitas Muhammadiyah Bandung

*email: sukasaribkkbn@gmail.com

Kata Kunci:
Ecobrick; Garbage; Plastic; PHBS; KKN.

ABSTRACT

Indonesia, being the fourth most populous country in the world with a high consumption rate, has resulted in an increasing amount of waste generated from various sectors. One of them is plastic waste. Plastic, being a widely used material in daily life, has made the problem of plastic waste increasingly severe and a serious challenge for the environment. Ecobricks are one of the solutions that can be developed to reuse plastic waste by transforming it into useful objects. The aim of this program is to introduce and train students on waste management using the ecobrick method as an effort to reduce plastic waste and increase students' awareness of Clean and Healthy Living Behaviours (PHBS) in the school environment. This socialisation method uses lectures and direct practice of making ecobricks. The results obtained show that students can understand the importance of managing plastic waste into useful objects using the ecobrick method. It is hoped that this activity can continue in the future, and SDN Palasari can become a cadre of initiating plastic waste management in elementary schools.

Kata Kunci:
Ecobrick; Sampah; Plastik; PHBS; KKN.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan tingkat konsumtif yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan dari berbagai sektor. Salah satunya yaitu sampah plastik, plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga permasalahan sampah plastik semakin meningkat dan menjadi tantangan serius bagi lingkungan. Ecobrick merupakan salah satu solusi yang dapat dikembangkan dalam memanfaatkan kembali sampah plastik dengan mengubah nya menjadi benda bermanfaat. Tujuan dari program ini adalah

sebagai pengenalan dan pelatihan mengenai pengolahan sampah dengan metode ecobrick sebagai upaya pengurangan sampah plastik dan meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Metode sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan praktik langsung pembuatan ecobrick. Hasil yang diperoleh yaitu siswa-siswi dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah plastik menjadi benda bermanfaat dengan metode ecobrick. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut kedepannya, dan SDN Palasari dapat menjadi kader inisiasi pengelolaan sampah plastik di lingkup Sekolah Dasar (SD).

PENDAHULUAN

Kebersihan merupakan upaya manusia dalam memelihara diri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lingkungan hidup bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai penyakit dan kotoran, seperti debu, sampah, dan bau. Hidup di lingkungan bersih dan sehat menjadi impian seluruh manusia, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Namun, masalah mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu menjadi masalah berkepanjangan di masyarakat. Aktivitas keseharian manusia seringkali menimbulkan dampak buruk untuk kelestarian lingkungan, salah satunya adalah mengenai pengelolaan sampah yang kurang baik. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti hewan, tanaman, atau manusia yang mudah terurai secara alamiah. Sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang sulit sekali terurai, seperti plastik. Plastik terbuat dari bahan kimia yang tak terbarukan. Plastik menjadi bahan yang banyak sekali dipakai dalam kehidupan, sehingga sampah plastik terus menerus mengalami peningkatan. (Rahayu et al., 2024).

Berdasarkan data dari *Making Oceans Plastic Free* (2017), menyatakan bahwa rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Masih dari data yang sama, dikatakan bahwa sampah kantong plastik menyumbang setidaknya 40 persen dari keseluruhan limbah plastik di Indonesia. Per tahunnya, 511.560 ton kantong plastik yang digunakan masyarakat Indonesia berakhir ke lautan. (*Wow 182,7 Miliar Kantong Plastik Dipakai Di Indonesia Setiap Tahun*, 2024).

Konsep 3R *(Reuse, Reduce, Recycle)* telah populer diterapkan dalam pengelolaan sampah plastik. *Reuse* mengacu pada penggunaan ulang barang-barang plastik, sedangkan *Reduce* menekankan pada pengurangan konsumsi produk plastik, terutama barang sekali pakai. *Recycle*, di sisi lain, melibatkan

proses pengolahan kembali sampah plastik menjadi produk baru melalui metode fisik, kimia, atau kombinasi keduanya. Meskipun konsep 3R dianggap efektif, masing-masing memiliki keterbatasan. *Reuse*, misalnya, tidak selamanya cocok untuk semua jenis plastik. Penggunaan berulang kantong plastik, misalnya, dapat menyebabkan penurunan kualitas dan potensi kontaminasi. Selain itu, beberapa jenis plastik dapat melepaskan zat berbahaya saat digunakan berulang kali. *Reduce*, di sisi lain, membutuhkan alternatif produk yang lebih murah dan praktis untuk menggantikan plastik. Sementara itu, proses *recycle* juga memiliki tantangan, yaitu penurunan kualitas plastik setelah didaur ulang berkali-kali (Surono dan Ismanto, 2016).

Untuk keterbatasan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sampah plastik. Selain 3R, perlu dipertimbangkan pula langkah-langkah seperti: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan; (2) Pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (3) Penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pengelolaan sampah plastik, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai di tempat-tempat tertentu, serta insentif bagi produsen yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan (4) Pengembangan produk alternatif yang berkelanjutan dan dapat menggantikan plastik secara efektif. Dengan demikian, pengelolaan sampah plastik dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan (Santi, 2019).

Pada penelitian Ni Wayan Sri dkk., (2022) perlu adanya standar yang jelas mengenai ukuran, kepadatan, dan bahan yang diperbolehkan untuk *ecobrick*. Ini akan memastikan kualitas dan kekuatan *ecobrick* yang dihasilkan. *Ecobrick* ditimbang sesuai dengan ukuran botol yang digunakan. Jika menggunakan botol dengan ukuran 600 ml, maka berat *ecobrick* harus lebih dari 200 gram. Jika menggunakan botol dengan ukuran 1500 ml, maka berat *ecobrick* harus lebih dari 500 gram (Widodo dkk., 2018).

Menurut hasil dari penelitian Emi Handayani dkk. (2022) Perlu diperinci lagi tentang dampak positif dalam *ecobrick* terhadap lingkungan, seperti bata dari botol plastik dapat membantu melestarikan lingkungan. Hal tersebut akan mengurangi penggunaan semen, sehingga akan ada pengurangan emisi CO2 karena penurunan produksi semen. dikatakan bahwa rumah yang terbuat dari *ecobrick* tetap hangat ketika udara di luar dingin dan tetap dingin selama musim panas. Hal tersebut akan membantu mengurangi penggunaan pendingin dan *blower* (Mojtaba, dkk., 2013). Manfaat paling penting yang dihasilkan dari pemanfaatan *ecobrick* pada anak usia dini adalah kegiatan untuk meningkatkan

keterampilan motorik halus serta seni anak (Yusiyaka, R.A. and Yanti, A.D., 2021). Berdasarkan dengan objek permasalahan tersebut mengenai kesehatan, dimana kurangnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, serta belum adanya pemahaman mengenai pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah yang tidak bermanfaat.

Hal tersebut dijadikan sebuah program kerja oleh tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai bentuk kontribusi untuk dapat mengurangi sampah plastik khususnya di lingkungan SDN Palasari 03. Program kerja yang diusung yaitu pembuatan barang tepat guna dari plastik dengan metode *ecobrick*. Diharapkan melalui pengenalan dan pelatihan mengenai pengolahan sampah dengan metode *ecobrick* ini siswa-siswi SDN Palasari 03 menjadi sadar akan lingkungan alamiah yang memburuk akibat sampah plastik dan mampu bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk turut mengurangi sampah plastik. Demikian juga tentunya bagi seluruh staf sekolah agar turut serta dalam pengurangan penggunaan plastik dan botol minum plastik karena diketahui penguraian sampah plastik secara alami membutuhkan waktu yang lama (Suminto, 2017).

METODE

Metode yang digunakan adalah "metode ceramah" dengan pelaksanaan sosialisasi hidup sehat dan bersih (PHBS) serta demo edukasi pemanfaatan sampah plastik dengan metode *ecobrick* yang dilaksanakan pada 31 Agustus - 7 September 2024 terhadap siswa-siswi kelas 4 dan 5 di SDN Palasari 03, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung. Adapun cara sosialisasi dan demo dilakukan dengan lisan, video materi, serta praktek pemanfaatan sampah plastik dengan metode *ecobrick*. Adapun alat, bahan, serta prosedur yang dipersiapkan adalah:

Alat

Gunting, kawat, korek api, lilin, *nylon cable ties*, paku.

Bahan

Botol plastik, kantong plastik, kayu, sampah anorganik.

Prosedur Pembuatan

a. Pembuatan *Ecobrick*

1. Pilah dan bersihkan sampah plastik yang telah dikumpulkan
2. Gunting sampah-sampah plastik hingga diperoleh ukuran yang kecil

3. Sediakan botol bekas air mineral, bekas minyak, dan botol bekas lainnya.
4. Masukan sampah ke dalam botol yang telah dibersihkan dan dikeringkan.
5. Padatkan sampah plastik menggunakan tongkat kayu.
6. Timbang setiap *ecobrick*.
7. Simpan *ecobrick* ditempat yang teduh.
8. Susun semua *ecobrick* menjadi kerajinan sesuai dengan kebutuhan.

b. **Pembuatan Pot Ecobrick**

1. Siapkan 7 (tujuh) botol *ecobrick* lalu masukan kawat ke dalam bagian bawah botol hingga membentuk lingkaran kecil, kemudian kunci kawat hingga kuat dan rapih.
2. Masukan kawat berbentuk lingkaran kedalam bagian atas botol, kemudian kunci menggunakan *nylon cable ties.*
3. Susun kawat di bagian bawah botol sebagai penyangga *polybag*.
4. Masukan tanah kedalam *polybag*, lalu tanam tumbuhan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ecobrick merupakan suatu metode pengelolaan limbah plastik yang inovatif, melibatkan pemadatan sampah plastik non-organik ke dalam botol plastik hingga mencapai kepadatan tertentu. Konsep ini menawarkan alternatif yang efektif dalam mengurangi volume limbah plastik yang terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), serta memberikan nilai tambah bagi limbah plastik yang sebelumnya dianggap sebagai masalah (Ikhsan & Tonra, 2021). *Ecobrick* menawarkan solusi inovatif untuk mengelola limbah plastik dengan cara mengoptimalkan volume limbah dan meminimalkan dampak lingkungan. Melalui proses pemadatan, *ecobrick* secara signifikan mengurangi kebutuhan akan lahan baru untuk tempat pembuangan akhir.

Sosialisasi mengenai Perilaku Hidup Sehat dan Bersih di sekolah (PHBS) serta implementasi pemanfaatan sampah plastik dengan metode *ecobrick* dilakukan oleh mahasiswa kepada siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5. Siswa-siswi mendengarkan dengan seksama mengenai sosialisasi PHBS dan pembuatan *ecobrick*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 2x dengan jumlah 90 siswa. Sosialisasi pertama, dilakukan pengenalan mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sosialisasi kedua, dilakukan pengenalan mengenai metode *ecobrick* sebagai pemanfaatan solusi sampah plastik. Pada gambar 1 terlihat para siswa mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Pengenalan *Ecobrick* yang dipresentasikan oleh

mahasiswa KKN. Siswa-siswi mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama.



Gambar 1. Sosialisasi PHBS dan *Ecobrick*

Pada pembuatan *ecobrick* ini, bahan bahan yang dibutuhkan berupa botol plastik bekas dan sampah plastik. Untuk alat yang dibutuhkan berupa tongkat dan gunting. Dalam hal ini tongkat yang dipakai biasanya terbuat dari bambu atau kayu dengan panjang sekitar dua kali lipat panjang botol, memiliki fungsi utama untuk memadatkan sampah plastik di dalam botol. Dengan menggunakan tongkat ini dapat mendorong dan memadatkan potongan-potongan plastik hingga mencapai tingkat kepadatan yang optimal. Kepadatan yang tinggi akan menghasilkan *ecobrick* yang lebih kuat dan tahan lama. Tongkat membantu mengurangi ruang kosong di dalam botol yang bisa terisi udara. Udara yang terperangkap dapat mengurangi kekuatan *ecobrick* dan membuatnya lebih mudah hancur. Tongkat berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan potongan plastik yang lebih besar atau sulit dimasukkan dengan tangan. Dengan ujung tongkat yang runcing, kita bisa mendorong plastik ke sudut-sudut botol yang sulit dijangkau. Tidak semua sampah plastik memiliki ukuran yang sesuai untuk langsung dimasukkan ke dalam botol. Gunting digunakan untuk memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga mudah dimasukkan dan dipadatkan. Potongan plastik yang lebih kecil akan lebih mudah diatur dan dipadatkan di dalam botol. Hal ini akan membuat proses pengisian menjadi lebih efisien. Beberapa jenis sampah plastik memiliki bentuk yang tidak teratur atau terlalu besar. Gunting dapat digunakan untuk membentuk ulang sampah plastik agar sesuai dengan ukuran mulut botol. Potongan plastik yang sudah dimasukan itu harus dipadatkan dikarenakan pada masing masing botol yang memiliki ukuran 600 mL harus berisi lebih dari 200 gram sampah plastik (Widodo dkk., 2018). sehingga dalam pembuatan *ecobrick* ini membutuhkan bantuan alat seperti tongkat dan gunting. Pada gambar 2 terlihat para siswa

mengikuti kegiatan pembuatan *Ecobrick* yang dipandu oleh mahasiswa KKN. Siswa-siswi melakukan kegiatan sesuai arahan dengan seksama.



Gambar 2. Praktek Pembuatan *Ecobrick*

Ecobrick yang telah dibuat dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis kerajinan, seperti meja, kursi dan sebagai pengganti batu bata. Pemanfaatan sampah plastik dengan metode *ecobrick* selaras dengan visi dan misi SDN Palasari 03 sebagai sekolah Adiwiyata, dimana program Adiwiyata ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Salah satu implementasi yang dapat dilakukan yaitu mengenai pemilahan dan pengolahan sampah plastik.

Salah satu ciri sekolah Adiwiyata adalah adanya taman yang ditumbuhi berbagai tanaman, maka dari itu kami memanfaatkan *ecobrick* menjadi sebuah pot. Penanaman tanaman di sekolah Adiwiyata bertujuan untuk memperindah lingkungan sekolah dan memberi rasa sejuk. Selain itu, penanaman tanaman di sekolah Adiwiyata juga memiliki manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara, menyerap karbon dioksida, membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, membantu membangun karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan (Dewi et al., 2023).

Pembuatan pot *ecobrick* membutuhkan beberapa alat, seperti kawat, korek api, lilin, *nylon cable ties, polybag,* dan tang. Sedangkan, bahan yang diperlukan yaitu 7 (tujuh) botol *ecobrick* untuk satu pot. Langkah awal yang dilakukan yaitu memasukan kawat ke dalam 7 (tujuh) botol di bagian bawah, lalu ikat kawat menggunakan tang hingga botol *ecobrick* membentuk lingkaran.

Setelah membentuk lingkaran, masukan kawat bulat ke bagian atas lingkaran botol. Kemudian, satukan bagian tutup botol dengan kawat bulat menggunakan *nylon cable ties* satu persatu (7 botol). Setelah itu, balikan pot

hingga posisi bagian atas botol *ecobrick* berada di bawah. Lalu, susun kawat di bagian bawah pot yang berfungsi sebagai penyangga *polybag*.

Hasil pembuatan pot *ecobrick* dapat dilihat pada Gambar. 3. Setelah selesai pembuatan, pot dapat langsung digunakan untuk menanam tumbuhan yang diinginkan, kemudian pot dapat di simpan di taman sekolah atau didalam kelas sebagai hiasan agar suasana sekolah terlihat lebih indah.



Gambar 3. Pot Bunga dari *Ecobrick*

KESIMPULAN

Ecobrick merupakan suatu metode pengelolaan limbah plastik yang inovatif, melibatkan pemadatan limbah plastik non-organik ke dalam botol plastik hingga mencapai kepadatan tertentu. *Ecobrick* dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengubah sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat. Studi sosial tentang kesehatan dan kebersihan di sekolah serta penerapan *ecobrick* dilakukan di antara siswa, dengan 90% berpartisipasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan siswa-siswi SDN Palasari 03 mengenai pengolahan limbah plastik dan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut andil dalam penyelesaian jurnal ini. Pertama, penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa atas kontribusinya dalam memberikan saran dan berbagi pengalaman yang sangat berharga dalam penyusunan jurnal ini. Kedua, penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan atas segala dukungan yang diberikan dalam penyusunan jurnal. Ketiga, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak SDN Palasari 03 yang telah bekerja sama dan memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang keberjalanan penelitian ini. Semoga

jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, E., Setiyono, C.A., Pursetiani, A.T., Prihama, A.E. and Siyam, N., 2022. Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Ecobricks dalam Pengelolaan Sampah Plastik. Jurnal Bina Desa, 4(2), pp.157-164.

Ikhsan, M., & Tonra, W. S. (2021). Pengenalan Ecobrick di Sekolah Sebagai Upaya Penanggulangan Masalah Sampah. PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,1(1),32–38. https://doi.org/10.51574/patikala.v1i1. 95

Rahayu, A. S., Awaliah, W. S., & Logayah, D. S. (2024, Juni 3). Ecobrick: Sebagai Solusi Pengurangan Sampah dan Membangun Kebiasaan Hidup Bersih Siswa di Sekolah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)), 4, 517-521. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2559

Santi, M. E. (2019). Ecobrick Solusi Cerdas dan Praktis Untuk Pengelolaan Sampah Plastik. https://doi.org/10.31219/osf.io/xvc5n

Suminto, S. (2017). Ecobrick: Solusi cerdas dan kreatif untuk mengatasi sampah plastik. Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan Dan Perancangan Produk) 3(1), 26–34.

Surono, U. B., & Ismanto, I. (2016). Pengolahan sampah plastik jenis PP, PET dan PE menjadi bahan bakar minyak dan karakteristiknya. *Jurnal Mekanika dan Sistem Termal*, *1*(1), 32-37.

Widodo, Sarno, Ni Nyoman Nepi Marleni, dan Nitis Aruming Firdaus. 2018. Pelatihan Pembuatan Paving Block dan Ecobricks dari Limbah Sampah Plastik di Kampung Tulung Kota Magelang. Community Empowerment, Vol. 3 (2): 63-66

Yusiyaka, R.A. and Yanti, A.D., 2021. Ecobrick: solusi cerdas dan praktis untuk pengelolaan sampah plastik. Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(2), pp.68-74.

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Pola Asuh Orang Tua di Era Digital dalam Membentuk Karakter Anak

Mukhlishah[1*], Adhistria Rahma Anjani[2,] Annisa Khomsyatun Munawaroh[3], Sarla Pebrianti Rahayu[4], Silma Kaffah Millati[5]
[1] Pendidikan Agama Islam/Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[2, 5] Pendidikan Agama Islam/Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[3] Hukum Keluarga Islam/Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[4] Pendidikan Islam Anak Usia Dini/Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

[*]email: sukasaribkkbnk7@gmail.com

Kata Kunci: *Parenting, Parent, Era, Digital.*

ABSTRACT

This research discusses the role of parents in shaping children's character in the digital era. With the advancement of technology, children are more often exposed to digital devices that can affect their character development. The purpose of this study is to identify parental communication patterns and how this impacts the formation of children's character. Based on literature analysis, it was found that there are four main communication patterns applied by parents, namely consensual, pluralistic, protective, and laissez-faire patterns. Each pattern has a different influence on the development of children's characters. The conclusion of this study shows that open and educational communication from parents can help children use technology wisely and support the formation of positive character.

Kata Kunci: *Pola Asuh, Orang Tua, Era, Digital.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital. Dengan kemajuan teknologi, anak-anak lebih sering terpapar oleh perangkat digital yang dapat mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola komunikasi orang tua dan bagaimana hal ini berdampak pada pembentukan karakter anak. Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa ada empat pola komunikasi utama yang diterapkan oleh orang tua, yaitu pola konsensual, pluralistik, protektif, dan laissez-faire. Setiap pola memiliki pengaruh

yang berbeda terhadap perkembangan karakter anak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan edukatif dari orang tua dapat membantu anak menggunakan teknologi secara bijak dan mendukung pembentukan karakter yang positif.

PENDAHULUAN

Era digital adalah periode dimana teknologi digital seperti jaringan internet dan perangkat elektronik berperan penting untuk meningkatkan kecepatan dan arus pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat informasi tidak dapat menghindari anak-anak dari paparan teknologi. Teknologi baru menjadi tanda munculnya era baru dan masyarakat informasi. Menurut Webster, revolusi teknologi informasi telah menyebarkan teknologi komunikasi, yang berperan dalam menciptakan masyarakat baru.(Amrillah et al., 2020)

Seiring dengan perkembangan teknologi digital saat ini, penggunaan perangkat digital telah mempengaruhi kehidupan anak-anak secara signifikan. Pengawasan dan pendampingan orang tua menjadi sangat penting karena anak-anak terpapar pada berbagai informasi, baik positif maupun negatif. Anak-anak perlu dibimbing untuk memilah informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dalam pendidikan di era digital menurut Winarno, orang tua harus memantau kemampuan anak dalam menyikapi dan memandang dirinya secara positif agar dapat memanfaatkan perangkat digital dengan baik.(Ramadhani & Ritonga, 2019)

Mendidik anak merupakan sebuah tantangan yang besar dan menjadi hal yang sulit dilakukan secara maksimal seiring perkembangan zaman yang terus berubah-ubah ini. Dalam trilogi pendidikan, tanggung jawab dalam mendidik anak sendiri tidak hanya dibebankan pada sekolah saja, tetapi keluarga serta lingkungan menjadi faktor yang paling pertama dan utama dalam mendidik dan membentuk karakter seorang anak. Orang tua perlu melakukan pendidikan kepada anak untuk membentuk karakter mereka dengan pola asuh yang positif dan efektif.

Dikutip dari Shin, implikasi pendidikan karakter memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks pendidikan keluarga, perhatian khusus diperlukan saat anak menggunakan perangkat digital seperti TV, komputer, ponsel cerdas, dan tablet. Penggunaan perangkat ini dapat berdampak positif maupun negatif pada perkembangan anak.(Ramadhani & Ritonga, 2019)

Pada generasi sebelumnya, tugas mengasuh anak cenderung hanya dilimpahkan pada ibu. Namun saat ini terjadi pergeseran konsep dari motherhood menjadi parenthood. Konsep peran orang tua berfokus pada peran kedua orang tua, atau ayah dan ibu. Secara psikologis, anak membutuhkan kehadiran ayah dan ibu yang saling melengkapi untuk perkembangan kepribadiannya. Ayah yang optimal dalam menjalankan tugas mengasuh dan mengasuh anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Orang tua, ayah dan ibu, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang seorang anak karena merekalah orang pertama yang dikenal oleh seorang anak. Empat tugas orang tua adalah mengasuh, merawat, melindungi, dan mendidik anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran orang tua sangat penting dalam membesarkan anak karena kepribadian seorang anak dibentuk oleh cara orang tua membesarkannya. Anak-anak sangatlah unik dan masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda. Di sini orang tua berperan dalam memahami kepribadian anaknya agar kelak anaknya bisa menjadi inspirasi besar bagi orang tuanya dan orang disekitarnya. Sebagai orang tua, dianjurkan untuk memberikan pola pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan anak yang bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran orang tuanya.(Wulansari et al., 2023)

Keterlibatan orang tua dalam setiap aspek perkembangan kepribadian anaknya berarti bahwa mereka benar-benar peduli terhadap anaknya. Orang tua tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan anaknya, seperti perangkat dan media digital yang dibeli atau digunakan oleh anaknya, namun juga harus mampu menata fasilitas tersebut dengan baik dengan pengawasan dan bimbingan yang tepat. Pendidikan adalah hubungan atau interaksi antara orang tua dan anak yang tujuannya membentuk perkembangan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual anak hingga dewasa. Jika anak dibesarkan dengan pola asuh yang tepat maka akan berdampak positif dalam membesarkan anak. (Amriani et al., 2023)

Pada saat ini, jelas perkembangan anak masih memerlukan perbaikan. Hal ini terlihat pada perilaku anak sehari-hari seperti: Misalnya, kurangnya kejujuran, kurangnya disiplin, kurangnya rasa hormat, dan lain-lain dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Banyak permasalahan dalam pola asuh orang tua yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, mulai dari orang tua yang terlalu sibuk memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya hingga orang tua yang kurang memahami pentingnya keterlibatan orang tua dalam

pengasuhan anaknya. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada tumbuh kembang anak. Menurut Hasana yang dikutip dari Latifa, kepribadian seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir, namun seiring bertambahnya usia seseorang, khususnya dalam perkembangan anak di usia dini juga mencakup peran orang tua yang diperlukan.(Sa'diah et al., 2023) Pola inilah yang membentuk perkembangan kepribadian anak. Pengasuhan orang tua dapat sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian anak. Pentingnya peran pendidikan orang tua dalam perkembangan kepribadian anak mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan berbagai aspek diri anak. Namun kenyataannya, minat dan kepekaan orang tua terhadap tumbuh kembang anak masih rendah. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan pentingnya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak, karena pola asuh orang tua sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pendidikan dan perkembangan anak. (Sa'diah et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmaniar menunjukkan bahwa pola asuh orang tua di era digital sangat penting, namun banyak orang tua yang mengabaikannya, terutama pada perkembangan era digital yang sangat pesat. (Rachmaniar, 2022) Dengan menggunakan metode studi literatur, ia mengungkapkan bahwa karakteristik yang dimiliki anak di era digital berbeda dengan era sebelumnya. Anak memiliki ketergantungan pada internet atau barang digital lain dalam kehidupannya.(Rachmaniar, 2022)

Ketergantungan pada internet tersebut yang memunculkan berbagai macam karakter pada anak yang tampak di halaman media sosial dan berimbas pada pendidikan mereka. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan *Affective Learning,* hanya saja Rachmaniar tidak menjelaskan secara rinci mengenai *Affective Learning*.(Rachmaniar, 2022)

Tidak jauh berbeda, permasalahan mengenai pengabaian terhadap pola asuh juga terjadi di masyarakat desa Sukasari. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak anak serta remaja yang memiliki kecanduan terhadap gadget. Melalaikan jam tidur, dan masuk dalam pergaulan bebas, hingga berujung pada pernikahan dini.

Maka dari itu, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa Sukasari, kami mengadakan seminar yang berisi sosialisasi atau penyuluhan mengenai Pola Asuh Orang Tua di Era Digital. Dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya di era digital saat ini.

METODE

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan menggunakan metode seminar. Metode seminar adalah salah satu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang kami lakukan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh orang tua di era digital saat ini.

Terdapat beberapa fase dalam kegiatan sosialisasi mengenai pola asuh. Berikut fase-fase yang kami lakukan,

1. Fase pertama, kami melakukan kunjungan untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat di RW 10 desa Sukasari
2. Fase kedua, kami melakukan perumusan masalah, menentukan tujuan serta cara penyelesaian masalah tersebut
3. Fase terakhir, kami kemudian menetapkan judul kegiatan seminar yang akan dilakukan, serta melakukan sosialisasi dalam kegiatan seminar tersebut mengenai pentingnya pola asuh orang tua di era digital.

Di dalam seminar tersebut, kami melakukan beberapa diskusi untuk memberikan beberapa masukan atau penyelesaian masalah yang dialami, serta memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar ini dihadiri oleh peserta yang merupakan masyarakat RW 10 di desa Sukasari kec. Pameungpeuk terkhusus orang tua dari para murid di Kober Flamboyan yang memiliki latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan yakni fase pertama yang dilakukan, terdapat banyak permasalahan atau keluhan dari orang tua terhadap anaknya. Diantaranya, mereka mengeluhkan anak-anak yang kecanduan game online, nonton drama korea dan lainnya, yang menyebabkan mereka tidur larut malam, atau bahkan tidak tidur. Keluhan lainnya, disebabkan oleh kurangnya kontrol media sosial yang baik, sehingga anak berkenalan dengan seseorang yang menyebabkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas tersebut berujung pada *MBA (Married by Accident),* hingga pernikahan dini. Semua itu tidak terlepas dari banyaknya orang tua yang memiliki pekerjaan atau profesi sebagai buruh pabrik, yang mengakibatkan kurangnya waktu orang tua bersama anaknya.

Perkembangan teknologi menyebabkan jurang perbedaan antar keluarga semakin tampak. Misalnya, jika orang tua A membelikan anaknya tablet pintar, orang tua B merasa harus melakukan hal yang sama. Akibatnya, pola asuh

yang awalnya dianggap penting menjadi terabaikan. Orang tua lebih fokus mengatasi perbedaan tersebut dengan memenuhi kebutuhan materi anak, sehingga mereka sibuk bekerja dan kurang memikirkan pengasuhan yang tepat untuk anaknya.(Aslan, 2019)

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada fase pertama, kami kemudian merumuskan masalah yang sesuai. Diantaranya adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman pola asuh yang harus dimiliki oleh orang tua yang ada di warga RW 10 desa Sukasari.

Selain itu, kami juga menentukan cara untuk menyelesaikannya. Cara yang kami temukan adalah dengan menggunakan metode seminar. Metode seminar ini kami lakukan pada fase ketiga.

Pada fase ketiga, kami melakukan seminar. Pada kegiatan seminar tersebut, kami kemudian menghadirkan seorang ahli dalam bidang pendidikan dengan metode ceramah. Beliau memaparkan mengenai pentingnya pola asuh, macam-macam pola asuh serta pola asuh yang baik yang sesuai dengan era digital.

Berdasarkan riset Muhammad Hayyumas (Rachmaniar, 2022), terdapat empat tipe pola komunikasi orang tua di era digital:

1. Pola Konsensual, yaitu Orang tua senang berdiskusi dengan anak, tetapi keputusan akhir tetap di tangan orang tua, meskipun berbeda dengan keinginan anak, dengan penjelasan mendalam.

2. Pola Pluralistik, yaitu Komunikasi terbuka, orang tua sering berbicara dengan anak, dan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada anak asalkan baik.

3. Pola Protektif, yaitu Komunikasi jarang terjadi, tetapi kepatuhan dalam keluarga tinggi. Anak mudah dipujuk saat marah.

4. Pola Laissez-faire, yaitu Komunikasi jarang dilakukan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam komunikasi antara orang tua dan anak.

Pemateri memfokuskan pada tiga macam pola asuh menurut Hurlock yakni Otoriter, Permisif dan Demokratis.(Rachmaniar, 2021) Pola asuh yang ditekankan adalah pola asuh demokratis.

Setelah pemaparan pemateri, kami juga menampilkan sebuah video mengenai bahayanya media sosial. Metode lainnya adalah dengan menggunakan metode tanya jawab atau diskusi. Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan oleh para peserta dan narasumber dihasilkan beberapa keluhan.

Adapun beberapa keluhan yang disampaikan ialah oleh seorang ibu yang mempunyai seorang anak laki-laki yang masih duduk dibangku SMP. Menurut

pemaparan sang ibu anak tersebut mengalami perubahan sikap setelah pindah tinggal bersama dengan ayahnya. Semenjak tinggal bersama ayahnya anak tersebut menjadi jarang masuk sekolah. Dari rumah ia berdandan rapi untuk pergi ke sekolah tetapi tidak pernah sampai ke sekolah.

Keluhan lainnya ialah bagaimana cara menghentikan perkataan jangan atau mengurangi banyak larangan kepada anak. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, narasumber memberikan beberapa solusi. Pertama, solusi pada pola asuh di era digital yaitu.

1. Pentingnya pendidikan agama yang baik bagi anak. Pendidikan agama merupakan pondasi penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Ajaran agama tidak hanya memberikan pemahaman tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
2. Lalu orang tua harus bersikap demokratis dalam artian orang tua harus bisa menjadikan dirinya sebagai teman curhat bagi sang anak
3. Mengajarkan anak ilmu pengetahuan atau keterampilan
4. Mengajari anak mengenai pemahaman tentang dirinya sendiri serta
5. Mengajarkan anak agar dapat bertanggung jawab.

Lalu bagaimana cara menghentikan perkataan jangan atau mengurangi banyak larangan terhadap anak. Narasumber memberikan solusi yaitu sebagai berikut.

1. Dengan mengajak anak diskusi terkait hal-hal yang akan ia putuskan agar ia menimbang mana yang baik dan tidak untuk dirinya sendiri
2. Memberikan pilihan terhadap anak yang mempunyai konsekuensi untuk dirinya sendiri.

Dengan adanya seminar ini, diharapkan masyarakat warga RW 10 desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung dapat semakin menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter yang baik di setiap lingkungan keluarga dan masyarakat pada era digital ini yang pada akhirnya semakin menguatkan kehidupan bagi bangsa dan Negara.

KESIMPULAN

Seminar yang diselenggarakan di RW 10 Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, telah berhasil mengidentifikasi permasalahan utama dalam pola asuh anak di era digital, khususnya di kalangan orang tua yang memiliki

kesibukan bekerja. Permasalahan tersebut meliputi kecanduan gadget, pergaulan bebas, dan kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Melalui seminar ini, beberapa poin penting berhasil disampaikan:

- Pentingnya pola asuh yang tepat: Seminar menekankan pentingnya orang tua menerapkan pola asuh yang demokratis, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, namun tetap memberikan batasan dan pengawasan.
- Peran pendidikan agama: Pendidikan agama dianggap sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama dapat menjadi pedoman bagi anak dalam menghadapi tantangan di era digital.
- Komunikasi yang efektif: Seminar menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua perlu menjadi teman bagi anak untuk berbagi cerita dan masalah.
- Pengembangan keterampilan: Orang tua disarankan untuk mengembangkan keterampilan anak, baik itu akademik maupun non-akademik.
- Tanggung jawab: Anak perlu diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan adanya seminar ini, para orang tua dapat menerapkan pola asuh yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan keluarga dan perkembangan anak. Selain itu, seminar ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosial yang sering terjadi akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, seperti pergaulan bebas dan kenakalan remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam Pengabdian ini, diantaranya :

1. Ibu Dra. Hj. Mukhlishah, M.Ag Selaku Dosen Pendamping Lapangan
2. Bapak Erwan Setiawan Selaku Kepala Desa Sukasari
3. Bapak Mamat Slamat Selaku Kadus
4. Masyarakat Desa dan Karang Taruna Desa Sukasari
5. Serta pihak-pihak yang lain yang telah membantu pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata sehingga tersusunnya laporan akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amriani, S. R., Islamiyah, N., & Ainun. (2023). Pelaksanaan Seminar Pola Asuh Anak Usia Dini Pada Era Digital di TK Aisyiyah II Perumnas. *KARYA: Journal of Educational Community Service*, *2*(1).

Amrillah, H. M. T., Rahmaningtyas, A., Hartati, M., & Agustin, G. (2020). Peran Orang Tua di Era Digital. *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *1*(1), 23. https://doi.org/10.29240/zuriah.v1i1.1884

Aslan, A. (2019). Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital. *Jurnal Studia Insania*, *7*(1), 20. https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2269

Rachmaniar, A. (2022). Pola Asuh Orang Tua di Era Digital. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, *2*(1), 148–158. https://doi.org/10.32627/jeco.v2i1.394

Ramadhani, S. P., & Ritonga, R. (2019). Sosialisasi Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Anak Di Era Digital Madrasah Ibtidaiyah Gunung Bunder II, Pamijahan Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)*, *2*(02), 94–100. https://doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.444

Sa'diah, S. K., Roka, R., Nuratilah, A. S., Wahyudin, D., & Caturiasari, J. (2023). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, *4*(1), 621–629. https://doi.org/10.37304/enggang.v4i1.12114

Wulansari, A. D., Pratama, D., Afifah, S. F., Julaikah, T., & Kandi, A. M. (2023). Smart Digital Parenting untuk Membentuk Karakter Anak Di Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. *InEJ: Indonesian Engagement Journal*, *4*(2). https://doi.org/10.21154/inej.v4i1.7063

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

The Role of Pancasila in Facilitating Religious Moderation in Indonesia

Edy Saputra[1], Rahmat Hidayat[2], Sumper Mulia Harahap[3], Muhammad Husni Abdulah Pakarti[4], Diana Farid[5]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Meulaboh, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
[3] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
[4] Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya
[5] Universitas Muhammadiyah Bandung

*email korespondensi: edysaputra@staindirundeng.ac.id

keywords:
Pancasila; Religious Moderation; Tolerance; Pluralism; Indonesia.

ABSTRACT

This study explores the relationship between Pancasila values and religious moderation in Indonesia, and how these values can promote a moderate, harmonious, and tolerant religious life. As the country with the largest Muslim population, Indonesia faces challenges in maintaining religious harmony amidst diversity. Analyzing the five principles of Pancasila, the study finds that the first principle (belief in One God) and the second (just and civilized humanity) lay a strong foundation for religious moderation. The third principle (Unity of Indonesia) stresses the importance of unity despite religious differences, while the fourth (Democracy guided by wisdom) encourages interfaith dialogue to resolve conflicts. The fifth principle (Social Justice) advocates for equitable welfare without discrimination, including in religious matters. The findings suggest that Pancasila can serve as a philosophical basis for religious moderation, promoting tolerance, dialogue, and respect for religious pluralism. The study also recommends expanding Pancasila values through education, government policies, and community empowerment to enhance religious moderation understanding. However, limitations in geographic scope and sample size suggest further research is needed for a more comprehensive perspective.

Kata Kunci:
Pancasila; Moderasi Beragama; Toleransi; Pluralisme; Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama di Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mendorong kehidupan beragama yang moderat, harmonis, dan toleran. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah keragaman. Menganalisis lima sila dari Pancasila, penelitian ini menemukan bahwa sila pertama

(Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) memberikan dasar yang kuat bagi moderasi beragama. Sila ketiga (Persatuan Indonesia) menekankan pentingnya persatuan meskipun ada perbedaan agama, sementara sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan) mendorong dialog antar agama untuk menyelesaikan konflik. Sila kelima (Keadilan Sosial) mengadvokasi kesejahteraan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal agama. Temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar filosofis untuk moderasi beragama, mendorong toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap pluralisme agama. Studi ini juga merekomendasikan perluasan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama. Namun, keterbatasan dalam cakupan geografis dan jumlah sampel menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

PENDAHULUAN

Religious moderation plays a crucial role in the context of Indonesia as a multi-religious and multicultural country. As a nation with significant religious diversity, religious moderation is necessary to maintain harmony and peaceful coexistence among different religious communities. Indonesia, with its rich diversity, faces great challenges in fostering social harmony amidst the variety of religions, ethnicities, and cultures. In this regard, a moderate approach to religion becomes essential, as it can prevent potential social and religious conflicts that could undermine national unity, as well as strengthen national cohesion. Religious moderation helps prevent tensions between religious communities and strengthens the sense of togetherness in national life (Daheri, Warsah, Morganna, Putri, & Adelia, 2023; Mardiansyah & Fadlullah, 2023). Furthermore, religious moderation serves as a safeguard against religious radicalization and extremism, which pose significant threats to peace, social stability, and harmony in Indonesia (Mardiansyah & Fadlullah, 2023; Subchi, Zulkifli, Latifa, & Sa'diyah, 2022).

Interestingly, religious moderation is not a foreign concept in the religious life of Indonesian society. In fact, the values of religious moderation have long been embedded in the religious traditions of Indonesia, both explicitly and implicitly. A concrete example of this is the "*Tanpo Waton*" poetry by KH. Muhammad Nizam As-Shofa, which clearly emphasizes the importance of moderation values to create harmony in the nation's religious and social life (Rahman et al., 2021). In addition, although the terms used to describe religious moderation may vary across different religions, almost all religions in

Indonesia, including Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, teach the principle of moderation, which fundamentally supports the creation of interfaith harmony (Syafieh & Anzhaikan, 2023). Therefore, religious moderation has become an integral approach in maintaining unity and cohesion amidst Indonesia's religious and cultural diversity.

Indonesia, as a country with rich religious pluralism, faces various challenges in achieving tolerance among religious communities. The country is home to diverse religions, including Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and various indigenous beliefs, making Indonesia one of the largest religiously plural countries in the world (Zahro Ulfaturrohmatiririn, 2021). While this diversity is a cultural asset that should be appreciated, it also presents significant challenges in maintaining tolerance and interfaith harmony. Some of the issues in the context of religious pluralism in Indonesia include: 1) inconsistency in government regulations regarding constitutional provisions on religious freedom, 2) the rise of religious conservatism leading to violent extremism, and 3) the politicization of identity and religious sentiment in electoral politics, often resulting in social tensions (Halili, 2019). Additionally, various religious conflicts continue to occur, such as opposition to the construction of Islamic places of worship and the emergence of violence with religious undertones, which continue to affect interfaith harmony in Indonesia (Jegalus, Atang, & Binsasi, 2024).

Efforts to address these challenges have been made through various policies and programs that promote interfaith harmony. One such program is the "*Kampung Toleransi*" (Tolerance Village), which focuses on social, religious, and economic activities that involve people of all faiths working together in mutual respect and cooperation in daily life (Nurjannah & Bin AB Rahim, 2024). Additionally, the development of modern pluralism based on equality is essential to replace traditional pluralism, which tends to emphasize unity within a specific spiritual community while overlooking the diversity among religious groups (Jegalus et al., 2024). This modern pluralism approach is expected to create stronger social stability and a harmonious, peaceful life at both the national and global levels (Zahro Ulfaturrohmatiririn, 2021).

In this context, Pancasila, as the ideological foundation of the Indonesian state, plays a critical role in shaping the nation’s religious and social life. Pancasila consists of five interconnected and inseparable principles that reflect universal national values and can accommodate the religious, ethnic, and cultural diversity of Indonesia (Maulida, Xavier, & Elliot, 2023). As an open ideology, Pancasila provides space for the integration of Islamic values with traditional and multicultural values found in Indonesia, although challenges in its implementation remain. One such challenge is the emergence of radical

movements that threaten national unity (Arfiyansyah et al., 2024; Hidayah, Rizky Fauziyah, & Wibowo, 2024). Therefore, strengthening Pancasila education and religious moderation becomes crucial in safeguarding national unity, with the role of religious leaders as mediators and wise problem-solvers among religious communities being emphasized (Majid, Setiawan, & Izzah, 2024). In this regard, Pancasila serves not only as the state ideology but also as a tool for reinforcing unity and national cohesion in the diverse Indonesian society, as well as promoting national stability (Cesilia Fransiska H Rajagukguk, Dian Novita Ayudea, & Encik Mutia Rama Ananda, 2024).

This study holds significant relevance in the social and political context of Indonesia, given the challenges the country faces in maintaining unity amidst its religious, ethnic, and cultural diversity. As a nation with a diverse array of religions and cultures, Indonesia faces issues that may spark social tensions, particularly the potential for religious conflicts, often tied to identity politics and radicalization. Therefore, religious moderation is crucial to avoid religiously motivated violence and to strengthen the sense of togetherness among different groups.

Specifically, this research aims to examine the role of Pancasila in facilitating religious moderation in the context of Islam in Indonesia, as well as to assess the influence of Pancasila's values on interfaith tolerance among Muslim communities in Indonesia. This study will explore the extent to which Pancasila can serve as an effective foundation for fostering religious moderation, particularly in addressing challenges such as rising radicalization and social polarization. The research is expected to offer new insights into the relationship between the state ideology (Pancasila) and the practice of religious moderation, as well as provide policy recommendations to further promote religious moderation in Indonesian society, thereby enhancing interfaith tolerance and harmony.

Thus, this study is anticipated to make a significant contribution to strengthening religious moderation in Indonesia and offer policy recommendations that can help reinforce interfaith harmony, improve understanding of tolerance, and strengthen social and political stability based on Pancasila values. The results of this research are expected to serve as a foundation for creating a peaceful, tolerant, and socially just Indonesia, which can also contribute positively to global peace.

METODE

This research employs a qualitative approach with a literature review design and critical discourse analysis. Data were collected through a literature study, encompassing policy documents, articles, and relevant research related to the application of Pancasila in religious life, particularly in the context of

Islam. Once the data were gathered, analysis was conducted using a qualitative descriptive method to ensure that the obtained data aligned with the truth. The data were then organized, processed, and analyzed to provide a clear understanding of the issues being investigated. The data analysis in this study involves three simultaneous processes. First, data reduction, which refers to the process of selecting, simplifying, abstracting, and transforming raw data collected from various sources. Second, data presentation, which involves organizing the information in a structured format to facilitate the drawing of conclusions and decision-making. Third, conclusion drawing, which includes the process of verification, both briefly through the analyst's preliminary thoughts and in-depth by revisiting the data to reach intersubjective consensus.

Acceptance and Application of Pancasila in the Religious Life of Indonesian Muslim Society

Pancasila, as the ideological foundation of the Indonesian state, has been widely accepted in the religious life of Indonesian Muslim society. The majority of Indonesian Muslims view that there is no conflict between Islamic teachings and the values enshrined in Pancasila (Pohan & Vinata, 2019). Pancasila is seen as a value system that reflects noble teachings that have been part of Indonesia's traditions long before independence, and which are also in line with Islamic teachings (Rofiq, 2020). Pancasila is not only regarded as the state foundation that governs national life but also as a reflection of universal values consistent with Islam, emphasizing morality, unity, and social justice.

However, despite the general acceptance of Pancasila by Muslim society, its implementation faces several challenges. One major challenge is the rise of radical Islamic movements advocating for the establishment of an Islamic state or caliphate, which is seen as conflicting with the spirit of Pancasila that underpins the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) (Rofiq, 2020; Sudjito, Muhaimin, & Widodo, 2018). These movements often oppose the fundamental principles of Pancasila, which emphasize diversity, pluralism, and democracy, and which could disrupt social harmony and stability in Indonesia.

Additionally, debates within certain circles regarding the relationship between Islam and Pancasila in the context of Indonesia's multiculturalism present another challenge. Some groups argue that the application of Pancasila in a multicultural society requires a more inclusive approach, where Islamic theological principles must accommodate diversity rather than be confined to a single perspective (BZ, Said, & Mistar, 2024). This calls for a deeper understanding of the Pancasila values that align with moderate Islamic principles.

To address these challenges, several efforts need to be made, including deepening the understanding of Pancasila values both in formal education and

through a more inclusive theological approach. Suparjo (2022) suggests that an inclusive theological approach can strengthen the acceptance of Pancasila values in religious life, particularly in Islam (Suparjo, 2022). In this context, Islamic education based on the wasathiyah perspective, or moderation, is crucial to raising awareness among Muslims about the importance of coexisting with religious diversity in Indonesia (BZ et al., 2024). Thus, Pancasila can be seen as the national umbrella that protects all citizens, including Muslims as the majority, and serves as a foundation for creating social harmony in a pluralistic society.

Patterns of Implementing Pancasila Values in Building Religious Moderation

The implementation of Pancasila values in Indonesia to foster religious moderation reveals several key patterns. Core values of Pancasila, such as belief in one God, just and civilized humanity, Indonesian unity, and social justice, have positively impacted strengthening relationships among individuals from diverse religious and ethnic backgrounds (Ilmi, Akbar Siregar, & Rafli Chesio, 2024). For instance, the value of belief in one God serves as a foundation for developing interfaith dialogues that are respectful and deep. Through interfaith dialogue activities, more open and productive social interactions can be created, which, in turn, strengthen mutual respect and togetherness amidst diversity (Yuniarto, Nisa, Setianingsih, Illah, & Ilham, 2024).

One of the fundamental principles in applying religious moderation based on Pancasila is the spirit of *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). This national motto emphasizes the importance of unity amidst the diversity that characterizes Indonesia. The spirit of *Bhinneka Tunggal Ika* is vital in enhancing national consciousness and social cohesion in a plural society. This value serves as a foundation for religious communities to embrace differences in religion, culture, and ethnicity without diminishing their sense of unity as a nation (Yuniarto et al., 2024).

Moreover, religious leaders who advocate for inclusive approaches and interfaith dialogue play a crucial role in strengthening religious moderation. Such approaches help society understand that differences in belief are not barriers to living harmoniously (Majid et al., 2024). Nevertheless, the implementation of religious moderation based on Pancasila values still faces challenges. One such challenge is the mismatch between the practice of multicultural education in Indonesia and the social reality on the ground, which still shows disharmony in relations between religious and ethnic groups (BZ et al., 2024). Therefore, a multicultural Islamic education approach with a

wasathiyah (moderation) perspective is essential in reinforcing social harmony and building a more moderate and inclusive society.

Impact of Pancasila Implementation on Interfaith Tolerance

The implementation of Pancasila values has also had a positive impact on improving interfaith tolerance in Indonesia. Studies indicate that Pancasila values, such as belief in one God, humanity, unity, and social justice, significantly strengthen relationships among religious communities, especially among students from diverse religious and ethnic backgrounds (Ilmi et al., 2024). Activities like interfaith dialogue, cultural programs, and character education based on Pancasila have proven effective in fostering mutual respect and understanding among religious groups.

The motto *Bhinneka Tunggal Ika* embedded in Pancasila also plays a crucial role in strengthening social cohesion and raising national consciousness. This motto emphasizes the importance of tolerance and harmony among religious communities, which, in turn, reduces the potential for conflicts arising from differences in religion and beliefs (Yuniarto et al., 2024). The implementation of Pancasila values aligned with the principle of *Bhinneka Tunggal Ika* also contributes to national well-being and strengthens social bonds among Indonesians.

However, despite the positive effects of Pancasila implementation, challenges still remain. Some religious leaders who play a role in maintaining religious harmony face various obstacles, such as internal conflicts within religious communities and disparities in access to resources that affect their efforts to educate the public about the importance of religious moderation (Majid et al., 2024). Furthermore, incidents of interreligious violence, such as the destruction of a prayer hall in North Sulawesi in late 2020, indicate that efforts to build interfaith dialogue must continue to be enhanced and approached with greater emphasis on mutual understanding and respect (Kirom, 2021).

In conclusion, the implementation of Pancasila values has had a positive impact on building interfaith tolerance in Indonesia. Pancasila functions as a dynamic and open interfaith dialogue text that remains relevant to the development of Indonesia's religious community. Therefore, strengthening the values of Pancasila in social life must be continuously promoted at all levels of society, as seen in the example of life in Pondok Cabe, Pamulang, where harmonious interactions between followers of different religions have been successfully built (Fitria & Tanggok, 2020).

Overall, these findings suggest that Pancasila, despite facing some challenges in its implementation, continues to play an essential role in shaping religious moderation and enhancing interfaith tolerance in Indonesia. The

implementation of Pancasila values based on dialogue, inclusivity, and respect for diversity is key to maintaining social stability and harmony among religious groups. Therefore, it is crucial to further develop more inclusive and multicultural Pancasila education and strengthen the role of religious leaders in promoting broader religious moderation, so that Indonesian society can continue to uphold unity and integrity in its existing diversity.

Supporting and Hindering Factors in the Application of Pancasila for Religious Moderation in Indonesia

Pancasila, as the foundational ideology of the Indonesian state, plays a crucial role in facilitating religious moderation in a pluralistic society. Although Pancasila is widely accepted by the Indonesian public as the foundation for national life, its application in religious life faces various challenges and obstacles. Based on the findings of this research, there are several factors that both support and hinder the effectiveness of Pancasila in shaping religious moderation in Indonesia, particularly in the context of the Muslim-majority population. Supporting factors identified in this research include education, government policies, and the role of religious leaders, while key hindrances are often related to extreme interpretations of religious teachings that contradict Pancasila's values.

Supporting Factors

1. Education as the Primary Pillar in Religious Moderation

Education is one of the main supporting factors in applying Pancasila values for religious moderation. Research findings indicate that through formal education systems, both in general schools and Islamic educational institutions like madrasahs, Pancasila values are taught as part of character-building processes. Pancasila, which teaches about God, humanity, unity, and social justice, provides a solid foundation for fostering mutual respect among religious communities. Pancasila-based education offers an opportunity to instill early awareness about the importance of living harmoniously amidst diversity. This is evidenced by Utomo et al. (2022), who found that madrasahs play a significant role in introducing and strengthening the understanding of religious moderation among students, while maintaining local wisdom that respects diversity (Wahyuddin, Utomo, Alfaris, Cahyono, & Ashari, 2022).

Multicultural education, which integrates Pancasila values with a moderate religious perspective, is a strategic step in building social harmony in Indonesia. This education can reduce the potential for radicalization among youth by providing them with a more inclusive understanding of religious and cultural differences. Therefore, education becomes the key to fostering collective awareness about the importance of unity and tolerance among

religious communities, while also strengthening national spirit based on Pancasila.

2. Government Policies Supporting Religious Moderation

Government policies also play a crucial role in encouraging the application of Pancasila values to facilitate religious moderation. The Indonesian government, through the Ministry of Religious Affairs, has launched various policies supporting religious moderation, including books and roadmaps for religious moderation aimed at guiding society to express their religious beliefs in non-extreme ways, aligned with Pancasila values. These policies aim to reduce religious radicalization and encourage the creation of a harmonious and tolerant society.

In addition, the government also promotes the use of education, laws, and regulations based on Pancasila values to strengthen unity and harmony in diversity. According to Sukarna & Wiyono (2023), government policies emphasizing Pancasila values in all sectors, including in the religious context, have had a positive impact in creating a more tolerant and inclusive society (Febrian Nanda Putra Sukarna Febrian Nanda Putra Sukarna, 2023). This reflects the government's commitment to realizing a prosperous Indonesia where all religious communities can live together peacefully and with mutual understanding.

3. The Role of Religious Leaders in Building Social Harmony

The role of religious leaders, particularly ulama, is critical in maintaining social harmony and promoting religious moderation. The findings of this research show that ulama, as spiritual leaders, mediators, and wise problem solvers, have the ability to ease social and religious tensions that may arise from differences in beliefs. They actively guide the Muslim community to understand Pancasila values and integrate religious teachings with the principles of the state. Through effective communication, tolerance, and interfaith dialogue, ulama have played an active role in building and maintaining social harmony amid differences.

Majid et al. (2024) note that religious leaders advocating for inclusive approaches and interfaith dialogue have been able to strengthen religious moderation in Indonesia, demonstrating that differences in belief should not hinder the creation of religious harmony (Majid et al., 2024). Religious counselors, as agents of change, also play an essential role in motivating and encouraging society to live together with mutual respect, while promoting interfaith harmony.

Hindering Factors

1. Extreme Interpretations of Religious Teachings

Despite the many supporting factors for applying Pancasila in religious moderation, this research also identifies significant hindering factors, especially related to extreme interpretations of religious teachings. Some radical groups, such as Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), reject Pancasila as the state ideology and view it as contradictory to Islamic principles. These groups argue that Pancasila, which acknowledges religious pluralism and adopts a democratic system, is an ideology incompatible with the teachings of the Qur'an. This clearly contradicts the spirit of Pancasila, which prioritizes unity, social justice, and diversity. As Zarnuji et al. (2022) argue, these radical groups reject the foundational principles of the state, considering Pancasila an ideology of disbelief that must be rejected (Zarnuji, Azizah, Amin, & Prasetyawati, 2022).

However, research also shows that there is no fundamental contradiction between Islamic values and Pancasila. Every principle of Pancasila, such as social justice, solidarity, and humanity, aligns with the moderate teachings of Islam. In this context, Naufal & Ryshakti (2023) reveal that Pancasila contains elements consistent with Islamic values that promote moderation and tolerance (Naufal & Ryshakti, 2023). Therefore, the main challenge lies in easing tensions between extreme views and the more inclusive, moderate approach.

2. Disparities in Understanding of Pancasila among Society

Another hindering factor is the gap in understanding Pancasila within society, especially regarding interpretations of Pancasila values that have not been fully accepted by all groups. Some segments of society feel that Pancasila does not sufficiently reflect their religious values, leading them to reject or ignore its application in everyday life. Although significant efforts have been made by the government and religious leaders to educate the public about the importance of Pancasila as a national foundation that also reflects religious values, this understanding gap remains a major challenge. To address this, a multicultural Islamic education approach with a *wasathiyah* (moderate) perspective is essential to overcoming this gap and building a more inclusive society that respects differences.

Based on the findings of this research, it can be concluded that Pancasila, despite facing various challenges, continues to play a vital role in shaping religious moderation in Indonesia. Supporting factors such as Pancasila-based education, government policies that encourage religious moderation, and the active role of religious leaders in fostering social harmony all contribute significantly to creating a more peaceful and diverse society. However, there are also hindering factors, particularly related to extreme interpretations of religious teachings that conflict with Pancasila values. Therefore, continuous efforts are needed to strengthen the implementation of Pancasila values through inclusive approaches, interfaith dialogue, and

moderate Islamic education to address these challenges. In this way, Pancasila can remain a national umbrella that protects diversity and facilitates the creation of social harmony in Indonesia.

Discussion

This study aims to explore how the theory of religious moderation is applied in the religious life context in Indonesia, as well as the relevance of Pancasila's values in supporting the creation of social harmony within a society with a rich diversity of religions and cultures. The findings of this research indicate that acceptance of the concept of religious moderation in Indonesia depends not only on the understanding of religion itself but also on the interpretation of Pancasila's values as the state ideology. Pancasila, as the foundation of the state, has become the cornerstone in building an inclusive and harmonious life in Indonesia, in line with the main goal of religious moderation: fostering tolerance and understanding between individuals and religious groups. However, despite Pancasila providing a strong foundation for building a moderate religious life, its implementation on the ground still faces quite complex challenges, both from the internal aspects of each religion and from interfaith interactions.

The theory of religious moderation in Indonesia was introduced by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as an effort to reduce radicalization and religious extremism, as well as to strengthen peaceful coexistence amidst the country's religious diversity. In this context, religious moderation aims to strengthen tolerance and mutual respect between different religious groups, in line with the understanding that Indonesia is a highly pluralistic country. According to Singgih (2023), this theory of religious moderation not only serves as a strategy to address interreligious conflicts but also to prevent internal divisions within the same religion, which often have the potential to trigger social and political tensions (Singgih, 2023). Through this approach, Indonesia is expected to build a balanced religious life, emphasizing the principles of moderation and inclusiveness, in harmony with the teachings of Pancasila.

However, the findings of this study reveal that, despite the widespread attention to the theory of religious moderation, there is a significant difference in understanding among religious communities about what moderation actually means. Some groups feel that religious moderation could weaken the strength of their beliefs, especially among those with more conservative religious views. In their perspective, religious moderation is seen as an effort to dilute the sanctity and authority of religious teachings, which, if left unchecked, could undermine the core of their faith. For example, within Islam, some groups consider that religious moderation might introduce ideas that are incompatible

with the core principles of their faith, such as pluralism, which is seen as conflicting with the concept of *tawhid* (the oneness of God).

On the other hand, moderate groups view the theory of religious moderation as a very important approach to maintain the balance between religious freedom and the state's interest in creating social harmony. This is reflected in the teachings of Pancasila, which emphasizes the importance of peaceful coexistence within a united and democratic nation. Pancasila teaches that every individual has the right to embrace the religion they believe in, but this freedom must be exercised with full responsibility toward others, maintaining the unity and integrity of the nation. In this context, the theory of religious moderation aligns with the values of Pancasila, which prioritize balance and tolerance between religious and cultural differences in Indonesia.

One of the key findings in this study is that the main challenge in implementing religious moderation does not only come from interactions between different religions, but also from internal conflicts within a single religion. Research by Zuhri (2023) indicates that in Indonesia, particularly in Java, issues of interfaith tolerance are often easier to address compared to tensions that arise within the same religious group (Zuhri, 2023). This reflects the differences in understanding and interpretation of religious teachings, which sometimes trigger conflicts within religious communities themselves. For example, within the Muslim community, there are conservative groups that oppose the implementation of religious moderation values, which they view as an effort to weaken the purity of their religious teachings. On the other hand, moderate Islamic groups that support Pancasila values and religious pluralism view this inclusive attitude as part of the effort to build peace and national unity.

These internal challenges are also reflected in phenomena occurring in many regions of Indonesia, where groups with differing religious interpretations often become involved in conflicts, even though they adhere to the same religion. These conflicts are often related to differences in religious practices, understanding of religious teachings, or even interpretations of social and political issues related to religion. Therefore, an approach to religious moderation that focuses solely on interfaith relations will not be sufficient to create true peace. Efforts are needed to educate and build understanding among religious communities about the importance of moderation within each religion itself.

Pancasila, as the state foundation, provides a crucial basis for supporting the application of the theory of religious moderation in Indonesia. The values of Pancasila, as reflected in the first principle, "*Belief in One God*," are highly relevant to the goals of religious moderation, which emphasize respect for

religious freedom. The first principle of Pancasila affirms that every citizen has the right to embrace their faith without discrimination, and that the state must protect religious freedom. In addition, the second principle, "*Just and Civilized Humanity*," teaches the importance of mutual respect and understanding of differences, which forms the basic principle of religious moderation.

However, the findings of this study also show that, although the values of Pancasila strongly support the creation of religious moderation, their application in daily life is often hindered by differing perceptions within religious groups. Some groups feel that the values of Pancasila, although respected within the context of the state, do not always align with their religious beliefs. This creates tension between the moderation efforts promoted by the state and the more conservative religious interpretations. As Mahamid (2023) pointed out, some groups feel that Pancasila, as the state foundation, sometimes conflicts with the religious teachings they hold, especially concerning issues of pluralism and religious freedom (Mahamid, 2023). Therefore, it is important for the government and religious leaders to explain in depth that religious moderation based on Pancasila is not an effort to reduce religious convictions, but rather to strengthen tolerance and social harmony amid diversity.

Education plays a key role in promoting the application of religious moderation based on the values of Pancasila. The findings of this research emphasize the importance of education, at all levels from elementary to higher education, in introducing and teaching the concept of inclusive religious moderation. Education can play a very important role in instilling an understanding of diversity and the importance of living together in a peaceful and democratic state framework. In this regard, religious education based on Pancasila can provide a broader understanding of tolerance, interfaith cooperation, and the basic principles of Pancasila, which prioritize unity within diversity.

The importance of education is also reflected in the success of various programs initiated by the government, such as the establishment of the House of Religious Moderation in several universities (Yani, 2022), which serves as an educational center for students to study and practice religious moderation in daily life. These programs are expected to become agents of change in shaping a generation that not only understands diversity but also values and maintains good relationships with others, even across religious boundaries.

Based on the findings of this study, it can be concluded that the theory of religious moderation based on the values of Pancasila is a very important effort in maintaining social harmony and creating peaceful religious life in Indonesia. However, its implementation still faces significant challenges, both from the internal aspects of religion itself and from interreligious interactions.

Further efforts are needed to strengthen the understanding of religious moderation through education, more inclusive policies, as well as dialogue within and between religious groups. Only in this way can Indonesia realize its grand vision of becoming a just, civilized, and harmonious nation, in line with the values contained in Pancasila.

Analysis of the Values of Pancasila in Supporting Religious Moderation in Indonesia

Pancasila, as the foundation of the Republic of Indonesia, consists of five principles that serve as a guideline for national and state life. These five principles not only play a significant role in maintaining national unity but also in fostering a moderate, inclusive, and harmonious religious life in the midst of Indonesia's religious diversity. Religious moderation itself is a concept that emphasizes tolerance, respect for differences, and the rejection of religious radicalization. In the context of Indonesia's pluralistic society, the values of Pancasila play a vital role in supporting the achievement of religious moderation. Based on research findings and various references, the following is an analysis of how each of the Pancasila principles can support the implementation of religious moderation in Indonesia.

The first principle of Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa* (Belief in the One and Only God), has a very close relationship with the principle of religious moderation. Indonesia, as a country with various religions and beliefs, provides freedom for every citizen to embrace the religion of their choice. This value directly supports the concept of religious moderation, which aims to reduce religious extremism and promote mutual respect between different religious communities.

According to a study by Hidayah et al. (2024), religious moderation in Indonesia is closely related to the understanding that every individual has the right to embrace and practice their religion according to their beliefs, as long as it does not infringe upon the rights of others (Hidayah et al., 2024). This finding aligns with the principle of *Ketuhanan Yang Maha Esa*, which not only affirms religious freedom but also encourages religious communities to appreciate religious differences as part of the pluralism that must be preserved. In practice, the concept of religious moderation calls on individuals to respect these differences, rather than impose their beliefs on others.

However, another finding from a study by Zuhri (2023) indicates that challenges in religious moderation often arise in the context of interactions within the same religion (Zuhri, 2023). This shows that the application of the principle of *Ketuhanan Yang Maha Esa* needs to be accompanied by a deep understanding of pluralism within a single religion. Therefore, the state needs to strengthen religious education that emphasizes understanding diversity, both

within the same religion and across religions, to reduce potential conflicts that may arise.

The second principle of Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* (Just and Civilized Humanity), makes a significant contribution to supporting religious moderation, especially by emphasizing values of justice and respect for the dignity of every human being. This value stresses the importance of treating others fairly, regardless of religion, race, or ethnicity. In the context of religious moderation, this principle teaches that all religious communities must respect each other's basic rights to live peacefully and harmoniously.

A study by Singgih (2023) mentions that religious moderation aims to neutralize religious radicalization by promoting awareness of the plural religious context (Singgih, 2023). The principle of *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* teaches that no religion has the right to discriminate against others, and all individuals have the same rights to live side by side in diversity. Therefore, the state needs to promote inclusive policies that prioritize social justice for all segments of society, including in places of worship and in interfaith social interactions.

The third principle of Pancasila, *Persatuan Indonesia* (Unity of Indonesia), is highly relevant in supporting religious moderation, particularly in the context of a pluralistic social life. In a country consisting of various ethnicities, religions, and cultures, the principle of *Persatuan Indonesia* teaches the importance of maintaining unity and harmony among the elements of the nation, including between different religious groups.

A finding from Zuhri (2023) reveals that the biggest challenge in the context of religious pluralism in Indonesia does not come from interfaith interactions but from internal dynamics within the same religion. This phenomenon shows that religious moderation needs to be instilled not only in interfaith relations but also in relationships within groups that have different understandings of the same religion. The principle of *Persatuan Indonesia* emphasizes that despite differences in religious understanding, the greater shared goal of maintaining national unity and integrity must take precedence. In this context, religious moderation can serve as an effective tool to achieve social harmony amid diversity.

The fourth principle of Pancasila, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* (Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation in Representative Institutions), teaches the importance of consultation and dialogue in making decisions that encompass all layers of society. In the context of religious moderation, this value is highly relevant because religious moderation cannot be effectively applied without spaces for dialogue between religious groups and other stakeholders.

The approach to religious moderation requires the active involvement of all parties, including the government, religious leaders, and civil society, in building a consensus that supports tolerance and religious freedom. Findings from Itmam & Aouich (2024) indicate that policies supporting religious moderation, such as the establishment of *Rumah Moderasi Beragama* (House of Religious Moderation) in universities, have created spaces for more constructive interfaith dialogue (Itmam & Aouich, 2024). This demonstrates that deliberation and consultation based on wisdom are essential in promoting moderation values rooted in equality and justice.

The fifth principle of Pancasila, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* (Social Justice for All Indonesian People), focuses on the equitable distribution of welfare and social rights for all citizens, without discrimination. In the context of religious moderation, this principle emphasizes the importance of equal access in religious life, including the right to worship and interact with other religious communities without obstacles.

Research by Mahamid (2023) shows that religious moderation also includes efforts to create social justice in the context of religion. The state must ensure that every individual, regardless of religion, has the same right to live in peace and enjoy their basic rights. By upholding the principle of *Keadilan Sosial*, the state can ensure that policies supporting religious moderation will encompass all layers of society, without discrimination against any particular religious group. For example, religious moderation programs such as *Griya Moderasi Beragama* (Religious Moderation Centers) established in various regions can serve as a means to ensure fairness and equity in religious life in Indonesia.

In conclusion, it can be summarized that the values of Pancasila play a crucial role in supporting the implementation of religious moderation in Indonesia. The principle of *Ketuhanan Yang Maha Esa* strengthens religious freedom and tolerance, while *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* emphasizes the need for fair and civilized treatment of others, without discrimination. The principle of *Persatuan Indonesia* promotes social harmony despite religious differences, and *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* facilitates dialogue between religious groups to achieve it. Finally, the principle of *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* ensures the equitable distribution of religious rights for all citizens. Overall, the values of Pancasila provide a strong foundation for creating a moderate, peaceful, and inclusive society in religious life in Indonesia.

The Relationship Between Pancasila and Islamic Principles in Supporting Religious Moderation in Indonesia

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, plays a key role in the development and implementation of religious moderation. In this context, Pancasila, as the national ideology, has a strong connection with Islamic principles, especially in efforts to support religious moderation amidst Indonesia's religious diversity. Religious moderation, defined as a middle-ground attitude that rejects religious radicalization and extremism, is crucial for maintaining social harmony. In this discussion, we will examine how the values of Pancasila interact with Islamic teachings that support moderation, and how these two systems collaborate to form a harmonious and tolerant society.

The first principle of Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa* (Belief in One God), aligns closely with the Islamic principle of *tauhid* (monotheism), which teaches belief in the One Almighty God. This concept emphasizes the unity of God and encourages people of faith to respect the same God, even though their methods of worship may differ. In Islam, *tauhid* is not only related to belief but also to the recognition of religious freedom. Islam teaches that there should be no compulsion in religion (Qur'an: Al-Baqarah 256), which aligns with the first principle of Pancasila, affirming the freedom of religion (DEPAG RI., 2000).

In the context of religious moderation, both principles encourage followers to practice their faith peacefully, without imposing their beliefs on others. As explained by Hidayah et al. (2024), Indonesia's approach to religious moderation aims to raise awareness of religious pluralism and strengthen inclusive policies, which align closely with Islamic teachings that emphasize tolerance and mutual respect. Therefore, the principle of *Ketuhanan Yang Maha Esa* supports religious moderation by encouraging people of different faiths to live in peace, respect religious differences, and reject radicalization.

The second principle of Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* (Just and Civilized Humanity), is deeply connected to the principles of justice in Islam, which emphasizes fair treatment of others, regardless of social status, ethnicity, or religion. In Islamic teachings, justice is a fundamental value, and the Qur'an teaches Muslims to act justly even towards those who are not of their faith (Qur'an: Al-Ma'idah 8). This principle supports religious moderation by encouraging mutual respect and the recognition of others' rights.

Research by Singgih (2023) highlights that religious moderation focuses on avoiding radicalization and extremism by fostering awareness of the importance of mutual respect and fairness among religious groups. Therefore, the principle of justice in Islam strongly supports the implementation of religious moderation in Indonesia, which aims to create an inclusive space for all religions to thrive in a just and civilized society.

The third principle of Pancasila, *Persatuan Indonesia* (The Unity of Indonesia), supports the Islamic principle of *ukhuwah Islamiyah* (Islamic brotherhood), which teaches Muslims to unite and help one another without distinguishing ethnicity, race, or religion. This teaching aligns with the spirit of Pancasila in uniting all elements of Indonesian society, despite their different religious backgrounds.

As found in research by Zuhri (2023), one of the challenges in realizing religious pluralism in Indonesia comes not only from interfaith interactions but also from internal divisions within the same religion. In this context, the principle of *ukhuwah Islamiyah* can help strengthen unity among Muslims and between Muslims and adherents of other religions. Islam teaches that differences are a mercy and part of God's will, which should be accepted and respected (Qur'an: Al-Hujurat 13). This concept is highly relevant to the spirit of *Persatuan Indonesia*, which emphasizes the importance of maintaining social and national harmony amidst diversity.

The fourth principle of Pancasila, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* (Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation), is closely related to the principle of *musyawarah* (consultation) in Islam. Islam highly encourages *musyawarah* in decision-making, as stated in Qur'an: Ash-Shura 38, which asserts that decisions should be made through mutual consultation and that all matters should be deliberated with wisdom. *Musyawarah* in Islam is a form of participation that involves all parties in making fair and wise decisions.

In the context of religious moderation, *musyawarah* serves as a means to reach a common agreement that is acceptable to all parties without causing conflict. Research by Itmam & Aouich (2024) shows that policies supporting religious moderation, such as the establishment of *Rumah Moderasi Beragama* (House of Religious Moderation), open up space for constructive interfaith dialogue. Through wise deliberation, society can find solutions that support the creation of a moderate and harmonious religious life.

The fifth principle of Pancasila, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* (Social Justice for All the People of Indonesia), emphasizes the importance of equitable welfare for all citizens without discrimination. This principle aligns with the Islamic concept of social justice, which teaches that every individual, regardless of their religion, ethnicity, or social status, has the right to justice and welfare. Islam teaches that the fundamental rights of every person must be respected, including the right to worship according to their beliefs (Qur'an: Al-Baqarah 177).

The principle of social justice supports religious moderation by ensuring that all religions have equal opportunities in the public sphere. Government-

initiated religious moderation programs, such as *Griya Moderasi Beragama* (Religious Moderation Houses), can serve as channels to uphold social justice and reduce discrimination against minority religious groups. This aligns with Mahamid's (2023) assertion that religious moderation is not only about interfaith relations but also about social justice that includes religious rights and the freedom to worship.

This discussion shows that there is a strong relationship between the values of Pancasila and Islamic principles that support religious moderation in Indonesia. Pancasila, with its five main principles, provides a solid foundation for creating a moderate, inclusive, and peaceful religious life. The principle of *Ketuhanan Yang Maha Esa* aligns with the Islamic principle of *tauhid*, emphasizing religious freedom. *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* aligns with the Islamic principle of social justice, which teaches fair treatment of all human beings. *Persatuan Indonesia* and *ukhuwah Islamiyah* promote national unity, despite religious differences. *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* emphasizes deliberation as a means of reaching consensus. Finally, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* supports the Islamic principle of social justice, ensuring that all citizens have equal rights in religious life. Thus, Pancasila and Islam, with their moderate values, can collaborate to create a harmonious, just, and tolerant Indonesia.

Practical Implications

Based on the research findings regarding religious moderation, Islamic principles, and the values of Pancasila, several practical implications need to be considered to strengthen the application of Pancasila's values in religious life in Indonesia. This is also related to efforts to enhance public understanding of the importance of religious moderation in facing social and political challenges, especially amidst the increasingly complex dynamics of religious diversity. Therefore, several policy suggestions and recommendations to improve public understanding of religious moderation should be taken seriously.

One key step to strengthen the implementation of Pancasila's values in religious life is to promote tolerance and religious moderation education from an early age. Religious education based on the values of Pancasila needs to be more intensively introduced into the formal education curriculum, particularly at the elementary and secondary school levels. This is important because the younger generation is the future leader who will carry and apply values of tolerance and religious moderation in social and political life. Therefore, the design of religious education curricula should emphasize moderation, tolerance, and respect for religious differences. Religious education materials can be developed by integrating Pancasila principles, particularly the first principle,

which teaches the value of belief in God, and the second principle, which upholds just and civilized humanity. Additionally, teacher training is also needed to enable them to teach religious moderation in a wise, sensitive, and diverse classroom setting.

In addition to formal education, higher education institutions also play a crucial role in shaping critical and moderate thinking among students. Therefore, religious moderation programs in universities should be strengthened to encourage students to understand the importance of religious and cultural diversity, as well as the role of religion in building a harmonious society. As reflected in Yani's (2022) study, the establishment of Religious Moderation Houses at various universities is one form of policy implementation that can be expanded and strengthened. Universities can develop more intensive programs, such as seminars, workshops, and public discussions involving students from various religious backgrounds to engage in dialogue and share experiences about religious moderation and tolerance. Collaboration between universities is also essential to develop joint programs that promote Pancasila values and religious moderation. This is expected to shape a mindset among students that is not only tolerant but also actively maintains religious harmony in society.

The government also plays a strategic role in promoting interfaith dialogue, which can strengthen relationships between religious groups and reduce the potential for social conflict. One policy that supports this is the establishment of interfaith dialogue forums facilitated by the government, involving representatives from various religions, community leaders, and academics. These dialogue forums can serve as a platform for sharing knowledge and experiences about religious moderation, as well as raising public awareness of the importance of living together in diversity. Additionally, media outreach can be used to spread messages of religious moderation. The government and religious institutions can collaborate to utilize social media and digital platforms to educate the public more broadly about the values of religious moderation, with the goal of creating a more inclusive and tolerant society.

At the community level, empowerment is also crucial to increase understanding of religious moderation. Non-formal education based on the values of Pancasila can be strengthened, particularly among adults who may not fully understand the importance of tolerance and harmony. The community can be empowered through training organized by religious organizations or social institutions, which teach the importance of religious moderation in everyday life. Moreover, digital technology can be used to spread information related to religious moderation. Social media platforms such as Facebook,

Instagram, and YouTube can be used to educate the broader public through online campaigns supporting tolerance and religious moderation values.

To ensure that religious moderation is effectively implemented, religious freedom must be guaranteed by the state. The government needs to strengthen policies that protect religious freedom and ensure that every individual, regardless of religion or background, has the same right to practice their faith and beliefs safely. Furthermore, resolving interfaith conflicts must use a fair and wise legal approach, prioritizing dialogue and reconciliation. State policies that facilitate and guarantee the freedom of every citizen to practice their religion and worship according to their beliefs are essential to create a harmonious atmosphere in a pluralistic society.

By implementing policies based on education and social initiatives, it is expected that Pancasila's values can be more effectively applied in religious life. Tolerance education, strengthening religious moderation programs, interfaith dialogue, and community empowerment through various channels will help improve public understanding of the importance of religious moderation. These policies must involve all layers of society and related institutions so that Indonesia can become a more tolerant and moderate country, capable of maintaining social harmony and facing social-political challenges with greater wisdom.

Conclusion

This study highlights the strong connection between Pancasila and religious moderation in Indonesia, showing how Pancasila's values support principles of moderation while addressing challenges in their application. The first principle, belief in the One and Only God, and the second principle, just and civilized humanity, provide a solid base for fostering harmony, tolerance, and a balanced approach to religion in Indonesia. Pancasila plays a key role in preventing religious radicalization and strengthening national unity amidst the country’s religious and cultural diversity. The third principle, Unity of Indonesia, emphasizes that religious diversity is a national treasure to be protected. The fourth principle, democracy guided by wisdom and deliberation, underscores the importance of dialogue and consensus to resolve religious conflicts. Lastly, the fifth principle, social justice for all Indonesians, promotes fairness for everyone, regardless of their faith, further reinforcing the foundation for religious moderation in a pluralistic society.

Pancasila is not just the state ideology but also a philosophical foundation that supports religious moderation by promoting tolerance, dialogue, and respect for diversity. It can help address social conflicts and encourage a more moderate religious life in Indonesia. This study hopes that Pancasila's values will be applied more widely, not only in policies and formal education but

also in everyday interactions. To embed these values deeply in society, consistent efforts are needed from the government, schools, and communities to strengthen understanding and practice. Indonesia can serve as a role model for building a tolerant, harmonious society despite its diversity. However, this study has limitations, as it focuses on specific regions and a limited sample, which may affect its broader relevance. Future research should cover a wider geographical area and more diverse participants to provide a fuller understanding. Additionally, future studies could explore the influence of informal education, social media, political, and social dynamics on the implementation of Pancasila values. The role of religious organizations, community leaders, and government policies in promoting social harmony is also worth examining.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiyansyah, M., Aulia Sabrina, A., Hudi, I., Hilaliyah, N., Aprilia, M., & Aqila, Z. N. (2024). Analisis peran pancasila dalam membentuk perdamaian keberagaman dan persatuan. *Deleted Journal*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.35446/PENGABDIANKOMPETIF.V3I1.1779

BZ, Z., Said, M., & Mistar, J. (2024). Reeducation of Pancasila Values through Multicultural Islamic Education with Wasathiyah Insights to Build Community Social Harmony. *International Journal of Integrative Research*, *2*(2), 131–144. https://doi.org/10.59890/IJIR.V2I2.1449

Cesilia Fransiska H Rajagukguk, Dian Novita Ayudea, & Encik Mutia Rama Ananda. (2024). Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, *2*(3), 135–140. https://doi.org/10.55606/JUBPI.V2I3.3070

Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Putri, O. A., & Adelia, P. (2023). Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, *31*, 571–586. https://doi.org/10.25133/JPSSV312023.032

DEPAG RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Febrian Nanda Putra Sukarna Febrian Nanda Putra Sukarna, S. W. S. W. (2023). IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES IN SUPPRESSING THE RADICALISM MOVEMENT. *Awang Long Law Review*, *6*(1), 304–312. https://doi.org/10.56301/AWL.V6I1.1034

Fitria, A., & Tanggok, M. I. (2020). Inter-Religious Tolerance in Indonesia From the Perspective of Pancasila Philosophy. *Al-Albab*, *9*(2), 265–274. https://doi.org/10.24260/ALALBAB.V9I2.1876

Halili, H. (2019). Politic of Religious Pluralism in Indonesia: State and Future. https://doi.org/10.31124/ADVANCE.7963622.V1

Hidayah, A., Rizky Fauziyah, N., & Wibowo, W. (2024). THE ROLE OF THE STATE IN FOSTERING RELIGIOUS HARMONY IN INDONESIA: A HISTORICAL REVIEW, CHALLENGES, AND POLICY TOWARDS MODERATION. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, *5*(1), 1–36. https://doi.org/10.22515/AJIPP.V5I1.9181

Ilmi, M. B., Akbar Siregar, H., & Rafli Chesio, M. (2024). Implementation of pancasila values to improve tolerance between religions and tribes. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *5*(2), 270. https://doi.org/10.26418/JPPKN.V5I2.85080

Itmam, M. S., & Aouich, A. (2024). Legal Politics of Religious Moderation and State Defense Policy at Public Universities. *Justicia Islamica*, *21*(1), 87–110. https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V21I1.9242

Jegalus, N., Atang, A., & Binsasi, N. A. (2024). Unity in Diversity of Religions in Bumi Flobamora, Indonesia: From Traditional to Modern Pluralism. *Millah: Journal of Religious Studies*, 703–742. https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL23.ISS2.ART7

Kirom, S. (2021). Building a Dialog Room: Protecting Minorities in Indonesia. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, *2*(2), 72–78.

https://doi.org/10.30984/KIJMS.V2I2.60
Mahamid, M. N. L. (2023). Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *23*(1), 19–31. https://doi.org/10.32939/ISLAMIKA.V23I1.2375
Majid, M. K., Setiawan, M. N. H., & Izzah, A. N. (2024). Fostering Religious Harmony: The Role of Religious Leaders in Pancasila Village, Indonesia. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, *4*(2), 189. https://doi.org/10.22373/ARJ.V4I2.25818
Mardiansyah, T., & Fadlullah, M. E. (2023). THE CONCEPT ANALYSIS OF RELIGIOUS MODERATION BY KH. HASYIM MUZADI AND ITS RELEVANCE TO THE RELIGIOUS MODERATION MODULE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, *4*(1), 091–108. https://doi.org/10.59689/INCARE.V4I1.706
Masykur, Hermawanlla, M. A., Masruri, M., & Hasse, J. (2024). Reviving Religious Moderation for World Peace from the Religious Moderation House in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(3), 295–307. https://doi.org/10.62754/JOE.V3I3.3343
Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, *1*(2), 84–92. https://doi.org/10.55849/IJEN.V1I2.303
Naufal, M. A., & Ryshakti, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dalam Perspektif Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(4), 204–214. https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V1I4.555
Nurjannah, N., & Bin AB Rahim, M. N. (2024). Evaluating the Impact of the Tolerance Village Initiative on Interfaith Harmony: A Case Study in Jamika, Bandung. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, *4*(2), 160. https://doi.org/10.22373/ARJ.V4I2.25464
Pohan, I. A., & Vinata, R. T. (2019). Islamic Expansion in the Ideology of Pancasila and State Sovereignty. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *4*(1), 43–62. https://doi.org/10.15294/IPSR.V4I1.12658
Rofiq, A. C. (2020). Ideal Relationship Between Pancasila and Indonesian Muslims. *ARISTO*, *8*(2), 260. https://doi.org/10.24269/ARS.V8I2.2451
Singgih, E. G. (2023). Religious Moderation as Good Life: Two Responses to the Ministry of Religious Affairs' Directive on Religious Moderation in Indonesia. *Exchange*, *52*(3), 220–240. https://doi.org/10.1163/1572543X-BJA10038
Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/REL13050451
Sudjito, S., Muhaimin, H., & Widodo, A. S. S. (2018). PANCASILA AND RADICALISM: PANCASILA ENCULTURATION STRATEGIES AS RADICAL MOVEMENT PREVENTIONS. *Jurnal Dinamika Hukum*, *18*(1), 69. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1686
Suparjo, S. (2022). Drawing on the Implications of Indonesia's Founding

Father's Transformative Theological Practice for the Development of Inclusive Education for Students. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *3*(3), 661–672. https://doi.org/10.62775/EDUKASIA.V3I3.331

Syafieh, S., & Anzhaikan, M. (2023). Moderate Islam And Its Influence on Religious Diversity in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *23*(2). https://doi.org/10.14421/ESENSIA.V23I2.3262

Wahyuddin, I., Utomo, A. H., Alfaris, F., Cahyono, F., & Ashari, A. (2022). Moderasi Beragama untuk Generasi Milenial Pancasila. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, *14*(1), 1–21. https://doi.org/10.47945/TASAMUH.V14I1.588

Yuniarto, B., Nisa, D. A., Setianingsih, N. A. A., Illah, A. R., & Ilham, M. (2024). Bhinneka Tunggal Ika: Real Proof Of The Power Of Pancasila. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *2*(7). https://doi.org/10.55324/ENRICHMENT.V2I7.173

Zahro Ulfaturrohmatiririn, M. Z. M. M. Z. M. R. L. A. R. L. A. I. A. D. P. C. D. P. L. Z. L. (2021). MANAGING PLURALITY TO BOOST HARMONY AMONG RELIGIOUS ADHERENTS IN INDONESIA. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *21*(2), 137–146. https://doi.org/10.14421/APLIKASIA.V21I2.2550

Zarnuji, A., Azizah, I. N., Amin, M. N., & Prasetyawati, E. (2022). An Analysis of the Qur'an Values in Pancasila and Its Application of Mathematics Learning. *Bulletin of Pedagogical Research*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.51278/BPR.V2I1.236

Zuhri, S. (2023). RELIGIOUS MODERATION IN AN EASTERN JAVANESE TOWN. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *17*(2), 143–166. https://doi.org/10.21274/EPIS.2022.17.2.143-166

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Edukasi Tata Cara Wudhu dan Shalat sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius Siswa SD Palasari 3 Bandung

Dewi Nurdinar[1*], Tuti Alawiyah[2*] , Dra.Hj. Mukhlishah, M.Ag. [3], Iqlima Amelia[4], Riyan Supriatna[5], Andfrean Hutri Niaga[6], Abdul Majid[7], Kania Nurjanah[8], Putri Lathifa Halis[9], Kevin Alamsyah[10], Yogi Gumilar[11], Halida Hafni Sulisti[12]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*email: dewinurdinar19@gmail.com, alawiyahtuti424@gmail.com, mukhlishah@umbandung.ac.id, qlmamelia@gmail.com, ryannsupriatna@gmail.com, andreanhutriniaga@gmail.com, gedcianjur01@gmail.com, kanianurjanah04@gmail.com, putrilathifah3@gmail.com, kevinalamsyah.ka@gmail.com, gumilaryogi17@gmail.com, halidahafnisulisti@gmail.com .

Kata Kunci:
Ablution; Prayer; Religious Education; Religious Character; Elementary School Students.

ABSTRACT

This research aims to improve students' understanding and practice of wudhu and prayer at SD Palasari 3 Bandung through an interactive educational approach. Considering the importance of wudhu and prayer as a means of fostering religious character, this activity employs various creative methods such as videos, live demonstrations, clapping, songs, and educational games. The study was conducted using action research methods, involving third and sixth-grade students as subjects. The results show that the interactive methods effectively enhanced students' understanding and skills in performing wudhu and prayer, as well as instilling discipline, focus, and responsibility. Moreover, the students demonstrated a high level of engagement in learning, particularly through the enjoyable approach. This research confirms that varied and engaging religious education can significantly contribute to the formation of students' religious character.

Kata Kunci:
Wudhu; Shalat; Pendidikan Agama; Karakter Religius; siswa SD.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik tata cara wudhu dan shalat siswa di SD Palasari 3 Bandung melalui pendekatan edukasi interaktif. Mengingat pentingnya wudhu dan shalat sebagai sarana pembentukan karakter religius, kegiatan ini menggunakan berbagai metode kreatif seperti video, demonstrasi langsung, tepukan, lagu, dan permainan edukatif. Penelitian

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan yang melibatkan siswa kelas III dan VI sebagai subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode interaktif berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam melakukan wudhu dan shalat, serta menumbuhkan sikap disiplin, kekhusyukan, dan tanggung jawab. Selain itu, siswa menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelajaran, terutama melalui pendekatan yang menyenangkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama yang variatif dan menarik dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter religius siswa secara signifikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan agama sejak dini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Dalam ajaran Islam, wudhu dan shalat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga sarana pembentukan moralitas, disiplin, dan ketundukan kepada Allah SWT. Praktik wudhu yang benar dan pelaksanaan shalat yang khusyuk memiliki dampak besar dalam membentuk akhlak seorang individu. Ketika wudhu dan shalat dilakukan sesuai tuntunan, maka nilai-nilai religius dan spiritual akan tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam pemahaman dan praktik ibadah ini.

Di SD Palasari 3 Bandung, banyak siswa yang masih belum memahami tata cara wudhu dan shalat dengan benar. Mereka cenderung melakukannya sebatas pemenuhan kewajiban tanpa memperhatikan aspek-aspek penting dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu menjadi perhatian karena jika kebiasaan ini terus berlanjut, kualitas ibadah dan karakter keagamaan mereka dapat terpengaruh, terutama dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks.

Untuk menjawab tantangan ini, perlu dilakukan upaya edukasi yang efektif dan menyenangkan. Kami meyakini bahwa belajar agama tidak harus selalu menjadi sesuatu yang berat dan membosankan. Oleh karena itu, melalui program sosialisasi dan edukasi tata cara wudhu dan shalat ini, kami menghadirkan metode yang inovatif dan sesuai dengan dunia anak-anak. Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi video, demonstrasi langsung, tepukan dan lagu, serta *game* ceria. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan mengamalkan tata cara wudhu dan shalat dengan baik.

Pendekatan yang kreatif dan menyenangkan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami aspek teknis ibadah, tetapi juga menyerap nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Ketika anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, mereka lebih mungkin untuk menginternalisasi ajaran agama

dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan besar dari program ini adalah mampu membentuk karakter religius siswa sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang memiliki akhlak mulia dan kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan benar.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan memiliki karakter religius yang kuat. Edukasi tata cara wudhu dan shalat yang dilakukan dengan metode yang mudah dipahami dan diingat akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembentukan pribadi-pribadi yang berintegritas dan beriman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan *(action research)* dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan praktik siswa dalam tata cara wudhu dan shalat melalui kegiatan edukasi yang interaktif dan menyenangkan. Berikut adalah langkah-langkah dan tahapan penelitian yang digunakan:

1. Lokasi dan Subjek Penelitian: Penelitian dilakukan di SD Palasari 3 Bandung, dengan subjek penelitian siswa kelas III dan VI. Pemilihan kelas ini didasarkan pada usia siswa yang berada pada tahap perkembangan kognitif yang mampu memahami dan mengaplikasikan konsep tata cara wudhu dan shalat.
2. Desain Penelitian: Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang masing-masing meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setiap siklus berfokus pada penerapan metode edukasi yang berbeda, termasuk penggunaan media video, demonstrasi, tepukan dan lagu, serta *game* ceria untuk mengajarkan tata cara wudhu dan shalat.
    - Siklus 1: Sosialisasi awal dan pengenalan materi tata cara wudhu dan shalat melalui media video.
    - Siklus 2: Praktik langsung dan demonstrasi wudhu dan shalat dengan penekanan pada langkah-langkah yang benar.
    - Siklus 3: Pembelajaran melalui lagu, tepukan, dan *game* ceria untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan siswa.

3. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

- Observasi: Dilakukan selama kegiatan edukasi berlangsung untuk mengamati respons siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan, khususnya dalam hal keaktifan, pemahaman, dan kemampuan mereka mempraktikkan wudhu dan shalat.
- Wawancara: Wawancara dilakukan kepada guru agama dan beberapa siswa untuk mengevaluasi dampak metode yang diterapkan serta kesan mereka terhadap kegiatan pembelajaran.
- Tes Praktik: Siswa diminta untuk mempraktikkan wudhu dan shalat sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman dan kemampuan mereka.
- Dokumentasi: Selama pelaksanaan penelitian, dokumentasi berupa foto dan video diambil untuk mendukung observasi dan memberikan gambaran visual mengenai aktivitas yang dilakukan.

4. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

    - Lembar observasi: Untuk mencatat tingkat keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran.
    - Lembar tes praktik: Untuk menilai keterampilan siswa dalam mempraktikkan tata cara wudhu dan shalat sebelum dan sesudah intervensi.
    - Panduan wawancara: Untuk mengeksplorasi pendapat guru dan siswa mengenai efektivitas metode yang diterapkan.

5. Teknik Analisis Data: Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, tes praktik, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis data melibatkan tahapan berikut:
    - Reduksi Data: Merangkum dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian.
    - Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara.
    - Kesimpulan dan Verifikasi: Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data yang kemudian diverifikasi dengan data dari siklus selanjutnya untuk memastikan peningkatan yang diharapkan.

6. Indikator Keberhasilan: Keberhasilan penelitian ini diukur berdasarkan dua indikator utama:
    - Pemahaman dan Praktik yang Meningkat: Siswa menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan kemampuan mempraktikkan tata cara wudhu dan shalat yang benar.
    - Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran: Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan edukasi, terutama dalam metode yang menggunakan media video, demonstrasi, tepukan, lagu, dan game ceria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga siklus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ibadah wudhu dan shalat pada siswa SD Palasari 3 Bandung. Setiap siklus diatur berdasarkan tahapan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari masing-masing siklus:

- Siklus 1 (Sosialisasi melalui Video) Pada siklus pertama, pengenalan tata cara wudhu dan shalat dilakukan melalui pemutaran video. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan penyajian materi yang menggunakan visual dinamis. Namun, meskipun video cukup efektif untuk meningkatkan perhatian siswa, beberapa dari mereka masih belum mampu mempraktikkan tata cara wudhu dan shalat dengan benar. Dari wawancara yang dilakukan kepada guru agama dan siswa, ditemukan bahwa metode audiovisual ini menarik perhatian tetapi masih terbatas dalam meningkatkan pemahaman mendalam. Pada tes praktik yang dilakukan setelah kegiatan, banyak siswa yang masih melakukan kesalahan dalam langkah-langkah wudhu dan gerakan shalat seperti tertinggalnya basuhan di beberapa bagian anggota tubuh dan pelaksanaan shalat yang belum sesuai rukun.

- Siklus 2 (Praktik Langsung dan Demonstrasi) Siklus kedua melibatkan demonstrasi langsung tata cara wudhu dan shalat. Pada tahap ini, siswa diajak mempraktikkan langkah-langkah yang benar dengan bimbingan langsung dari peneliti. Hasil observasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman teknis siswa terkait urutan wudhu dan gerakan shalat. Mereka lebih mudah mengingat urutan langkah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang

sebelumnya muncul pada siklus pertama. Hal tersebut sejalan dengan teori pembelajaran operasional konkret piaget, yang menyebutkan bahwa anak-anak usia 7 hingga 11 tahun berada dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir logis dan sistematis tentang objek-objek yang nyata dan situasi konkret, tetapi mereka masih kesulitan dengan konsep-konsep yang abstrak atau hipotetis (Piaget, J. : 1977). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, metode ini dinilai lebih efektif dalam membentuk pemahaman teknis siswa karena mereka dapat melihat dan mengikuti praktik secara langsung. Sebagian besar siswa menunjukkan kemajuan dalam tes praktik yang dilakukan setelah kegiatan ini, meskipun masih ada sedikit kesalahan seperti urutan langkah dalam shalat yang kurang tepat.

- Siklus 3 (Pembelajaran Interaktif: Lagu, Tepukan, dan Game Ceria) Pada siklus ketiga, metode pembelajaran diubah menjadi lebih interaktif dengan menggunakan tepukan, lagu, dan game edukatif. Keterlibatan siswa dalam kegiatan ini sangat tinggi, dan mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Observasi menunjukkan peningkatan drastis dalam pemahaman dan praktik tata cara wudhu dan shalat. Sebagian besar siswa mampu menghafal urutan wudhu dan shalat dengan benar, dan mereka lebih mudah mengingat langkah-langkah tersebut melalui pendekatan yang menyenangkan. Berdasarkan wawancara dengan guru dan beberapa siswa, metode ini berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus efektif. Dalam tes praktik yang dilakukan setelah siklus ini, lebih banyak siswa mampu mempraktikkan wudhu dan shalat dengan benar tanpa kesalahan berarti.

2. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait tata cara wudhu dan shalat. Pada siklus pertama, metode audiovisual terbukti mampu menarik minat siswa, sesuai dengan teori belajar multimedia yang menekankan pentingnya visualisasi dalam pembelajaran (Mayer,R.E : 2009). Namun, hasil tes praktik menunjukkan bahwa media audiovisual saja tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Hal ini mendukung pendapat bahwa meskipun video dapat memberikan gambaran yang jelas, perlu ada tindakan yang lebih langsung dan konkret untuk memperbaiki pemahaman siswa.

Pada siklus kedua, praktik langsung dan demonstrasi terbukti sangat efektif. Menurut teori pembelajaran aktif, siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka dilibatkan secara langsung dalam aktivitas yang dipelajari (Bonwell, C. C., & Eison, J. A. : 1991). Dengan mempraktikkan wudhu dan shalat secara langsung, siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan umpan balik langsung dari guru. Hal ini sesuai dengan teori Piaget tentang pembelajaran operasional konkret, di mana anak-anak pada usia sekolah dasar belajar paling baik melalui interaksi langsung dengan objek dan aktivitas .

Siklus ketiga, yang menggunakan pendekatan interaktif dengan lagu, tepukan, dan permainan, menghasilkan hasil yang paling efektif. Pendekatan ini tidak hanya menyenangkan bagi siswa, tetapi juga memfasilitasi pengulangan materi secara alami melalui aktivitas fisik dan musik. Menurut teori behaviorisme, pengulangan melalui penguatan positif membantu membentuk kebiasaan dan memperkuat ingatan (Skinner,B.F.1953). Aktivitas menyenangkan ini juga membantu siswa lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai ibadah. Guru yang diwawancarai juga menekankan bahwa metode ini menciptakan suasana belajar yang lebih santai, tetapi tetap efektif dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya variasi dalam metode pembelajaran, terutama untuk topik yang memerlukan pemahaman praktis seperti wudhu dan shalat. Kombinasi antara media audiovisual, demonstrasi langsung, dan pendekatan interaktif mampu menghasilkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Selain meningkatkan pemahaman siswa, metode-metode ini juga membantu membentuk sikap dan perilaku religius siswa sejak dini, sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang menekankan pembentukan karakter islami.

Nilai karakter religius dalam buku Konsep dan Pedoman PPK memiliki beberapa sub nilai yang mencerminkan dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Sub nilai karakter religious meliputi: 1) beriman dan bertaqwa; 2) menjalankan segala perintah-Nya; 3) Religius beribadah; 4) bersih; 5) menjaga lingkungan; 6) memanfaatkan lingkungan dengan bijak; 7) toleransi; 8) saling menolong; 9) saling menghormati; dan 10) perbedaan keyakinan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Dalam penerapannya nilai karakter religius harus mampu

mendorong anak agar dapat terus belajar meningkatkan hubungan yang harmonis kepada Tuhannya, Ciptaan-Nya, manusia, serta alam semesta. Beberapa sub nilai tersebut dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk menanamkan nilai karakter religius sehingga pendidikan bermakna bagi anak dapat tercapai secara optimal.(Rahmawati puji : 2021) Edukasi tatacara wudhu da shalat yang sesuai dengan syariat islam ini merupakan salahsatu upaya guru dalam membentuk karakter religius lewat penguatan sub nilai 1, 2, dan 3 yakni pendisiplinan serta tertib terhadap tatacara beribadah yang mampu menumbuhkan penguatan nilai menjalankan segala perintah-Nya, membentuk karakter yang religious dalam beribadah hingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt.

Pembelajaran tatacara wudhu dan shalat di SD Palasari 3 Bandung memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius siswa. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai wudhu sebagai syarat sah shalat, siswa dilatih untuk disiplin, menjaga kebersihan, dan mematuhi aturan agama sejak dini. Pelaksanaan shalat yang diajarkan secara rutin tidak hanya mengajarkan ketaatan, tetapi juga menanamkan nilai kesabaran, kekhusyukan, dan rasa syukur. Kegiatan ibadah ini menjadi sarana efektif dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, di mana siswa diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersikap jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, termasuk penggunaan media video, demonstrasi langsung, dan pembelajaran interaktif melalui lagu dan permainan, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang tata cara wudhu dan shalat. Metode yang digunakan tidak hanya membantu siswa memahami aspek teknis ibadah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan yang menyenangkan, siswa lebih mudah menginternalisasi ajaran agama, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembentukan karakter religius mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan jurnal ini. Penelitian yang berjudul Edukasi Tata Cara Wudhu dan Shalat sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius Siswa SD

Palasari 3 Bandung dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Sekolah SD Palasari 3 Bandung, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh selama pelaksanaan penelitian ini.
2. Para guru dan staf SD Palasari 3 Bandung, terutama guru agama yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan program edukasi serta memberikan panduan yang berharga dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Siswa-siswa SD Palasari 3 Bandung, yang dengan penuh antusias mengikuti program ini dan menjadi bagian penting dalam proses penelitian.
4. DPL(Dosen Pembimbing Lapangan), yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang berharga dalam penyusunan jurnal ini.

Rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data, serta mendukung keberhasilan penelitian ini.
Tak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan jurnal ini.

Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran agama yang kreatif dan menyenangkan untuk pembentukan karakter religius siswa.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Menekankan pentingnya visualisasi dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman siswa. Lihat: Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.Aqza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Iqtishadia*, *10*(1), 225–245.

Menurut teori ini, keterlibatan langsung dalam aktivitas memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam. Sumber: Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Reports.Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral.

Anak-anak usia SD belajar melalui tindakan dan pengalaman konkret. Lihat: Piaget, J. (1977). The Development of Thought: Equilibration of Cognitive Structures. Viking Press..

Penguatan positif melalui pengulangan membantu dalam pembentukan kebiasaan. Lihat: Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. Macmillan.

Rahmawati, T., & Safitri, N. (2021). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19. DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik, 5(2), 52-63.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peta Jalan Penguatan Pendidikan Karakter (pp. 1–16).

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Peran Agama Islam dalam Mengatasi Masalah Sosial di Masyarakat RW 4 Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk

Dewi Nurdinar[1], Tuti Alawiyah[2], Dra.Hj. Mukhlishah, M.Ag. [3], Iqlima Amelia[4], Riyan Supriatna[5], Andfrean Hutri Niaga[6], Abdul Majid[7], Kania Nurjanah[8], Putri Lathifa Halis[9], Kevin Alamsyah[10], Yogi Gumilar[11], Halida Hafni Sulisti[12]

[1,2,3,6] Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[4] Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[5] Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[7,11] Manajemen,
[8,9,10,] Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
[12] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*email: dewinurdinar19@gmail.com, alawiyahtuti424@gmail.com, mukhlishah@umbandung.ac.id, qlmamelia@gmail.com, ryannsupriatna@gmail.com, andreanhutriniaga@gmail.com, gedcianjur01@gmail.com, kanianurjanah04@gmail.com, putrilathifah3@gmail.com, kevinalamsyah.ka@gmail.com, gumilaryogi17@gmail.com, halidahafnisulisti@gmail.com .

Kata Kunci:
Islamic religion; Social Problems; Society; Empowerment; Sukasari Village.

ABSTRACT

Social issues such as poverty, injustice, and moral degradation are common problems in rural communities, including in Sukasari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. Islam, as a source of values and norms, plays a significant role in providing solutions to these issues. This study aims to understand the role of Islam in addressing social problems in Sukasari Village, both through spiritual approaches and socio-economic empowerment based on Islamic teachings. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through observations, interviews with religious leaders, and documentation. The results show that Islamic teachings serve as a vital foundation in enhancing social solidarity, strengthening family institutions, and driving community-based economic initiatives.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Agama Islam; Masalah Sosial; Masyarakat; Pemberdayaan; Desa Sukasari.*

Masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan degradasi moral merupakan isu yang sering terjadi di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Agama Islam sebagai sumber nilai dan norma memiliki peran penting dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran agama Islam dalam mengatasi masalah sosial di Desa Sukasari, baik melalui pendekatan spiritual maupun pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis ajaran Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menjadi landasan penting dalam meningkatkan solidaritas sosial, memperkuat institusi keluarga, serta menggerakkan inisiatif ekonomi berbasis komunitas.

PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat dan sering kali berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Desa Sukasari di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, tidak lepas dari tantangan-tantangan ini, termasuk kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan masalah moralitas di kalangan generasi muda. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan nilai-nilai dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut.

Pendekatan agama dalam menyelesaikan masalah sosial tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan etika, ekonomi, dan pendidikan. Melalui ajaran Al-Quran dan Hadits, Islam mengajarkan konsep solidaritas, keadilan sosial, serta pemberdayaan individu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ajaran Islam diaplikasikan dalam konteks masyarakat Desa Sukasari untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mereka hadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sukasari, terutama tokoh agama, kepala desa, dan warga yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, serta kajian literatur yang relevan.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk:

- Tokoh Agama: Untuk mendapatkan pandangan tentang peran ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.
- Pemerintah Desa: Untuk memahami kebijakan desa yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial.
- Warga: Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang efektivitas ajaran agama dalam mengatasi masalah sosial yang mereka alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran Agama dalam Memperkuat Solidaritas Sosial

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan) dan gotong-royong dalam masyarakat. Di Desa Sukasari, konsep ini diterapkan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, kerja bakti, dan sedekah kolektif yang melibatkan seluruh warga. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antarwarga tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi mereka yang kurang mampu.

Misalnya, di masa panen, sebagian hasil pertanian disumbangkan ke masjid dan dibagikan kepada keluarga kurang mampu. Selain itu, terdapat program bantuan ekonomi berbasis zakat dan infaq yang dikelola oleh lembaga keagamaan desa, yang secara signifikan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

2. Penguatan Institusi Keluarga melalui Pendidikan Agama

Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter individu. Di Desa Sukasari, pendidikan agama mulai diberikan sejak dini melalui kegiatan keagamaan di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan pengajian anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hafalan Al-Quran tetapi juga pada pembentukan akhlak dan etika Islam.

Keluarga-keluarga di desa ini sering mengikuti majelis taklim dan bimbingan keluarga yang diselenggarakan oleh tokoh agama setempat. Ini membantu mengatasi masalah-masalah moral seperti kenakalan remaja dan degradasi moral yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama juga diterapkan di Desa Sukasari melalui berbagai inisiatif ekonomi berbasis komunitas. Salah satu contohnya adalah program koperasi berbasis syariah yang dikelola oleh masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga melalui akses modal yang lebih mudah dan adil.

Selain itu, kegiatan wiraswasta yang didorong oleh ajaran Islam tentang bekerja keras dan halal juga semakin marak. Warga mulai memanfaatkan lahan pertanian dan peternakan secara lebih produktif dengan bantuan program-program desa yang berbasis pada ajaran Islam tentang keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap alam.

KESIMPULAN

Agama Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial di Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual, tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui penguatan solidaritas sosial, pendidikan keluarga berbasis agama, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, agama Islam telah membantu masyarakat Desa Sukasari mengatasi masalah-masalah sosial yang mereka hadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan jurnal ini. Penelitian yang berjudul Peran Agama Islam dalam Mengatasi Masalah Sosial di Masyarakat RW 4 Desa Sukasari,

Kecamatan Pameungpeuk dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Desa Sukasari Kec.Pameungpeuk Kab.Bandung, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh selama pelaksanaan penelitian ini.
2. Ketua Rw 04 Desa Sukasari Kecamtan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, terutama guru agama yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan program edukasi serta memberikan panduan yang berharga dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Masyarakat setempat Rw 04 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, yang dengan penuh antusias mengikuti program ini dan menjadi bagian penting dalam proses penelitian.
4. DPL(Dosen Pembimbing Lapangan), yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang berharga dalam penyusunan jurnal ini.

Rekan-rekan peneliti yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data, serta mendukung keberhasilan penelitian ini.
Tak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan jurnal ini.

Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran agama yang kreatif dan menyenangkan untuk pembentukan karakter religius siswa.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2015). Peran Agama dalam Menangani Masalah Sosial: Perspektif Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Badawi, Z. (2003). Islamic Teachings and Social Justice. Cambridge: Islamic Foundation.

Hasan, U. (2020). Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Bandung: Al-Bayan Press.

Nasir, F. (2016). Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan. Surabaya: Mandiri Publishing.

Shihab, M. Q. (2002). Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Lentera Hati.

Zulkifli, A. (2019). Agama dan Masalah Sosial: Kajian Teori dan Aplikasi. Malang: UIN Malang Press.

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Modernisasi Sebagai Pergeseran Akhlak Dan Identitas Manusia Modren

Muhammad Danil[1], **Amri Effendi**[2], **Jamalludin Mak'ruf**[3], **Syukri Iska**[4]
[1] Stain Mandailing Natal, Indonesia
[2,3,4] UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
email: mdanil@stain-madina.ac.id

Kata Kunci:
Morals; Modernization, Modern Humans.

ABSTRACT

Morals in the context of modernization are very rarely discussed, because of the preoccupation with technological progress that humans feel they no longer need to relate to each other, even to the relationship with God. The more modern times, the more people are aware of the importance of morals. Because they can meet all of this with its criticality towards the basis of everything, but that is precisely what is missing. In fact, if we look closely, morals are an urgent matter in modernization, because apart from being a form of bond between brothers and sisters who have been torn apart by technological advances. Morals are also the answer to the emptiness and aridity of human hearts today. This research reveals that a heterogeneous society is a realm of morals that is of high value, because humans no longer gather from just one community or race. Modernization is also characterized by high social mobility and should be a means of spreading morals in human life who continue to look for new places to live. Individualism is a characteristic of the weakness of modernist society because the best human defense in competing with sophisticated technology is a strong colony.

Kata Kunci:
Akhlak Modernisasi, Manusia Modern.

ABSTRAK

Akhlak dalam kontek modernisasi sudah sangat jarang menjadi pembahasan, karena kesibukan terhadap kemajuan teknologi sehingga manusia merasa tidak butuh lagi bagaimana berhubunggan dengan sesamanya bahkan sampai hubungan dengan tuhan. Seharusnya semakin modren zaman, makin sadar manusia pentingnya akhlak. Karena semua itu bisa mereka temui dengan kekritisannya terhadap dasar segala sesuatu, tapi justru itu yang hilang. Padahal kalau kita cermati akhlak adalah hal yang urgen dalam dalam modernisasi, karena selain sebagai pembentuk ikatan saudara yang telah tercerabut oleh kemajuan teknologi. Akhlak juga sebagai penjawab atas kehampaan dan kegersangan hati manusia sekarang ini.

Penelitian ini mengungkapkan Masyarakat heterogen merupakan ranah akhlak yang bernilai tinggi, karena manusia tidak lagi berkumpul dari satu komonitas atau ras saja. Modernisasi juga ditandai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seharusnya menjadi alat penyebaran akhlak dalam kehidupanan manusia yang terus mencari tempat yang baru untuk ditinggali. Individualis merupakan corak tersendiri dari kelemahan masyarakan modernis karena pertahan manusia terbaik dalam bersaing dengan teknologi yang serbah canggih adalah koloni yang kuat.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang cepat sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari penggaruh perkembangan pengetahuan pesat. Karena pengetahuan merupakan kunci dari setiap perubahan.[1] Dampak dari perkembangan pengetahuan yang pesat sekarang ini telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Bahkan akibat yang sangat terasa bagi kita hari ini adalah bahwa hidup itu terasa begitu instan sebab apapun sekarang yang ingin kita dapatkan bisa diselesaikan dengan satu klikkan pada android kita. Demikian juga dengan yang ingin diketahui cuma tingal masuk pada akun pencarian digoogle, hampir semuanya bisa didapatkan.

Namun di sisi lain, perkembangan pengetahuan yang menjadikan zaman pada serba instan, menyebabkan putus rantai saling ketergantungan sesama manusia dalam hal interaksi. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap akhlak atau etika yang harus diterapkan dalam hubungan sesama manusia.[2] Seharusnya berbanding lurus antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan perkembangan akhlak atau etika. Sebab salah satu fungsi ilmu adalah sebagai alat untuk membagun kehidupan manusia.[3]

Hubungan antara pengetahuan dan kehidupan menurut Ibnu Maskawaih dapat terlihat dengan kebahagian hidup sebab apabila seseorang mampu melahirkan kebahagian moral dengan memenuhi apa yang telah menjadi sifat

[1] Mirhamida Rahmah et al., PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN, *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 2 (2023), https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4326.

[2] dan Maulida Hasanah, Nasruddin, "Akhlak Dalam Kehidupan Ibnu Maskawaih," *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)* 3, no. 1 (2019).

[3] Muhammad Nasir, "Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia," *Syntax Idea* 3, no. 11 (2021), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i11.1571.

jiwa yang salah satunya adalah ilmu. Jadi beliau meletakan bahwa tidak ada kebahagian tanpa adanya pengetahuan.[4]

Namun realitas terjadi sebaliknya, dimana pengetahuan hanya mampu memberikan perkembangan yang begitu maju pada kebutuhan lahir tidak pada batin manusia yaitu permasalahan akhlak atau etika dalam hubunggan manusia, keadaan inilah yang menyebabkan penelitian ini menarik untuk dibahas lagi.

Akhlak

Akhlak merupakan hal yang penting dalam hubungan manusia, baik itu dengan sesama manusia atau dengan Allah. Karena posisi akhlak adalah sebagai penentu nilai diri manusia itu sendiri di lingkaran sesama manusia dan dihadapan Allah.

Posisi akhlak dalam hubungan sesama manusia adalah sebagai sarana untuk membangun persaudaraan dan saling kepedulian. Sedangkan dengan Allah merupakan prasarana peningkatan keimanan untuk menuju takwa. Kata akhlak ini kalau kita terusuri berasal dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku, atau tabiat.[5] Khuluk ini merupakan perangai yang berada dalam batin manusia yang akan melahirkan wujud pebuatannya. Khuluk dalam bahasa Yunani disandingakan dengan *ethios* atau *ethos* yang berarti adab kebiasaan, perasaan, kecendrungan hati terhadap perbuatan, kata *ethicos* inilah yang berubah menjadi etika.[6]

Terkait akhlak ini sebagian ulama mendefinisikannya sebagai berikut;

Imam al Ghazali mengatakan Akhlak berkaitan dengan kata al-khalqu (kejadian) dan al-khuluqu (akhlak) atau tingkah laku. Imam Al Ghazali mengambarkan bahwa akhlak merupakan kebaikan yang timbul dari keadaan jasmani dan rohani.[7] Pandangan beliau ini menempatkan bahwa harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani sehingga bisa menghasilkan akhlak

[4] Khasan Bisri, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*, 2021.

[5] Opik Jamaludin, "Peran Pesantren Salafi Dalam Peningkatan Kualitas Akhlak Santri," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i1.38.

[6] anny fuadaty, MAKALAH AGAMA ISLAM-Anny, *Makalah Agama Islam*, 2020.

[7] Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-Din* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005).

yang baik. Artinya disini tidak mungkin dalam jasmani yang tidak baik bisa bersemanyam rohani yang baik karena sifat keduanya adalah saling control.

Sedangkan Abdul Hamid mengatakan akhlak merupakan ilmu yang keutamaan untuk diterapkan sehingga jiwa menjadi terisi dan dapat terhindar dari keburukan. Sebab ukuran baik buruknya perangai tergantung atas apa yang dipraktekan.[8] Akhlak ini merupakan satu keadaan yang berada di jiwa seorang sebagai pemicu perbuatan lahinya secara spontan.[9] Perbuatan inilah nanti sebagai gambaran baik atau buruknya akhlak seseorang. Jika perbuatan yang keluar suatu kebaikan maka akhlaknya dikatakan baik dan begitu juga sebaliknya jika perbuatan yang keluar merupakan perbuatan buruk maka disebut akhlak buruk.

Dikalangan masyarakat umum, akhlak ini sering sekali disebut dengan perangai, etika, dan ada juga yang menyebut dengan moral. Kalau kita lihat sekilas tentang sejarah etika ini. Murid pytagoras pantas mendapat penghormatan karena kajian masalah etika ini muncul dilingkaran mereka dengan tradisi yang diteruskan selama 200 tahun. Mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip matematika merupakan prinsip dari semua realitas.[10]

Ajaran reinkarnasi yang mereka anut menempatkan bahwa badan adalah kuburan jiwa. Sehingga supaya jiwa tersebut bisa lepas dari badan itu sendiri maka manusia sebagai pemiliknya harus menempuh jalan pembersihan melalui bekerja dan bertapa rohani.

Demokritos tahun 460 yang merupakan seorang filsuf tidak hanya mengajarkan tentang atom bahkan dia juga mengajarkan tentang yang enak dan baik sehingga anjuran untuk hidup baik itu sendiri merupakan bagian dari pengertian hedonistik.

Penyebaran etika ini yang terus menyebar sampai sekarang dengan berbagai variasinya. Namun dalam kalangan masyarakat umum penyebutan akhlak dan etika hampir disamakan. Penyamaan ini sebenarnya hal wajar jika

[8] Ira Suryani and Wahyu Sakban, Aplikasi Akhlak Manusia Terhadap Dirinya, Allah SWT., Dan Rasulullah SAW, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022).

[9] Nisrokha, Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih,*Jurnal Madaniyah* 1 (2016).

[10] Mathilda Susanti, "Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Matematika Sekolah," *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika Uny 2015*, 2015.

dalam masyarakat umum, karena dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka terkait akhlak tadi. Sebab mereka cuma mengolongkan bahwa yang dinilai dari manusia itu cuma merupakan satu kesatuan saja tanpa melihat sumber argumentasi atau landasan perbuatan tersebut.

Padahal kalau kita kaji lagi, akan terlihat bahwa akhlak berlandaskan kepada wahyu sedangkan etika berlandaskan rasional manusia. Sedangkan moral lebih kepada perbuatan yang sedang dinilai dan nilai ini sendiri yang disebut etika tersebut. Hambah Yaqub mengambarkan bahwa moral adalah ide umum tentang tindakan manusia terkait yang baik dan wajar.[11]

Namun, dari sisi kajian filsafat jika kita gali lagi akan kita temui bahwa ada beberapa macam etika; pertama, etika sebagai ilmu tingkah laku, prinsip yang diselesi tentang moral yang betul; kedua, etika merupakan tiori tindakan yaitu penetapan beserta tujuan yang menuju makna tindakan; ketiga, ilmu tentang filsafat moral yang berbicara terkait nilai.[12]

Tidak tentang sifat manusia tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif; ilmu tentang moral/prinsip kaidah-kaidah tentang tindakan dan kelakuan.

Uraian di atas mejelaskan kepada kita bahwa etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan pengertian amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.[13]

Dalam pergaulan kehidupan manusia sehari-hari, dikalangan masyarakat tradisional atau kampung/desa lebih banyak menyebutnya dengan perangai. Perangai inilah yang menjadi patokan terhadap nilai seseorang dilingkungan sosialnya.

Terkait Akhlak, Islam telah mengambarkan melalui firman-Nya yang dibawakan oleh Rasulullah dalam surat al Ahzab ayat 21;

---

[11] Alwan dkk. Khoiri., *Akhlak/ Tasawuf* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan kalijaga, 2005).

[12] Imron Mustofa, Gagasan Islamisasi Ilmu: Studi Tentang Kerangka Metodologi Insitute for The Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)),*Disertasi*, 2018.

[13] Mustofa.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

"Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang menghadap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah."[14]

Dalam surat al Qalam ayat 4;

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"... dan sesungguhnya engkau (muhammad) benar-benar berbudipekerti yang agung".[15]

Ayat ini dengan jelas bahwa tauladan dalam akhlak terhadap semua aspek kehidupan telah ada pada diri Rasulullah. Jadi kita sebenarnya tingga mencontohnya lagi apa yang telah dipratekan Rasulullah yang sekarang terdapat dalam hadis beliau.

Sedangkan dalam kitab Fiqhul Akhlak 1/7 yang ditulis Mushthofa al Adawi menyebutkan bahwa telah terhimpundalam dalam diri Rasulullah sifat terpuji. Akhlak inilah yang menjadi indicator apakah seseorang itu baik atau buruk sebab akhlak merupakan buah dari Aqidah dan syariah yang benar.

Sedangkan aqidah itu sendiri dibangun oleh akhlak kita kepada Allah. Kebaikan akhlak kita terhadap Allah menetukan baiknya aqidah kita. Secara mendasar, jika akhlak ini kita lihat hubunganya dengan kejadian manusia, maka kita dapatilah bahwa ada hubungan kuat terkait hubungan khalik dan makhluk. Sehingga uraian di atas mengabarkan betapa pentingnya akhlak terkait hubungan kita dengan Allah dan manusia.

Modernisasi

Modernisasi merupakan zaman yang penuh dengan kemajuan, dan hampir setiap bagian dari dunia ini mengalaminya. Yang membedakan nanti hanya perkara siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Modernisasi yang menurut para teoritisi dimulai tahun 1950-an dan 1960-an dapat dilihat dalam

[14] Kementrian Agama RI, *Al Quran* (Jakarta Timur: Kemenag, 2023).
[15] Kementrian Agama RI.

tiga kategori: historis, secara historis modernisasi sama dengan westernisasi. Pada kategori ini, cita-cita atau impian masyarakat dijadikan model yang akan terus bergerak dalam modernisasi. Kategori relatif, adanya penyamaan standar modern menurut masyarakat dan penguasa. Sedangkan dalam kategori analisis, upaya penanaman paham pada masyarakat tradisional paham masyarakat modren.[16]

Modernisasi ini dapat dipahami sebagai suatu proses pergerakan dalam suatu arah ke arah yang lebih maju, tujuanya supaya terciptanya perubahan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Modernisasi yang merupakan pergeseran secara menyeluruh dari posisi tradisional ke pramodren yang didalamnya teknologi dan organisasi mengarah pada ekonomi dan politik yang menjadi cirikhas negara yang stabil.[17] Modernisasi yang berasal dari kata Modren yang berarti baru dan mutakhir, sikap dan cara berfikir harus sesuai tuntutan zaman sehingga dapat diartikan maju.[18] Sedangkan ketika kata ini menjadi modernisasi yang berarti baru atau model baru. Sehingga modernisasi merupakan sikap dan mental yang mampu menyesuaikan diri dengan masa kini.[19]

Daniel Lerner pernah mengatakan bahwa modernisasi merupakan sebuah istilah baru untuk satu proses panjang perubahan sosial dari masyarakat kurang berkembang menjadi masyarakat lebih berkembang.[20] Sedangkan J M School mengatakan bahwa teori terkait modernisasi ini lahir seiring dengan perang dinggin yang merupakan perkumpulan perang ideology antara teori kapitalis dan sosialis. Sosialis di komandoi oleh Rusia yang melebarkan sayap pada Eropa Timur dan negara baru merdeka.[21]

---

[16] Piotr. Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Terjemahan Dari The Sociology Of Social Change* (Jakarta: Prenada Media., 2004).

[17] Mengyao Xia et al., Coupling Coordination and Spatiotemporal Dynamic Evolution between Agricultural Carbon Emissions and Agricultural Modernization in China 20102020, *Agriculture (Switzerland)* 12, no. 11 (2022), https://doi.org/10.3390/agriculture12111809.

[18] Rahma Satya Masna Hatuwe et al., Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru,*Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 1 (2021).

[19] Ellya Rosana, MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, *MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL* 10 (2015).

[20] Rosana.

[21] Ferry Setiawan, Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 2 (2019).

Ideologi yang muncul dari gagasan dalam perjalanan perubahan sosial yang melahirkan pembangunan-pembanguan di berbagai aspek, dan di aspek lain ideologi tersebut melahirkan teori modernisasi. Perubahan perubahan ii bisa bertahan sebab ada suplai dana dan dukungan politik yang besar dari pemerintah dan organisasi swasta. Sehinggga dukungan amerika dan eropa dari segi pemerintah yang berpaham liberal sangat memberikan dampak besar.

Semua yang terlibat dalam modernisasi dan pembanguan ini yang melahirkan gerakan ilmuan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial yang lebih focus kajiannya pada perubahan sosial. Sehingga hukum alam tentang sebab akibat tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap sebab melahirkan akibat, modernisasi melahirkan industry maju namun disatu sisi melahirkan aliran pemikiran baru yang mengarah pada terbentuknya ideologi.

Dampak modernisasi ini sangat terasa bagi dunia ketiga, dimana tidak hanya meliputi kalangan akademisi diperguruan tinggi saja tetapi juga kalangan biokrasi yang mengemban tugas sebagai pembuat rencana dan pelaksana pembangunan. Sisi lain yang juga terkena dampak modernisasi adalah pemikiran keagamaan serta lembaga pendidikan keagamaan. Tidak Cuma sampai disitu bahkan organisasi non pemerintahpun tak sangup membatasi dirinya dari dampak modernisasi ini.

Perkembangan modernisasi ini merambah pada nilai dan norma yang hidup ditengah masyarakat. Proses yang cepat berdampak pad disorganisasi yang disebabkan ketidak siapan masyarakat mengahapi perubahan yang cepat. Keadaan ini yang akhirnya melepaskan masyarakat dari unsur-unsur nilai yang harus mereka pertahankan.

Gerakan sosial yang menempatkan modernisasi sebagai gerakan yang bersifat revolusioner dan kpmplek, mengembang melalui berbagai cara dan disiplin yang sistematik. Menjadi gerakan global yang mempengaruhi semua elemen pergerakan masyarakat. Proses yang bertahap dan cepat ini bertujuan untuk suatu homogenisasi yang bersifat progesif.

Kalau kita telisik dari syaratnya, modernisasi memiliki syarat-syarat sebagai berikut.[22]

a. Berfikir ilmiah dalam kelas penguasa dan masyrakat.
b. Administrasi yang baik dalam biokrasi pemerintahan
c. Berlakunya satu titik kumpul data yang teratur sehingga membutuhkan penelitian yang berlanjut dan terukur.
d. Melahirkan Iklim Favoureble masyarakat terhadap modernisasi melalui pengunaan alat komunikasi massa yang harus dilakukan tahap pertahap sebab berhubungan dengan kepercayaan masyarakat.
e. Sikap disiplin organisasi yang tinggi diliain pihak menguraggi kemerdekaan.
f. Terbentuknya sentralisasi wewenang pada perencanaan sosial yang berdampak pada kepentingan kepentingan.

Terpenuhinya syarat ini menentukan kualitas modernisasi tersebut nantinya, apakah modernisasi itu tergolongan sepurna atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi yang bergitu pesat perkembanganya dengan lahirnya penemuan-penemuan cangih dan terbarukan. Di respon oleh kalangan intelektual dengan lahirnya teori modernisasi yang mengiginkan perubahan ke arah yang lebih baik ditahun 1950-an. Respon kaum intelektual ini adalah sebagai bentuk ketidak sepakatan dengan perang dunia yang dianut kaum evolusi sebagai jalan optimis menuju perubahan. Karena dalam sejarahnya perang yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian tidak pernah terwujut jusruh memperpanjang kehancuran yang memberikan dampak siknifikan pada kehidupan manusia.[23]

Perkembangan pegetahuan manusia di zaman modren dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus diperbarui. Perbaruan teknologi ini bertujan untuk meringankan beban pekerjaan manusia sehingga ketika teknologi itu telah tercipta, hampir semua pekerjaan manusia dibantu oleh teknologi.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, hampir tidak ada kita temukan manusia yang tidak dibantu oleh mesin dan teknologi lain yang semakin hari

[22] Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985).

[23] Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Terjemahan Dari The Sociology Of Social Change.*

semakin canggih. Keberhasilan teknologi memberi keringan terhadap kehendak manusia memang merupakan pencapaian yang pantas diacungkan jempol. Namun, kemajuan teknologi tersebut secara lansung memutus rantai hubungan antar sesama manusia. Sehingga manusia yang semakin bisa memanfaakan teknologi untuk keperluan hidupnya terindekasi semakin tingginya tingkat idividualisnya dalam pergaulan masyarakat.

Tingkat kemajuan teknologi di zaman modernisasi ini tidak main-main lonjakannya. Di mana sekarang manusia telah mampu menciptakan teknologi intelejensi yang semakin hari semakin menyerupai kemampuan intelejensi manusia. Padahal dahulu, intelejensi dipredisi cuma kemampuan manusia saja tetapi argumen itu sekarang telah dipatahkan.

Contoh kecangihan teknologi dibidang kedokteraan begitu banyak seperti; dari segi alat operasi. Dahulu operasi cuma bisa dilakukan melalui alat-alat bedah yang besar atau kasar yang pegunaanya dibantu lansung oleh tangan manusia. Tapi sekarang ini, kita tidak terkejut melihat bahwa computer yang telah terprogram mampu melakukannya sendiri dengan kecepatan yang tak sanggup manusia lakukan dan tingkat resiko yang diminimalisir menjadi lebih kecil. Sedangkan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yang dahulu cuma bisa dijembatan oleh tulisan diatas kertas, sekarang sudah bisa dengan gatget ditangan yang tidak membutukan banyak ruang dan kabel sambungan. Bahkan semakin cangihnya kita dapat mengendalikan gatget tersebut melalui cip yang dibenakan pada bagian badan kita. Jadi sekarang kalau kita pikirkan betul memang cuma nyawa atau roh yang belum bisa ditemukan manusia.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini mengarah pada dua model yaitu; -rekayasa genetic, biologi quantum dan teknologi nano. Gagasan yang dibumingkan oleh ray kurweil dengan keyakinan bahwa tahun 2045 akan tercapai titik singularitas yang mengantarkan kehidupan manusia pada kehidupan yang abadi yang dia tulis dalam bukunya The Singularity Is Near.

Dalam perjalanan kemajuan zaman modernisasi ini sangat memberikan dakpak positik dalam bidang teknologi. Namun, jika menegok dalam bidang akhlak, etika atau perangai masyarakat sekarang ini sungguh memprihatinkan. Sehingga boleh dibilang bahwa modernisasi berdampak buruk pada akhlak masyarakat.

Dampak buruk dari modernisasi memang tidak bisa diklaim berlaku menyeluruh karena masih ada sisi lain dari negeri ini yang masyarakatnya

mempertahankan akhlak, etika dalam pergaulan sehari hari kehidupanya tapi itu bisa dibilang sebagian kecil.

Kemudahan kita mengakses semua berita hari ini memperlihatkan bahwa begitu telah banyak hilang akhlak, etika yang baik dalam pergaulan hidup kita sesama manusia. Baik itu dilingkungan umum maupun dilinkungan keluarga kecil kita.

Lihat media sosial hampir tiap menit memberitakan lewat android yang ada dalam genggaman kita tidakan pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian bahkan sampai pada tindakan criminal. Dan semakin anehnya lagi pelakunya tidak cuma orang yang tidak berpengetahuan tetapi justru orang yang bisa dibilang mumpuni dalam memahami masyarah akhlak dan etika dari tingkat pedidikan mereka. Pelecehan, ujaran kebencian dan kriminalitas tidak saja diperbuat oleh orang orang yang bida dibilang awam terkait perbuatannya namun juga orang yang bisa dibilang ahli dibidang itu justru melakukannya, seperti mahasiswa, guru, ahli hukum dan penegak hukum serta abdi nega. Kalau kita pikirkan lebih dalam, kurang tau apalagi mereka tentang akhlak dan etika yang baik dan mana yang buruk, tapi justru kenyataan berbicara seperti itu.

Jika dulu kita pembunuhan hanya terjadi dalam keadaan perang yang dominan tapi sekarang tidak lagi. Bahkan sekarang kita sudah biasa mendengar anak membutuh ibunya atau bapaknya atau sebaliknya. Kita juga menemukan fenomena yang lumrah menemukan bayi-bayi yang dibuang begitu saja oleh orang tuanya.

Sedangkan dikalangan yang lebih terhormat lagi, tidak henti hentinya kita mendegar dan melihat dalam berita baik di media sosia atau di televise bahwa para penjabat melakukan korupsi, mereka memperkaya diri mereka sendiri dengan menggambil hak yang seharusnya menjadi milik rakyak padahal dia sendiri digaji dari uang ranyat itu sendiri. Para penegak hukum yang seharusnya jadi pelindung bagi ranyat justru sebaliknya yang terjadi.

Jadi tingkat kemerosotan akhlak ini tidak cuma diranah perkataan atau sikap semata tetapi telah jauh pada ranah perbuatan yang memandang manusia lain bukan lagi makluk yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan sehingga kematianya bukan lagi sesuatu yang beharga.

Jika kita cermati lebih jauh terkait sebagian ciri modernisasi, antara lain;

Masyarakat Heterogen

Masyarakat heterogen merupakan salah satu tanda dari modernisasi. Bahwa percampuran yang begitu banyak terjadi dalam komoditas masyarakat yang berasal dari berbagai macam adat dan budaya bahkan perbedaan agama.

Namun seharusnya perbedaan ini tidak diangap menjadi hal baru dan harus ditempuh dengan menutup diri dalam pergaulan bermasyarakat. Karena Allah sendiri juga telah memberitahukan dalam al-Hujarat:13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[24]

Ayat ini sebagai bukti bahwa masyarakat heterogen itu sudah dijanjikan Allah dalam penciptaanya, sehingga masyarakat modernisasi yang lebih memiliki ciri berfikir kritis dan ilmiah dapat menemukan dan mempercayaai. Sehingga masyarakat yang heterogen itu bukan dianggap hal yang baru dan harus menjadi sebab perpecahan namun menjadi sarana memperluas persaudaraan.

Supaya terciptanya kondisi masyarakat heterogen yang baik ini seharusnya dihiyasi oleh akhlak atau etika yang baik karena dengan akhlaklah perbedaan yang begitu banyak itu bisa disatukan untuk mencapai tujuan yang sama dalam ikatan persaudaraan.

Namun realitas hari ini, justru keheterogenan ini jauh dari akhlak tersebut. Sehingga wajarlah bahwa kekacuan dan ketidak sepahaman yang berujung pada pertengkaran terjadi di mana-mana.

Mobilitas Masyarakat Tinggi

Pada masyarakat yang hidup dizaman modernisasi ini, keterbukaan masyarakat antara yang datang dan yang pergi sangan tinggi. Maka wadah pertukaran sikappun terbuka lebar.

Namun yang anehnya sekarang, persepsi bahwa masyarakat desa atau kampuang memiliki akhlak atau etika lebih baik dan saling menghormati hilang

[24] Kementrian Agama RI, *Al Quran*.

ketika mereka beralih tempat ke kota, sehingga sifat yang baiknya seharusnya memberikan pengaruh kepada masyarakat yang didatangginya namun justru dia sendiri yang terpengaruh.

Ini membuktikan bahwa benteng pertahanan akhlak yang lemah adalah cikal bakal tersesatnya manusia. Karena jika seseorang memiliki benteng akhlak yang kuat maka dimanapun dia berada pastilah dia memberi pengaruh yang baik terhadap lingkunganya bukan justru dipengaruhi oleh wadahnya yang baru.

Seperti pesan Rasul Rasulullah kepada Abu Dzar al-Ghifari dan Muadz bin Jabal untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapusnya. Dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak yang baik.[25]

Jadi perintah untuk mempertahankan kebaikan itu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan kenyataan yang ada mengindikan bahwa adanya sesuatu sikap atau kebiasaan yang dilepaskan oleh masyarakat yang semula berprilaku baik namun ketika sampai ditempat yang baru dia meninggalkan kebiasaan baik yang lamanya.

Kebiasaan lama tersebut adalah kebiasaan yang membagun hubunganya dengan Allah. Karena kalau kita lihat dari segi agama Islam, akhlak adalah jantung dari Islam itu sendiri. Dan akhlak ini meliputi akhlak anatara manusia dengan tuhanya dan dengan sesamanya yang sifatnya saling berkaitan. Jika rusak satu maka akan rusaklah yang lain. Karena akhlak yang terjalin dalam hubungan hamba dengan tuhan menegasikan berbagai akhlak yang buruk. Seperti tamak dan rakus, membiarkan orang yang lemah dan berkhianat.

Hal sebalik jika kita megutamakan Akhlak makan setiap kebajikan akan memberi dampak pada kesempurnaan imam. Kesempurnaan iman ini muncul ketikan rukun iman sudah tuntas pelaksanaannya dan rukun islampun sudah terpenuhi. Ketuntasan akan rukun iman dan islam ini merupakan kombinasi antara iman, islam, ihsan.

Jadi jika hubungan seseorang dengan tuhanya tidak dilepaskanya ketika dia menjalin hubungan yang baru dengan masyarakat yang baru, maka akhlak baiknya akan tetap bertahan. Mungkin akhlak yang baik jika diwujudkan akan butuh model baru dalam penyesuai tempatnya, tapi tanpa kehilangan esensi dari

[25] Drs. Mochammad Asrukin M.Si, Hadist, *Tinjauan Pustaka*, 2012.

kebaikan tersebut. Namun terkait akhlaknya dengan tuhan tetap memiliki model yang sama.

Tindakan Manusia Rasional

Rasional memberikan efek tersendiri pada manusia modren berupa timbul daya pacu situasi mekanistis yang telah diciptakan sendiri sehingga manusia kehilangan kesempatan untuk merenunggi ayat Allah dan makna hidup. Di sisi lain dari efek rasional modren ini mengantarkan kontak langsung sesame manusia sebab digusur oleh kemajuan teknologi yang mengantarkan manusia pada sikap egoistik.

Tidak cuma sesama manusia, kontak dengan alampun menghilang sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan di mana-mana sehingga menjadi masalah serius dalam kehidupan modren. Hal ini menyebabkan manusia kehilangan tujuan hidup sehingga manusia berujung pada kehilangan segala galanya. Kemodrenan juga mengantarkan manusia pada pergesekan nilai dan benturan budaya yang tidak mungkin dielakan sebab sudah menjadi hukum alam perubahan gaya hidup komunitas akan melahirkan budaya baru.

Keadaan ini juga membentuk pola hidup santai yang diwariskan dari masyarakat agraris menjadi sangat disiplin pada masyarakat industry yang tenaganya serba mesin. Disisi lain terjadi juga pada wanita yang sebelumnya dijaga oleh keluarga dan sekarang pada posisi sebebas bebasnya dengan bantuan teknologi. Padahal jika tetap mempertahankan aturan allah maka nilai sebuah kehidupan akan terjaga namun yang terjadi justru sebaliknya ketika manusia meninggalkannya.

Sisi lain dari semakin rasional suatu masyarakat maka pertanda semakin bagus modernisasinya. Tapi jika rasionalitas itu sendiri tidak untuk membangun hubungan yang baik terhadap sesama. Maka semuanya dianggap sia-sia.

Karena semakin rasional seseorang dalam menilai sesuatu, akan berdampak baik pada tingkat akhlaknya. Sebab akhlak itu sendiri merupakan sesuatu yang harus diterima oleh akal manusia bukan cuma termasuk perkara yang mistik. Seperti bahwa semua manusia mendambakan hubungan yang baik untuk membagun kebahagian dirinya sangat rasional untuk berbuat baik terhadap orang lain.

Efek dalam membangun hubungan sudah pasti hubungan sebab-akibat berlaku. Maksudnya jangan melakukan sesuatu pada orang lain yang diri kita sendiri tidak mengingginkan dilakukan orang lain terhadap kita.

Sehingga Allah-pun memerintahkan berbuat baik pada semua kalangan, seperti firman beliau dalam surat an-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.[26]

Artinya di sini semakin rasional seseorang semakin sadar dia untuk berbuat baik terhadap sesamanya sehingga yang dia dapatkanpu adalah perbuatan baik.

Lebih Tinggi Kepentingan Sendiri

Modernisasi memang mengantarkan masyarakat yang dulu bersifat komunal menjadi individual. Tetapi bukan berarti bahwa akhlak yang telah diyakini kebaiknya bisa dilepaskan begitu saja. Karena berapapun individualisnya seseorang dia tidak bisa menghilangkan kontak dengan manusia lain. Sebab kontak yang baik itu justru menjadi jalinan hubungan satu individu dengan individu yang lain jadi semakin kuat.

Memang pemilihan terhadap Akhlak akan memberikan dampak tersendiri terhadap seseorang, seperti memilih melakukan akhlak yang baik akan melahirkan tindakan positif bagi dirinya, contoh menjaga kesehatan jiwa dan raga, menjaga fitrah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruh dan jasmani, oleh karena itu krisis spiritual tidak akan terjadi padanya.

Selanjutnya akhlak yang terjalin pada hubungan antara seseorang dengan orang lain menyebabkan keharmonisan. Kedamaian dan keselarasan dalam hidup yang dapat mencegah, mengobati berbagai krisis. Salah satu penyebab

[26] Kementrian Agama RI, *Al Quran*.

tercabutnya akar spiritual manusia adalah kehidupan yang serba teknologi dizaman modren. Walaupun kondisi ini melahirkan semangat pencarian paradigma baru. Hal ini lahir dari sebuah kesadaran untuk hidup bermakna dari aspek formal yang berujung pada kehampaan dan kesengsaraan. Kondisi inilah yang kemudia menimbulkan pencarian akan makna hidup yang disebabkan kegelapan ruang spiritual yang menganggap waktu begitu cepat berlalu dalam kehidupan tanpa penyelesaian hidup yang direncanakan. Untuk menghilangkan kehampaan dan kegersangan hidup inilah akhlak dibutuhkan sebagai jembatanya. Karena akhlak merupakan bagian dari spritualitas manusia

Teknologi Imfomasi Yang Serba Cangih

Salah satu bukti kemodrenan memang teknologi yang semakin canggih. Namun seharusnya kecangihan teknologi ini selain memberikan kemudahan hidup justru sebagai sarana penyebar kebaikan.

Sebuah hadis mengatakan: Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikannya.[27]

Namun hari ini teknologi berfungi sebagai penebar keburukan, sehingga pantaslah bahwa keburukan itu sangat cepat menyebar dari satu pihak kepihak lain, dari satu tempat ketempat lain. Karena media bukan lagi sebagai wadah penyebar kebaikan tetapi sebagai alat untuk melipat gandakan kekayaan dan kelangenggan kekuasaan.

Jika kita hari ini melihat akun media sosial kita mulai dari FB, Twitter, Instagram dan sebagainya. Hampir semuanya menyiarkan berita-berita yang dipenuhi kebencian dan kebebasan tanpa batas. Tidak sedikit kita menemukan orang bertengkar dimedia sosial dengan berbagai ujaran kebencian dan juga tidak sedikit juga kita menemukan laki-laki dan wanita yang mempertontonkan aura seksualitas yang akan menjerumuskan masyarakat luas pada kesesatan. Padahal menyebarkan keburukan dan melakukan kekasaran Allah telah memberi ancaman dan balasan bagi yang meninggalkanya.

Padahal kalau disadari, yang mengakses media itu tidak cuma kalangan orang dewasa yang sudah dibilang bisa menyaring berita yang ada, namun kalangan dibawah umurpun sudah dengan leluasa dapat mengaksesnya.

[27] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah Al-Jafi and bin Bardazibah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1992).

Dari Abu Ummah, dia berkata. Rasulullah saw bersabda;

Aku memberikan jaminan dengan sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berhak. Aku juga memberikan jaminan dengan sebuah rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan walau dalam senda gurau. Aku juga menjanjikan sebuah rumah di surga tertinggi bagi yang membaguskan akhlaknya.[28] Dari al-Haritsah bin Wahab, ia berkata, Rasulullah bersabda Tidak akan masuk sorga orang yang kasar dan kaku.[29]

Maka sudah seharusnya modernisasi ini diiringi oleh peningkatan akhlak manusia ke arah yang lebih baik. Karena akhlak yang bersumber dari wahyu sudah pasti memiliki legalistas yang kuat dalam standar dampak, tergantung pada kita lagi mempertahankanya atau tidak.

Karena akhlak yang kita lakukan itu sendiri bukan hanya sebagai kebahagian dunia kita saja, bukan hanya sebagai jalinan persaudaraan kita saja namun Allah telah menjanjikan yang lebih dari itu. Seperti dalam hadis HR. Bukhari no 378. Bahwa sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik akhlak.[30] Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang selalu shalat dan puasa.[31]

Ummu ad-Darda meriwayatkan dari suaminya, Abu ad-Darda, Rasulullah saw pernah bersabda: Tiada sesuatu yang lebih berat dalam al-Mizan dari pada akhlak yang baik.[32]

Modernisasi yang sesungguhnya merupakan gerakan sosial, seharus juga memberikan efek positif pada perkembangan akhlak manusia dalam perjalanan revolusionernya. Karena modernisasi memiliki watak yang komplek melalui banyak cara dan disiplin ilmu, sistematik, sehingga menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua gerakan manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi yang bersifat progesif.[33]

---

[28] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).

[29] Al-Jafi and Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

[30] Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari* (Libanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2007).

[31] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu daud* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).

[32] Abu Daud, *Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud*, n.d.

[33] Barbara B. Brown and Carol M. Werner, Social Cohesiveness, Territoriality, and Holiday Decorations: The Influence of Cul-de-Sacs, *Environment and Behavior* 17, no. 5 (1985), https://doi.org/10.1177/0013916585175001.

Gerakan sosial yang tiada henti ini sehusnya juga diiringi dengan penyebaran kebaikan-kebaikan yang bisa membagun hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia lain. Karena ada gerakan kecil dari ketertarikan manusia modren kepada dunia spiritual, untuk mencari keseimbangan baru dalam hidup. Pandangan ini diwakili oleh kaum eksistensialis yang memandang manusia ingin kembali kepada kemerdekaannya yang telah tereduksi oleh kemodrenan. Sehingga ada gambaran bahwa puncak dari modernisasi adalah berputar arah manusia kepada kebutuhan spritualitas yang mereka tinggalkan dalam kemodrenan.

Sisi lain dari perkembangan modernisasi ini adalah manusia lebih tertarik pada ranah estetika tanpa etika. Mereka sering melakukan perbuatan sesuai keinginan yang diluar dirinya. Sehingga tidak salah jika keputusan manusia modren sering menjadikan penjara bagi dirinya atas pengaruh dari luar dirinya.

Kesimpulan

Modernisasi ditandai dengan tranformasi dari segala aspek kehidupan yang bersifat komplek. Terjadi perubahan besar dan terus menerus dalam lingkungan sosial, namun modernisasi bukan jadi sebab manusia harus menafikan fungsi akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki fungsi yang tak bisa dinafikan walaupun teknologi telah mampu mengantikan sebagian dari intekrasik sesama manusia.

Akhlak ini seharusnya tetap bertahan dan mendapatkan penguatan dengan adanya modernisasi, sebab;

Masyarakat heterogen merupakan ranah akhlak yang bernilai tinggi, karena manusia tidak lagi berkumpul dari satu komonitas atau ras saja. Namun dari berbagai macam latar belakang. Sehingga hanya akhlak yang baiklah yang dapat membagun persaudara dalam perbedaan itu. Jadi akhlak merupakan hal yang paling penting dalam masyarakat heterogen.

Modernisasi juga ditandai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seharusnya menjadi alat penyebaran akhlak dalam kehidupanan manusia yang terus mencari tempat yang baru untuk ditinggali. Akhlak yang bisa memberikan pertahan dalam pekara mobilitas adalah akhlak terhadap Allah yang dipertahankan sehingga tempat dan waktu tidak merobahnya. Modernisasi yang membuat tindakan manusia semakin rasional merupakan sebab yang mengantarkan manusia pada penemuan akhlak yang sejati. Karena akhlak bukan dibangun dari mitos mitos tetapi dari wahyu.

Individualis merupakan corak tersendiri dari kelemahan masyarakan modernis karena pertahan manusia terbaik dalam bersaing dengan teknologi yang serbah canggih adalah koloni yang kuat. Tiang kuat dari membagun koloni yang kuat supaya sampai pada tujuan yang ingin dicapai adalah akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik akan memberikan keseimbangan yang sangat bagus dengan perkembangan teknologi yang semakin cangih. Sebab cangihnya teknologi bisa menjadi alat untuk terus menularkan kebaikan demi kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu daud*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

———. *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* . Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Al-Ghazali. *Ihya' Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.

Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah, and bin Bardazibah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1992.

Alwan dkk. Khoiri. *Akhlak/ Tasawuf*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan kalijaga, 2005.

Asrukin M.Si, Drs. Mochammad. Hadist. *Tinjauan Pustaka*, 2012.

Bisri, Khasan. *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*. *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*, 2021.

Brown, Barbara B., and Carol M. Werner. Social Cohesiveness, Territoriality, and Holiday Decorations: The Influence of Cul-de-Sacs. *Environment and Behavior* 17, no. 5 (1985). https://doi.org/10.1177/0013916585175001.

Daud, Abu. *Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud*, n.d.

fuadaty, anny. MAKALAH AGAMA ISLAM-Anny. *Makalah Agama Islam*, 2020.

Hasanah, Nasruddin, dan Maulida. Akhlak Dalam Kehidupan Ibnu Maskawaih. *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)* 3, no. 1 (2019).

Hatuwe, Rahma Satya Masna, Kurniati Tuasalamony, Susiati Susiati, Andi Masniati, and Salma Yusuf. Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 1 (2021).

Ismail, Muhammad bin. *Sahih Al-Bukhari*. Libanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah, 2007.

Jamaludin, Opik. Peran Pesantren Salafi Dalam Peningkatan Kualitas Akhlak Santri. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i1.38.

Kementrian Agama RI. *Al Quran*. Jakarta Timur: Kemenag, 2023.

Mustofa, Imron. Gagasan Islamisasi Ilmu: Studi Tentang Kerangka Metodologi Insitute for The Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)). *Disertasi*, 2018.

Nasir, Muhammad. Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia. *Syntax Idea* 3, no. 11 (2021). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i11.1571.

Nisrokha. Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih. *Jurnal Madaniyah* 1 (2016).

Pudjiwati Sajogyo. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Rahmah, Mirhamida, Lukman Hakim, Dinda Fatmah, Chamdan Purnama, Syaiful Hasani, Yusriyah Rahmah, and Zakiyah Zulfa Rahmah. PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *JURNAL*

EDUCATION AND DEVELOPMENT 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4326.

Rosana, Ellya. MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL. *MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL* 10 (2015).

Setiawan, Ferry. Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 2 (2019).

Suryani, Ira, and Wahyu Sakban. Aplikasi Akhlak Manusia Terhadap Dirinya, Allah SWT., Dan Rasulullah SAW. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022).

Susanti, Mathilda. Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Matematika Sekolah. *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika Uny 2015*, 2015.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial. Terjemahan Dari The Sociology Of Social Change*. Jakarta: Prenada Media., 2004.

Xia, Mengyao, Di Zeng, Qi Huang, and Xinjian Chen. Coupling Coordination and Spatiotemporal Dynamic Evolution between Agricultural Carbon Emissions and Agricultural Modernization in China 2010 2020. *Agriculture (Switzerland)* 12, no. 11 (2022). https://doi.org/10.3390/agriculture12111809.

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Implementasi Pendidikan Multikultural untuk Meningkatkan Keharmonisan dalam Keberagaman

Mohammad Ridwan[1*], Edy Saputra[2], Rahmat Hidayat[3], Sumper Mulia Harahap[4]

[1] Universitas Darussalam Gontor
[2] STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
[3] Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
[4] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email Korespondensi: ridwanbajang@gmail.com

Keywords: *Multicultural Education, Diversity, Inclusiveness, Tolerance, Globalization.*

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the role and implementation of multicultural education in shaping students' character to live harmoniously in the midst of diversity. The method used is a literature review with both theoretical and practical approaches to the multicultural education models applied in various countries. The results of the study indicate that multicultural education has a significant impact in reducing prejudice, increasing empathy, and developing the social skills necessary in a pluralistic society. A curriculum that integrates multicultural values, teacher training that is sensitive to diversity, and the use of participatory teaching methods have proven to be effective in creating an inclusive learning environment. Based on the findings, the recommendations proposed include the need for enhanced teacher training on cultural diversity, the development of a more adaptive curriculum to multicultural values, and the provision of more adequate resources to support the implementation of multicultural education in schools.

Kata Kunci: *Pendidikan Multikultural; Keberagaman; Inklusivitas; Toleransi; Globalisasi.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan implementasi pendidikan multikultural dalam membentuk karakter siswa yang dapat hidup harmonis di tengah keberagaman. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan teoritis dan praktis terhadap model pendidikan multikultural yang diterapkan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki dampak signifikan dalam mengurangi prasangka, meningkatkan empati, serta membangun keterampilan sosial yang diperlukan dalam masyarakat majemuk. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural, pelatihan guru yang peka terhadap keberagaman, dan penggunaan metode pembelajaran partisipatif terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya peningkatan pelatihan

untuk pendidik mengenai keberagaman budaya, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai multikultural, serta penyediaan sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung implementasi pendidikan multikultural di sekolah-sekolah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai ragam budaya dan adat istiadat yang melekat dengan ragam etnis, ras budaya serta agama yang majemuk. Sehingga diperlukan suatu pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang menghargai perbedaan, agar tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi ini yang akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik agar memperoleh pengetahuan, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Pendidikan multikultural mempunyai empat nilai yaitu: Nilai Kesetaraan, Nilai Toleransi, Nilai demokrasi, dan Nilai Pluralisme. Nilai-nilai di atas mempunyai pandangan yang saling melengkapi satu sama lain dalam mensikapi pendidikan multikulturalisme. Dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi.(Abdiyah, 2021)

Menurut Yudi Hartono (2003; 420) pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan.(N. Aulia & Susanti, 2021)

Pendidikan multikultural perlu dikembangkan agar masyarakat Indonesia lebih memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama manusia, dalam memahami sesuatu harus secara utuh agar apa yang menjadi keagungan ilmu dalam multikultural bisa melebar luar tidak hanya sempit sebatas sebagai mengahargai perbedaan, lebih dari itu pemahaman agar pentingnya menjaga keharmonisan, memberi etika dalam berpendapat kelompok lain, menjunjung asas kemanusian dan lain sebagainya diharapkan mampu memberi kejayaan dalam negara yang serba multi ini.(Mahyuddin, 2022)

Dalam pendidikan multikultural, setiap peradapan dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat, anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme dan chauvinism, dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban

yang bersangkutan sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera yang saling menghargai perbedaan. Studi ini mengkaji mengenai pendidikan multikultural dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural tersebut.(Suharsono, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis, library research. Sumber utama pada penelitian ini adalah lektur kependidikan Islam yang berbasis filsafat. Sifat penelitian ini sendiri yaitu deskriptif-analisis, yang mana penelitian ini menguraikan secara teratur seluruh konsep yang memiliki relevansi terhadap pembahasan. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya, disusun sebagaimana mestinya dan dilanjutkan untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode library research, yakni studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun, data dari berbagai literature, digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat berupa bahan-bahan. Dokumentasi, artikel. ilmiah, koran, majalah, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Phenomena Literature:

Indonesia adalah negara yang besar dengan segala budaya dan adat istiadat yang melekat di dalamnya, beragam budaya tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa akan melahirkan berbagai pandangan bahwa Indonesia negara dengan beragam etnis, ras budaya serta agama yang majemuk. Ilmu yang mempelajari tentang kemajumakn tersebut dewasa ini sering disebut sebagai istilah pendidikan Multikultural.(Maemunah et al., 2023)

Menurut Yudi Hartono (2003; 420) pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan.(Mauharir et al., 2022)

Pendidikan multikultural perlu dikembangkan agar masyarakat Indonesia lebih memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama manusia, dalam memahami sesuatu harus secara utuh agar apa yang menjadi keagungan ilmu dalam multikultural bisa melebar luar tidak hanya sempit sebatas sebagai mengahargai perbedaan, lebih dari itu pemahaman agar pentingnya menjaga keharmonisan, memberi etika dalam berpendapat kelompok lain, menjunjung asas kemanusian dan lain sebagainya diharapkan mampu memberi kejayaan dalam negara yang serba multi ini.(Dwiyani, 2023)

Dalam pendidikan multikultural, setiap peradapan dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama, tidak ada kebudayaan yang

lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat, anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme dan chauvinism, dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang bersangkutan sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera yang saling menghargai perbedaan. Studi ini mengkaji mengenai pendidikan multikultural dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural tersebut.(Fajrussalam et al., 2020)

Factual Literature

Multikultural berasal dari dua kata yaitu Multi dan Kultul, multi artinya banyak dan kultul artinya budaya. Menurut para ahli tentang pengertian pendidikan multicultural yaitu sebagai berikut(Purnama, 2021):

1. Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan (2002:17) Pendidikan Multikulturalis adalah pendidikan yang mampu menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural.(Nawangsih et al., 2022)
2. Azyumardi Azra (2000: 20) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. Sedangkan Musa Asy'ari (2004: 16) juga menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.(Muhammad Fadillah Mochtar & A. Mujahid Rasyid, 2022)
3. Andersen dan Cusher (1994:320) mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.(Gunawan, 2022)
4. James Banks (1993: 3) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Dimana dengan adanya kondisi tersebut kita mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi.(G. Prasetyo, 2021)
5. Paulo Freire seorang pakar pendidikan pembebasan mendefinisikan bahwa pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Melainkan pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya.(Romano, 2021)

James Bank (1993: 35) menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu(Banks, 1998):

1. Content Integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. The knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran.
3. An equity paedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial.
4. Prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.(Pratama et al., 2021)

Dalam aktivitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (objek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan, oleh karena itu, dalam memahami hakikat pendidikan perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya, secara umum peserta didik memiliki lima ciri, yaitu:(Ekwandari et al., 2020)

1. Peserta didik sedang dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang kearah dewasa
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.(Mursal Aziz, 2020)

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif, maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalahmasalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakankebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.(Suarlin et al., 2022) Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.(Izzah, 2020)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku dll.(Munib, 2020)

Jadi pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian didalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai

macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya.(Nurhasanah, 2021)

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.(Riyanti & Novitasari, 2021)

Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan serta multikultural. Pendidikan seperti sederhana dapat diartikan menjadi suatu bentuk upaya agar menanamkan serta mengembangkan kecakapan yang ada di diri manusia berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam kehidupan masyarakat serta kebudayaannya. Sedangkan multikultural dapat diartikan sebagai keragaman kebudayaan. Menurut Banks (2018) mendefiniskan pendidikan multikultural sebagai kepercayaan (Set of Beliefs) akan pentingnya nilai dari suatu keragaman budaya dan etnis di dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah suatu ide dari suatuupaya perbaikan, yang bertujuan untuk mengubah tatanan struktur pendidikan sebagai upaya memberikan keadilan yang sama dalam memperoleh pendidikan di sekolah, baik untuk siswa yang berkebutuhan khusus ataupun keadaan tingkatan sosial yang berbeda, tanpa memandang gender dan tanpa memandang mereka berasal dari etnis yang mana.(M. S. Anwar, 2022)

Pendidikan multikultural merupakan bentuk perubahan dalam bidang pendidikan, yang memiliki tujuan untuk memberi kesempatansetara kepada seluruh siswa tanpa melihat latar belakangnya, sehingga seluruh siswa dapat meningkatkan kemampuan yang mereka punya secara optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki(Camelia & Suryandari, 2021). Sleeter dan Grant (2018) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai bentuk kebijakan dalam melakukan implementasi pendidikanuntuk menerima dan mengakui perbedaan serta persamaan manusia yang berkaitan dengan kelas, gender dan ras.(S. Anwar, 2024)

Disisi lain, pendidikan multikultural (Multicultural Education) ialah strategi untuk membentuk sikap multikultural dengan memanfaatkan keanekaragaman latar belakang budaya dari tiap peserta didik, sehingga memberikan suatu pemahaman bersama mengenai konsep perbedaan budaya, kebudayaan, keseimbangan dan demokrasi dalam arti yang lebih luas (Liliweri, 2015). Pendidikan multikultural juga dapat diartikan sebagai proses pengembangan potensi manusia untuk menghargai heterogenitas dan pluralitas sebagai konsekuensi dari adanya keberagaman suku, budaya etnis dan agama.(M. Yusuf, 2023)

Sejalan dengan pendapat diatas, Hernandez dalam Mahfud (2020) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sebagai bentuk pengakuan oleh realitas ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan menerapkan pentingnya etnisitas, agama, budaya, ras, gender, ekonomi, dan status sosial pengecualian yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan merupakan media pengetahuan untuk memberikan nilai-nilai multikultural dengan saling menghormati perbedaan yang ada baik dari sosio budaya ataupun latar belakang yang melingkupinya.(Nur et al., 2022)

Pada hakikatnya, pendidikan multikultural didalam konteks ke Indonesiaan ialah mencoba untuk menyatukan ras, suku dan golongan dengan menekankan pada perspektif pluralitas kemasyarakatan(Zamathoriq, 2021). Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkatan deskriptif dan normatif, yang menjelaskan mengenai masalah-masalah atau isu-isu masyarakat multikultural dalam bidang pendidikan.Terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan model-model pendidikan multikultural berdasarkan konteks teoritis, antara lain: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme, kedua pendidikan mengenai pemahaman kebudayaan, ketiga pendidikan untuk pluralisme kebudayaan, keempat pendidikan Dwi-Budaya, dan yang kelima pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral. Dalam konteks sejarah, pendidikan multikultural tidaklah muncul tanpa penyebab, melainkan adanya interaksi ekonomi, sosial, dan politik yang menyebabkan munculnya istilah pendidikan multikultural tersebut.(Rizki, 2023)

Menurut Banks dalam Chistopher (2014) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, yaitu (1) mengintegrasi berbagai budaya dan kelompok dalam disiplin ilmu (Content Integration), (2) membimbing siswa agar memahami implikasi budaya (The Knowledge Construction Process), (3) menyesuaikan metode pengajaran dalam memfasilitasi akademik siswa yang beragam (an Equity Paedagogy), (4) menentukan metode pengajaran yang cocok dan mengindentifikasi karakteristik ras siswa (Prejudice Reduction). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sebagai negara berkembang, menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana yang penting dalam membangun jati diri suatubangsa. Ada beberapa dasar yang menjadi pertimbangan, antara lain adalah sebagai berikut:(T. Prasetyo et al., 2021)

Pertama, secara inhern pendidikan multikultural telah ada sejak lama. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dari bangsa Indonesia memiliki arti suka membantu, saling tolong menolong, dan menghargai satu sama lainnya yang dibuktikan dengan banyaknya bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti Arab, Afrika, Cina, Eropa dan masih banyak lagi lainnya. Kedatangan bangsa asing tersebut ternyata mampu membuktikan bawah mereka bisa beradaptasi dengan suku asli yang berada di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Minang dan suku-suku lainnya dengan damai tanpa adanya penindasan. Dengan demikian inilah yang dikenal dengan arti pendidikan multikultural.(Mukarromah et al., 2021)

Kedua, pendidikan multikultural mampu membantu kita dalam mengatasai permasalahan yang kemungkinan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan makna pendidikan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, heterogenitas, keyakinan, pluralitas dan segala bentuk keanekaragaman dalam masyarakat.(Amalina, 2022)

Ketiga, pendidikan multikultural menentang secara tegas pendidikan yang lebih mengarah ke bisnis. Dimasa sekarang, banyak kita jumpai instasi pendidikan yang berlomba-lomba untuk menghasilkan income atau pemasukan yang besar. Mereka beralasan bahwa dengan adanya pemasukan yang besar

tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik. Hakikat pendidikan yang sebenarnya bukanlah pendidikan keterampilan belaka melainkan pendidikan yang mampumengakomodir segala bentuk kecerdasan atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan kecerdasan ganda (multiple intelligence).(Mardika, 2022)

Menurut Wahid (2016) Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep yang penting dalam sistem pendidikan biasanya menggunakan metode dan pendekatan (method and approaches) dalam penerapannya. Adapun metode yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Metode kontribusi. Metode ini memberikan ajaran kepada peserta didik untuk bisa berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi event-event kultur lain serta melakukan segala bentuk aktivitas secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan latar belakang antar setiap individu. Peserta didik dilibatkan secara langsung dalam kegiatan ini sehingga mereka bisa mengekploisasi kegiatan tersebut secara mendalam.(Hidayati Azkiya et al., 2022)
2. Metode pengayaan. Metode ini digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui literatur dari masyarakat yang beragam kultur dan agamanya. Salah satu contoh dari penerapan metode ini yaitu mengajak peserta didik untuk melakukan penilaian atau menguji suatu pandangan budaya dalam lingkungan masyarakat lalu kemudian mengapresiasinya.(Asy'ari, 2019)
3. Metode transformatif. Metode ini memiliki perbedaan dari kedua metode yang telah dipaparkan diatas. Metode ini menganjurkan peserta didik untuk kritis dalam melihat konsep-konsep dari berbagai budaya, agama dan etnik di lingkungannya.Metode ini bisa menyebabkan berubahnya struktur dalam pendidikan ketika menghadapi sebuah permasalahan atau isu yang terjadi di beberapa perspektif etnik dan agama, sehingga memerlukan prinsip kebhinekaan sebagai premis dasarnya.(Fajrussalam et al., 2020)
4. Metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam memahami sebuah masalah atau isu-isu sosial yang dapat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengambil keputusan dan membantu mereka untuk dapat berkomitmen serta mengubah sistem melalui aksi sosial.(Sarif et al., 2023)

Sedangkan Menurut Haris (2017) ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan multikultural selain yang telah dipaparkan diatas tadi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa materi yang digunakan dalam pembelajaran merupakan materi yang dilihat kembali kebelakang. Peserta didik dituntut untuk mampu berpikir secara kritis dan mendalam sehingga dapat merefleksikannya di masa yang akan datang.(Soekmono & Ningtyas, 2020)
2. Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini mengandaikan proses terjadinya kontekstualisasi dari apa yang terjadi di masa lampau. Materi yang diajarkan

dalam pendekatan ini bersifat aktual, karena disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pendekatan ini dapat digabungkan dengan metode yang kedua yaitu metode pengayaan.(Fitria & Diantoro, 2022)

3. Pendekatan Kultural. Pendekatan ini lebih menekankan pada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Secara otolatis, peserta didik diajarkan untuk dapat membedakan tradisi-tradisi yang beranekaragam itu berasal dari wilayah mana. Misalnya peserta didik dapat mengetahui mana tradisi arab dan mana tradisi yang berasal dari agama Islam. Dengan adanya pendekatan ini mereka dapat mengetahui mana tradisi yang otentik dan mana tradisi yang tidak otentik.(Khoeriyah et al., 2022)
4. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini lebih memperioritaskan kesehatan psikologis seseorang secara pribadi. Pendekatan ini mengajarkan kepada peserta didik untuk pintar dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran sehingga ia mengetahui metode yang cocok untuk diterapkan dalam kegiatan tersebut.(Danurahman et al., 2021)
5. Pendekatan estetika. Pendekatan ini mengajarkan kepada peserta didik untuk berperilaku sopan dan santun, damai, dan mencintai keindahan. Pendekatan ini diperlukan untuk mengapresiasi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan memandangnya sebagai sebuah nilai seni dan estetis. Hal ini dikarenakan segala sesuatu materi tidak cukup hanya didekati dengan dokrinal dan mengutamakan otoritas-otoritas saja, karenadapat menimbulkan adanya sikap cenderung kasar.(Retnasari, 2018)
6. Pendekatan berprespektif gender. Pendekatan ini menuntut peserta didik untuk tidak memandang jenis kelamin dalam proses pembelajaran karena hal tersebutbukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk memperoleh kesuksesan. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan bahwa istilah perempuan berada di bawah laki- laki dapat dihilangkan.(Aranri et al., 2023)

Dari keenam pendekatan yang telah dipaparkan diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut dapat menimbulkan kesadaran multikultural didalam lingkungan pendidikan. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menanamkan sikap simpati, apresiasi, empati dan respek terhadap keberagaman atau perbedaan yang ada, serta menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku demokratis, humanis dan pluralis.(Datunsolang et al., 2022)

Implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan sekolah tidak hanya berupa pembuatan mata pelajaran tersendiri serta peralihan ke kurikulum formal (menggantikan kurikulum yang sudah ada). Yang terpenting, bisa langsung diterapkan dalam kerja nyata. Sejalan bersama itu, Gibson juga mencatat bahwasanya dalam pendidikan multikultural, guru diharuskan memberikan teladan prilaku serta nilai teladan kepada siswa. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa jika ingin mewujudkan pendidik yang baik, diharuskan dapat membuat teladan bagi siswanya yang menghargai perbedaan, toleran, dan cinta damai serta saling menghargai.(Shiflana Habiba et al., 2022)

Kenyataannya, praktik pendidikan multikultural di Indonesia bisa dilakukan dengan fleksibel dan mengedepankan asas-asas multikultural yang mendasar. Namun demikian, bagaimanapun gambaran serta model pendidikan

multikultural, tidak boleh dilepaskan dari tujuan utama pendidikan multikultural, yakni: (1) Meningkatkan pengetahuan dasar mengenai mekanisme penciptaan sistem dan pemerataan layanan pendidikan. (2) Mengintegrasikan kurikulum dengan konteks kepribadian pendidik, pedagogi, keadaan kelas, tradisi sekolah serta daerah sekolah agar mewujudkan visi lingkungan sekolah yang setara (Supriatin, 2017). Asas fleksibilitas pendidikan multikultural juga dikemukakan oleh Gay, dikutip Zamron, yang mengatakan bahwa sangat ragu menerapkan pendidikan multikultural sebagai mata pelajaran tersendiri. Meskipun, ia menyarankan supaya pendidikan multikultural dianggap menjadi pendekatan yang mempromosikan pendidikan dengan menyeluruh serta holistik. Pendidikan multikultural juga bisa menjadi alat agar mewujudkan rakyat lebih toleran, inklusif serta setara dan selalu berdiri sendiri. Seluruh masyarakat lebih baik jika semua anggota masyarakat berpartisipasi dalam seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesempatan mereka. Bahkan Gay mengemukakan bahwa pembelajaran hendaknya membagikan peluang pada peserta didik agar mendalami bagaimana budaya suatu masyarakat bisa bertindak untuk memajukan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya.(Dwi, 2021)

Dalam visi Zamroni (2013), pendidikan multikultural disarankan agar digunakan sebagai sarana rekayasa sosial melalui pendidikan formal, yang berarti bahwa lembaga pendidikan harus terlibat dalam menumbuhkan pemahaman hidupdalam bermasyarakat yang beragam serta meningkatkan toleransi agar memahami kepentingan dan keahlian bekerja sama bersama semua ketidakamaan yang ada. Sekolah bisa dilihat selaku komunitas, komunitas kecil; Artinya, yang terdapat didalam masyarakat juga terdapat di lingkungan sekolah. Memandang sekolah selaku komunitas kecil mempunyai efek melihat peserta didik selayaknya individu dengan karakteristik yang tercapai dalam kemampuan, minat, serta aspirasi mereka.(Arrosyid, 2022)

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural di tingkat sekolah harus mencermati hal-hal sebagai berikut; 1) semua peserta didik mempunyai keperluan rangkaian yang tidak sama, meliputi keperluan pribadi serta sosial, 2) keperluan profesional serta karir, 3) keperluan psikologis serta rangkaian moral-spiritual(Rabbaniyah et al., 2020).

Sampai saat itu, hal-hal berikut harus dipenuhi di tingkat masyarakat: (1) keperluan pendidikan: (2) keperluan psikologis; (3) keperluan akan rasa memiliki; dan (4) keperluan akan rasa aman. Maka dengan itu, pendidikan multikultural diharuskan mampu mewujudkan keperluan-keperluan itu. Lembaga pendidikan diharuskan menjadi lingkungan yang aman, dengan suasana kekeluargaan serta semangat saling mensuport. Dalam kaitan ini, kegitan pembelajaran bertujuan untuk mewujudkan individu secara keseluruhan, yang meliputi moralitas intelektual, sosial dan spiritual. Tekanan serta motivasi peserta didik agar berusaha tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga lebih diarahkan menggunakan motivasi internal (Januarti, 2020).Dari pandangan hasil pengajaran(Jamilah & Lukman, 2021), pendidikan multikultural mempunyai 3 misi yang dimajukan di dalam diri semua peserta didik;

1. Pertama, pengembangan identitas budaya adalah kemampuan peserta didik agar mengenali asal etnik tertentu. Kecakapan tersebut meliputi

pengetahuan, pemahaman serta kesadaran terhadap suku bangsa serta menimbulkan rasa bangga dan percaya diri menjadi anggota suku bangsa tertentu.

2. Relasi. Yaitu, kemampuan untuk menjaga hubungan dengan kelompok etnis lain, selalu berdasarkan kesetaraan dan kesetaraan serta menghindari kesalahpahaman serta stereotip.
3. Berdayakan individu itu sendiri. Ini adalah kecakapan agar bisa mengembangkan aset yang terkait dengan kehidupan multikultural.

Secara lebih khusus, kompetensi multikultural yang diterapkan dalam bidang pendidikan menurut Wahid (2016) antara lain:(Uyu Mu'awwanah et al., 2021)

1. Kemampuan individu untuk menerima, menghormati dan bekerjasama dengan setiap orang yang berbeda dengan diri individu itu sendiri;
2. Kecakapan budaya adalah tujuan dari pengetahuan dan "bias budaya serta faktor penyebab perbedaan budaya; Dan
3. Tahapan peningkatan kompetensi kultural membutuhkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan efektif serta budaya yang berbeda.Pandangan Moore dalam Supriatin (2017), pendidikan multikultural dalam lembaga pendidikan perlu dilaksanakan secara holistik, tidak hanya dengan perlakuan yang adil di semua peserta didik yang berbeda agama, ras, suku dan budaya, tetapi juga dengan kurikulum yang mendukung, baik kurikulum tertulis ataupun tersembunyi, penilaian komprehensif, integratif, serta pendidik dengan kemampuan untuk mengajarkan pemahaman, prilaku, serta gerakan yang berguna kepada siswanya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan multikultural.(Talokom, 2023)

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga sekolahnya, sekolah perlu merancang, menyiapkan serta mengontrol seluruh unsur lembaga pendidikan yang membantu proses pendidikan multikultural. Lembaga pendidikan perlu merancang tahapan pembelajaran yang bisa menanamkan sifat multikultural pada diri siswa untuk menjadi anggota masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan(Tofiqurrohman, 2019). Sekolah diharuskan bisa membuat aktivitas pembelajaran, mengembangkan kurikulum serta skema penilaian serta melatih guru dengan pemahaman, sikap, serta perilaku multikultural agar mereka berkontribusi secara positif terhadap peningkatan sikap multikultural pada siswanya.(Ibrahim, 2013)

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan pendidikan multikultural(Al-Madani, 2020):

a. Cari metode dan teknik mengajar yang tepat
   Pendidikan multikultural, bisa dengan pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan agama Islam (maupun mata pelajaran lainnya), adalah tentang membina dan mengembangkan sikap hidup yang menuntut penanaman ilmu dan nilai-nilai pada setiap peserta didik untuk mewujudkan

masyarakat yang religius, tetapi inklusifserta pluralistis tanpa mendedikasikan dasar keagamaannya.(Suneki et al., 2022)

Pendidikan multikultural tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, yakni program pendidikan bukan bertujuan agar mengembangkan kecakapan di bidang pendidikan multikultural, tetapi sebaliknya mendidik peserta didik sebagai warga negara yang inklusif, pluralistik, hak asasi manusia dan menyesuaikan diri, tidak berkorban, demokratis. pembentukan sikap serta kelakuan keagamaan.(Alwi et al., 2022)

Oleh karena itu, dalam menumbuhkan serta meningkatkan sikap multikultural, pendidik diharuskan meningkatkan partisipasi peserta didik untuk menggali informasi, mendiskusikan berberapa hal yang berkaitan dengan informasi itu, dan melakukan refleksi terhadap nilai-nilai yang dicapai dalam pembelajaran.(Halim, 2021)

b. Memikirkan Kurikulum

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di tingkat sekolah bisa dilaksanakan dengan menyeluruh secara pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan agama. Pendidikan multikultural melalui pendidikan agama (Islam) bisa dilaksanakan dengan memperkuat titik tolak kurikulum atau dengan menambah atau memperluas hasil belajar yang bersifat mulia dengan menekankan pada beberapa kecakapan dasar yang sudah dipaparkan di atas. Selanjutnya pendidikan multikultural melalui pendidikan agama (Islam) diharuskan dengan pendekatandeduktif, yang dimulai dengan kajian ayat-ayat yang relevan, selanjutnya mengembangkan norma-norma agama, dan norma hukum dan etika.(Suparman, 2019)

c. Guru

Peran guru di dalam pendidikan multikultural juga sangat penting. Guru perlu mengelola dan mengatur proses, isi, keadaan dan kegiatan sekolah secara multikultural, dimana setiap siswa yang berbeda kebangsaan, jenis kelamin dan ras memiliki kesempatan agar meningkatkan dan menghargai perbedaan tersebut.

Di dalam pendidikan multikultural, pendidik bukan hanya diharuskan memiliki kemampuan untuk mengajarkan mata pelajaran yang diampunya secara profesional. Namun bisa menumbuhkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada peserta didik. Akhirnya, pada langkah-langkah tersebut, sebagai hasil dari proses belajar mengajar diharapkan lulusan suatu sekolah atau perguruan tinggi, yang tidak hanya cerdas dalam disiplin ilmunya, tetapi juga tahu bagaimana melaksanakan nilai-nilai kebhinekaan untuk memahami, Menghargai keberadaan pengikut, agama serta kepercayaan.(Amin & Erihadiana, 2022)

Guru harus menekankan keragaman pembelajaran, seperti: (1) Diskusikan kontribusi orang-orang dari budaya yang berbeda dan suku lain untuk hidup bersama-sama selaku suatu bangsa; serta (2) Pembahasan tentang fakta bahwa seluruh orang dari suatu budaya

tampaknya juga menerapkan karya orang lain dari budaya lain. Pada saat pembagian peserta didik di dalam kelas ataupun dalam kegiatan di luar kelas, pendidik diharuskan dapat mencerminkan keberagaman tersebut(Marfuah & Mulyoto, 2021). Beberapa kualifikasi pendidik yang dibutuhkan sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran multikultural, diantaranya:(S. S. Aulia & Paryanti, 2020)

1) guru perlu mempunyai skill mengajar, pengetahuan, pengalaman serta nilai-nilai budaya yang baik untuk dapat memahami peserta didiknya yang berbeda suku, ras, dan budayanya serta mengikutsertakan peserta didiknya di dalam kelas agar dapat belajar bersama, Mengembangkan pembelajaran kooperatif di dalam kelas.(MARDHIANA ANGGRAINI, 2023)
2) Guru juga harus selalu mempertimbangkan apakah mereka telah mampu memberikan rekrutmen dan perlakuan yang adil kepada semua siswa dari latar belakang suku, ras dan budaya yang berbeda dan apakah mereka telah memperlakukan siswa yang berbeda jenis kelamin secara setara.(Lestari et al., 2021)
3) Pendidikan multikultural bisa dilaksanakan dengan dinamis. Maka dari itu guru diharuskan memperdalam pengetahuannya bukan hanya tentang keguruan dan pembelajaran, tetapi juga pemahaman-pemahaman konsepsional mengenai multikultural, misalnya budaya, ras, imigrasi, seks, etnis, stereotip serta rasisme.(Khoirunnisa, 2022)
4) Seorang guru diharuskan mempunyai pemahaman yang cukup mengenai sejarah, ciri-ciri serta perbedaan-perbedaan dari dalam masing-masing kelompok etnik serta ras-ras tertentu.
5) Seorang guru diharuskan bisa melaksanakan analisis-analisis perbandingan serta bisa membuat inti mengenai teori-teori yang bisa dipakai agar bisa mengurus keragaman sosial, hingga menjadi kecakapan yang kuat untuk bangsa(Edi, 2021).
6)

Novelty

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama.(Ningsih et al., 2022)

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002:25) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme.(Afista et al., 2021)

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya

multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.(M. S. Anwar, 2022)

Menurut Choirul Mahfud (2011: 75) multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran atau paham). Secara hakiki dalam kata tersebut terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannyamasing-masing yang unik. Pengertian pendidikan multikultural menurut Andersen dan Cusher (1994:320) dalam choirul Mahfud (2011:167) pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. James Bank (1993:3) dalam Choirul Mahfud Pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan).(Wijaya & Huzen, 2022)

Selanjutnya Suparlan mengutip Fay Brian (1996:203), menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. (Mahyuddin, 2022)

Nilai-Nilai Universal dalam Pendidikan Multikultural Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik agar memperoleh pengetahuan, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikultural di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta(Arfa & Lasaiba, 2022).

Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.(Rodiatul Maghfiroh et al., 2023)

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al-Hujarat Ayat 13)

Menurut Yusuf al Qardhawi 2001:79) pendidikan multikultural bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu, nilai kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan demokrasi.(Sanur & Dermawan, 2023)

1. Nilai Kesetaraan
   Kesetaraan merupakan sebuah nilai yang menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki kesetaraan hak dan posisi dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap individu tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat.
   Di dalam agama apapun akan mempunyai dampak yang sangat luas apabila sebuah agama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, karena agama harus mampu menerjemahkan visi kemaslahatan sosial bagi masyarakat. Kesetaraan dalam agama, terutama agama Islam, Allah telah memerintahkan untuk menghapuskan perbudakan. Prinsip kesetaraan Islam tidak hanya tentang kehidupan beragama saja akan tetapi dalam berbagai aspek kehidupan manusia(Sutisnawati et al., 2023).
2. Nilai Toleransi
   Toleransi adalah suatu sikap bagaimana menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Pendidikan multikultural sanggat menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Begitu pula Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam bersifat adil dan moderat dalam arti tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Hal yang tidak terfikirkan oleh umat Islam saat ini telah lama dilakukan oleh Rasulullah saw. sikap toleransi yang beliau terapkan saat ini menggambarkan bahwa beliau sangat menghargai umat yang lainnya. Dalam pandangan yang lebih luas ini, sesungguhnya nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam syari'at Islam adalah nilai-nilai yang terdapat dalam pebdidikan multikultural.(Amin & Erihadiana, 2022)
3. Nilai Demokrasi
   Prinsip demokrasi dalam pendidikan merupakan suatu prinsip yang dapat membebaskan manusia dari berbagai jenis kungkungan serta memberikan kesempatan bagi perkembangan manusia. Masuknya ideologi demokrasi ke dalam pendidikan merupakan bentuk pengakuan terhadap kekuasaan rakyat. Islam yang memuat nilai-nilai universal salah satunya juga memuat nilai demokrasi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, Islam mendahului faham demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi penopang esensi dan substansi demokrasi. Keistimewaan demokrasi adalah dapat memperjuangkan dan

melindungi rakyat dari kesewenag-wenangan. Dengan begitu prinsip demokrasi dalam pendidikan sesungguhnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dapat mengenyam pendidikan Yusuf al Qadhawi.

Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhna multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme memasuki berbagai ruang lingkup kehidupan masyarakat, terlebih aspek pendidikan. Masyarakat akan memperoleh keadilan demokrasi apabila seluruh kebutuhan rakyat dapat terakomodir dengan baik. Lebih jauh lagi demokrasi memuat nilai-nilai keadilan untuk rakyat.(Wardatushobariah, 2021)

4. Nilai Pluralisme

   Perdebatan mengenai posisi kelompok agama dalam masyarakat merupakan kajian dari pluralisme, sehingga apa yang disebut oleh pluralisme adalah sebuah paham yang memperjelas dan meyakini perbedaan dalam agama. Pluralisme mengajak kepada masyarakat agar melihat keberadaan perbedaan agama sebagai bagian yang realistis dalam kehidupan manusia. (Afnania Yusditiani et al., 2021)

   Islam mengajak kepada manusia yang berasal dari agama-agama keyakinan yang berbeda untuk dapat menyatukan keanekaragaman dalam persamaan. Sesungguhnya pluralisme menginginkan tatanan masyarakat yang dialogis, toleran, dan dinamis.

   Pluralisme bukanlah sebuah paham yang menganggap semua agama adalah sama, terlebih pluralisme adalah paham untuk menghargai perbedaan agama. Dengan keberagaman yang terdapat di masyarakat, sering menimbulkan tindakan destruktif kepada umat beragama lain. Oleh karena itu pluralisme akan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama termasuk dalam memilih agama.(Mardika, 2022)

   Pluralisme memiliki basis teologi yang kuat di dalam khasanah Islam. Meskipun begitu pluralisme tidak hanya untuk konteks ke-Islaman saja, melainkan dalam konteks global. Pluralisme merupakan kemajemukan yang mengakui adanya perbedaan.

   Di Indonesia, pendidikan multikultural dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang di jalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan hati-hati, justru mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan rasional (disitegrasi bangsa dan separatisme).(G. Prasetyo, 2021)

5. Agar peserta didik tidak meinggalkan akar budaya

   Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, saat ia berhubungan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi.

> Hilda Hernandez (2002:31) pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi 'ancaman' serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik tersebut hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan. Dengan beragamnya kebudayaan peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya. (Sarif et al., 2023)

Model pendidikan di Indonesia menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang di pakai untuk mencapainya. Selain itu, pendidikan multikultural dimungkinkan akan terus berkembang seperti 'bola salju' yang menggelinding, semakin membesar dan ramai di perbincangkan. Dan yang lebih penting adalah pendidikan multikultural akan dapat diberlakukan dalam dunia pendidikan di negeri yang multikultural. Dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, seharusnya dikembangkan prinsip solidaritas, yaitu kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar kita melupakan upayaupaya penguatan identitas, melainkan menuntut kita agar berjuang bersama yang lain. Dengan demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.(Dwiyani, 2023)

Banyaknya keragaman yang ada di Indonesia seharusnya membuat negara Indonesia menjadi contoh yang baik dari dunia internasional dalam hal kehidupan yang majemuk atau beragam. Tetapi, bukan hal yang mudah untuk menyatukan masyarakat yang berbeda dari segi agama, ras, budaya serta bahasa. Namun, ketika masyarakatnya sadar bahwa mereka berada pada wilayah yang mengharuskan mereka hidup berdampingan, maka secara perlahan namun pasti hal itu dapat berjalan.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Di Indonesia yang memiliki kemajemukan masyarakat yang tinggi, pendidikan ini memiliki peran yang sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif.(Suparman, 2019)

Multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat. Memang, masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat belum bias menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki system keyakinan, budaya, agama, ras dan tata cara ritual yang berbeda. Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.(Agustina, 2022)

Sedang menganut paham yang ada tentang pendidikan melaului pentingnya Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat diambil suatu simpulan bahwa suatu konsep pendidikan yang terigrasi, sifatnya interdisipliner, multidisipliner, dan antar disipliner, konsep pendidikan yang tidak hanya bervisi kepada pendidikan murni, tetapi sekaligus menggabungkan konsep pembangunan dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang muncul merupakan arti dari Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang toleran terhadap budaya dan etnik semua masyarakat Indonesia merupakan faktor penting dalam pengembangan pendidikan multikultural. Pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah dilakukan melalui perencanaan proses pembelajaran, pembuatan kurikulum dan rencana penilaian, serta pembinaan pendidik dengan konsep, sikap dan pola perilaku multikultural sehingga menjadi bagian yang berkontribusi dalam pengembangan multikulturalisme. sikap pada murid-muridnya. Implementasi pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah bisa diterapkan dengan menyeluruh melalui pendidikan politik, pendidikan agama atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Guru yang melaksanakan pendidikan multikultural harus mengetahui dan memahami nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan cakap menyampaikan nilai-nilai tersebut dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotorik serta mampu mengajarkan sesuatu secara profesional dan menyampaikan nilai-nilai multikultural. mewujudkan bangsa Indonesia yang demokratis dan berkemanusiaan. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan strategis dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan adil di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural mampu mengurangi prasangka, meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan, serta membentuk keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum, pelatihan guru yang responsif terhadap keberagaman, dan penerapan metode pembelajaran yang inklusif menjadi elemen kunci keberhasilan pendidikan multikultural.

Namun, implementasi pendidikan multikultural menghadapi tantangan seperti resistensi budaya, stereotip, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat, untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, pendidikan multikultural dapat

menjadi sarana efektif dalam menciptakan generasi yang mampu menghargai keberagaman, mengatasi konflik secara konstruktif, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat global yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdiyah, L. (2021). Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Multikultural. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1827

Afista, Y., Sumbulah, U., & Hawari, R. (2021). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602

Afnania Yusditiani, Hijazzi Lutfiah Izyul Adha, Meysa Fadlun Rubiyyati, Shella Masrofah, & Arif Rahman. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sekolah. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. https://doi.org/10.56799/peshum.v1i1.10

Agustina, D. (2022). Tinjauan Pendidikan Multikultural dalam Al Hujurat Ayat 13. *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*. https://doi.org/10.53515/tdjpai.v2i2.27

Al-Madani, K. (2020). INTEGRASI INTERKONEKSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS MODERASI ISLAM MELALUI KURIKULUM KEAGAMAAN PENDIDIKAN TINGGI. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*. https://doi.org/10.33650/trilogi.v1i2.2860

Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549

Amalina, S. N. (2022). Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Indonesia berbasis Pendidikan Multikultural. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i4.1182

Amin, A. N., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif QS. Ar Rum Ayat 22. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.511

Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*. https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444

Anwar, S. (2024). Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal. *MAHARSI*. https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3547

Aranri, N., Nahriyah, S., & Jamaludin, G. M. (2023). Membangun Karakter Peserta Didik Yang Toleran Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural. *Prosiding Seminar Nasional Pasca Sarjana*.

Arfa, A. M., & Lasaiba, M. A. (2022). Pendidikan Multikultural dan Implementasinya di Dunia Pendidikan. *GEOFORUM*. https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp36-49

Arrosyid, H. (2022). Optimalisasi Pendidikan Multikultural di Madrasah. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i6.1515

Asy'ari, A. Al. (2019). Rekonseptualisasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan*.

Aulia, N., & Susanti, A. (2021). Peranan Pendidikan Multikultural dalam

Membentuk Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Dasar. *PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ)*. https://doi.org/10.30631/pej.v5i1.77

Aulia, S. S., & Paryanti, S. (2020). PENGUATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI KEGIATAN TADABUR HIZBUL WATHAN. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*. https://doi.org/10.36706/jbti.v7i1.10129

Banks, J. a. (1998). Multiculturalism's Five Dimensions. *NEA Today*.

Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Global. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1649

Danurahman, J., Prasetyo, D., & Hermawan, H. (2021). KAJIAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI ERA DIGITAL. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3515

Datunsolang, R., Amala, R., & Sidik, F. (2022). STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2543

Dwi, V. (2021). INTERNALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER SISWA DI ERA MERDEKA BELAJAR. *Journal of Islamic Education Policy*. https://doi.org/10.30984/jiep.v6i1.1298

Dwiyani, A. (2023). Pendidikan Islam Multikultural diSekolah. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1586

Edi, A. S. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN IDENTITAS NASIONAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Jurnal Kewarganegaraan*. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2291

Ekwandari, Y. S., Perdana, Y., & Lestari, N. I. (2020). Integrasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah di SMA YP UNILA. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*. https://doi.org/10.36706/jc.v9i1.10268

Fajrussalam, H., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI JAWA BARAT. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*. https://doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6385

Fitria, N. Al, & Diantoro, F. (2022). Kebijakan Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren. *Pendidikan Multikultural*.

Gunawan, R. D. (2022). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural. *Journal of Educational Research*. https://doi.org/10.56436/jer.v1i1.8

Halim, A. (2021). Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*. https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.5081

Hidayati Azkiya, M. Tamrin, Arlina Yuza, & Ade Sri Madona. (2022). Pengembangan E-Modul Berbasis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(2).10851

Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Pengertian , Prinsip , dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*.

Izzah, N. I. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al Hikmah: Journal of Education*. https://doi.org/10.54168/ahje.v1i1.5

Jamilah, S., & Lukman, L. (2021). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA ANAK USIA DINI. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i2.679

Khoeriyah, Y., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi dan Relevansinya dalam Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.708

Khoirunnisa, S. K. (2022). ANALISIS MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BERORIENTASI MULTIKULTURAL. *JURNAL EDUSCIENCE*. https://doi.org/10.36987/jes.v9i1.2624

Lestari, E. T., Irawani, F., & Januardi, A. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA MATA KULIAH SEJARAH ASIA TENGGARA. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. https://doi.org/10.31571/sosial.v8i1.3253

M. Yusuf, M. Y. (2023). Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Buntet. *Tsaqafatuna*. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v5i2.246

Maemunah, Y., Darmiyanti, A., & . F. (2023). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI RASA TOLERANSI BERAGAMA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIKAMPEK SELATAN JAKARTA. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*. https://doi.org/10.31102/alulum.10.2.2023.199-207

Mahyuddin. (2022). Penerapan Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. https://doi.org/10.55623/au.v3i2.151

MARDHIANA ANGGRAINI. (2023). Pendidikan Multikultural sebagai Perwujudan Profil Pelajar Pancasila melalui Pengajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.919

Mardika, F. (2022). Pendidikan Multikultural Perspektif Islam. *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.31958/atjpi.v3i1.4033

Marfuah, I., & Mulyoto, M. (2021). Manajemen Pendidikan Multikultural untuk Menanamkan Nilai-nilai Karakter di Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*. https://doi.org/10.30738/mmp.v4i1.7954

Mauharir, M., Fauzi, F., & Mahfud, M. (2022). Penanaman Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Ekstrimisme pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2775

Muhammad Fadillah Mochtar, & A. Mujahid Rasyid. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13.

Bandung Conference Series: Islamic Education. https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3579

Mukarromah, I., Syukron, B., & Fathonah, I. (2021). NILAI NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1599

Munib, A. M. (2020). AM ANALISIS KOMPARATIF ANTARA TEORI BELAJAR DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*. https://doi.org/10.31102/alulum.7.1.2020.25-35

Mursal Aziz. (2020). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i2.38

Nawangsih, E., Sabarudin, S., Daheri, M., & Eviliani, E. (2022). Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3378

Ningsih, I. W., Mayasari, A., & Ruswandi, U. (2022). Konsep Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3391

Nur, M., Hidayat, A., & Sari, N. (2022). Persepsi Guru terhadap Pendidikan Multikultural di Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3266

Nurhasanah, S. (2021). INTEGRASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) UNTUK MEMBENTUK KARAKTER TOLERAN. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*. https://doi.org/10.51729/6135

Prasetyo, G. (2021). Akulturasi Masyarakat Pandhalungan : Aktualisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Sejarah. *Education & Learning*. https://doi.org/10.57251/el.v1i1.16

Prasetyo, T., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Multikultural Di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. https://doi.org/10.30997/dt.v8i1.3661

Pratama, A. A., Anshori, M. M., Mutiara, E., & Annisa, S. N. (2021). Pengajaran Agama melalui Pendekatan Multikultural : Strategi dan Peluang. *ARZUSIN*. https://doi.org/10.58578/arzusin.v1i1.109

Purnama, S. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural melalui Mata Pelajaran PPKn untuk Mendukung Sikap Toleransi Siswa dalam Masyarakat Multikultur. *Jurnal Basicedu*. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1561

Rabbaniyah, J., Handrianto, B., & Sastra, A. (2020). PENERAPAN ISLAMISASI SAINS AL-FARUQI DALAM SILABUS BIOLOGI. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1.3054

Retnasari, L. (2018). Strategi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme Di Era Globalisasi. *Mengembangkan Kompetensi Pendidik Dalam Menghadapi Era Disrupsi" Kerjasama PGSD - POR UMS*.

Riyanti, A., & Novitasari, N. (2021). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Adat Dan Budaya*

Indonesia. https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.37780
Rizki, O. F. (2023). Pentingnya Pendidikan Multikultural Berbasis Agama. *ANTHOR: Education and Learning Journal*. https://doi.org/10.31004/anthor.v2i2.122
Rodiatul Maghfiroh, V., Anwar, M., Miftahul Huda, & Yasmar, R. (2023). Model Pendidikan Multikultural (Telaah Hidden Curiculum di Pondok Buntet Pesantren Cirebon). *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.30599/jpia.v10i1.2118
Romano, R. (2021). Paulo freire. In *Educacao e Sociedade*. https://doi.org/10.1590/ES.255517
Sanur, I. S., & Dermawan, W. (2023). Pendidikan Multikultural untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*. https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.8868
Sarif, N. R., Ariyani, Y. D., & Wahyudi, A. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*. https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(2).54-71
Shiflana Habiba, I., Arum Sari, K. F., & Lutfiyan, D. A. (2022). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEDIA SOSIAL. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i2.154
Soekmono, R., & Ningtyas, D. P. (2020). Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural melalui Pendekatan Proyek Kolaboratif. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.444
Suarlin, S., Elpisah, E., & Mawaddati, N. M. (2022). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Meminimalisir Problematika Anak Di Sekolah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1024
Suharsono, S. (2017). Pendidikan Multikultural. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3
Suneki, S., Haryono, Hadi, D. P., & Yunus, M. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Festival Seni Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
Suparman, H. (2019). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif al-Qur'an. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*. https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.12
Sutisnawati, A., Maksum, A., & Marini, A. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 di Sekolah Dasar. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*. https://doi.org/10.20961/jdc.v7i3.79769
Talokom, J. V. (2023). Pendidikan multikultural dan multikulturalisme. *OSF Preprints*.
Tofiqurrohman, H. (2019). Pendidikan Multikultural dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kependidikan*. https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3080
Uyu Mu'awwanah, Arita Marini, & Arifin Maksum. (2021). PERSEPSI GURU PADA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS AGAMA DI SEKOLAH DASAR

ISLAM TERPADU IQRA KOTA SERANG. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*. https://doi.org/10.36928/jipd.v5i1.703

Wardatushobariah, N. (2021). IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (Penelitian Di MI Jamaludin Sampih). *Tsaqafatuna*. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i2.71

Wijaya, S., & Huzen, I. H. (2022). NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*. https://doi.org/10.59622/jiat.v2i1.42

Zamathoriq, D. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. https://doi.org/10.58258/jime.v7i4.2396

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Exploring Strategic Communication: A Theoretical Framework or Paradigm in Communication Study

Erita Riski Putri[1*], **Ahmad Rifai**[2]
[1] Ilmu Komunikasi, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia
[2] Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
email: eritariski.putri@gmail.com

Keywords:
Strategic Communicatio; Theoretical Framework; Paradigm; Communication Strategy.

ABSTRACT

The continuing debate around classification of strategic communication as a theoretical framework or an interdisciplinary paradigm is critical to the field of communication studies. This research paper is to examine how strategic communication ties together multiple academic disciplines to determine if it is a paradigmatic shift in theoretical foundations or whether it remains a pragmatic framework for how communication strategy merges with organizational aim. This investigation uses a qualitative, literature based methodology performing a thematic analysis across major contributions to understand prevailing points of view. The results illuminate two divergent viewpoints: Argue that strategic communication functions as a paradigm, one that reconceives the role that communication should play in the development of strategic initiatives, while others argue that strategic communication is an approach for overseeing processes such as stakeholder relationship management and crisis management. Ultimately, the study argues that strategic communication's dualistic nature as a paradigm but also as a framework is useful in two ways: firstly, from a more practical angle, in terms of helping to understand how to manoeuvre through the complexities that are present in the environments of contemporary organizations, which have been intensified by the impact of digital transformation and the changing stakeholder expectations.

Kata Kunci:
Komunikasi Strategis; Kerangka Teori; Paradigma; Strategi Komunikasi.

ABSTRAK

Perdebatan yang terus berlanjut seputar klasifikasi komunikasi strategis sebagai kerangka teori atau paradigma interdisipliner sangat penting bagi bidang studi komunikasi. Makalah penelitian ini akan mengkaji bagaimana komunikasi strategis menyatukan berbagai disiplin ilmu untuk menentukan apakah komunikasi strategis merupakan pergeseran paradigmatik dalam fondasi teoretis atau tetap merupakan kerangka kerja

pragmatis tentang bagaimana strategi komunikasi menyatu dengan tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis literatur yang melakukan analisis tematik di seluruh kontribusi utama untuk memahami sudut pandang yang ada. Hasilnya menjelaskan dua sudut pandang yang berbeda: Ada yang berpendapat bahwa komunikasi strategis berfungsi sebagai sebuah paradigma, yaitu paradigma yang memahami kembali peran yang seharusnya dimainkan oleh komunikasi dalam pengembangan inisiatif strategis, sementara yang lain berpendapat bahwa komunikasi strategis merupakan sebuah pendekatan untuk mengawasi proses-proses seperti manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan dan manajemen krisis. Pada akhirnya, penelitian ini berpendapat bahwa sifat dualistik komunikasi strategis sebagai sebuah paradigma dan juga sebagai sebuah kerangka kerja berguna dalam dua hal: pertama, dari sudut pandang yang lebih praktis, dalam hal membantu memahami bagaimana bermanuver melalui kompleksitas yang ada di lingkungan organisasi kontemporer, yang telah diintensifkan oleh dampak transformasi digital dan perubahan ekspektasi para pemangku kepentingan.

INTRODUCTION

Communication studies is a broad discipline which encompasses diverse theories and frameworks applicable to various forms of communication. The exploration of this field goes beyond interpersonal communication, which is the communication in between people, to corporate communication, a communication that takes place both within an organization to other organizations and stakeholders. Under this context, Strategic Communication is a very important notion that encompasses a variety of such practices about effective communication. The practices included below, though not limited to: public relations aiming to manage a corporation's public image; corporate communication that refers to all communicative activities included in any organization; marketing directed towards the promotion and sale of products or services; crisis communication related to the management of communication in emergency situations and change management that has to do with articulating positions relative to an organization.

Understanding the categorization of Strategic Communication in the academic community, there has been extensive debate on its categorization. There is disagreement among scholars as to whether it should be conceived as a new paradigm that calls for revision of extant theories of communication or as a

set of interrelated practices that, while important, do not mark a separate dimension within scholarly discourse.

Communication studies is a wide, wide discipline of a wide variety of theories, paradigms, and frameworks that examines the many faces of communication. This examination spans interpersonal communication to organizational and corporate communication, with emphasis on strategic management of information both inside and outside institutional constraints. Strategic communication has become an important area of scholarly inquiry within this wider domain that encompasses public relations, corporate communication, corporate communication, crisis communication and change management. However, in theoretical foundations of strategic communication, scholars opposedly argue over whether it should be regarded as a new communication paradigm or as an all together framework of previous strategic communication practices.

DeCarlo (2018) defines a paradigm in the realm of scientific inquiry as a cohesive topic or set of assumptions of and methodologies for conducting research that occurs within a particular domain. It includes many transformations in the notion of how phenomena are presented and how they are seen or scrutinised. However, a theoretical framework is the opposite as a structured lens that can be used to understand certain phenomena with existing theories framing research questions (DeCarlo, 2018). Scholars within the field of communication studies have explored these distinction among the Indonesian setting such as Nasucha & Turpyn (2024), the study analyzes the fluid and changing nature of communication paradigms within this field.

In the domain of scientific inquiry, a paradigm serves as a comprehensive worldview or framework that informs the assumptions and methodologies employed within a specific research discipline, as articulated by DeCarlo (2020). This notion advanced a major change in our understanding, impacting how phenomena are analyzed and interpreted. A theoretical framework on the other hand provides a structured window through which selected phenomena can be elucidated through the help of already tested theories in framing the research questions DeCarlo (2018). Scholars in the field of communication studies, such as Nasucha & Turpyn (2024) have examined these perspectives in an Indonesian context—one where paradigms of communication inexorably adapt and change.

The discussion around Strategic Communication as a communication paradigm, or as a theoretical framework, is an ongoing discourse. Werder et al.

(2018) and Overton-De Klerk (2023) suggest that a paradigmatic approach to Strategic Communication is preferable to that of Estaswara, Halim, & Burhan (2020) and Hoffjann (2024), who consider it as a theoretical framework. This spot of divergence of thought can also be an attractive topic for further study to gain scholarly understanding of whether Strategic Communication should be considered part of Communication Theory or as a new research paradigm that requires independent additional study.

In order to critically analyze the competing positions as to whether Strategic Communication is to be conceptualized as a paradigm or a framework for its interpretation, this article is offered. Werder et al. (2018) define Strategic Communication as an interdisciplinary paradigm that combines public relations, marketing, and corporate communication so that the puzzle of the respective fields plus their descriptions can be completed. Our investigation carries a focus on the ways Strategic Communication can articulate organizational objectives, is used to build reputational capital, and functions to manage stakeholder relationships in the complex environment of present communication.

This paper explores two contrasting perspectives on strategic communication: it is a paradigmatic shift or organizing framework. Recent scholars paradigm suggests strategic communication could introduce new assumptions and reshape the field, however, both Giddens (1984) in Whittington (2015) and DeCarlo (2018) remind us of the importance of frameworks already in place. How it functions as a systematic integration of multiple practices is highlighted also by Littlejohn, Foss, & Oetzel (2021), Deuze & McQuail (2020) and Holtzhausen et al. (2021) who argue that frameworks assist in organizing communication knowledge. This study then explores how these views influence the role of strategic communication in managing stakeholder engagement, organizational objectives and reputation. The paper presents through a comparative literature review about the intersections and differences between these theoretical approaches in order to contribute to ongoing debates about whether strategic communication is a paradigm or a framework.

In this paper I investigate whether Strategic Communication is a new paradigm in the study of communication or simply a structure based on existing theories. Others argue that Strategic Communication changes the delivery of a communication to the sophisticated strategic management of the public and stakeholders. Whereas, those who regard it as a framework characterize it as the amalgamation of present disciplines like public relations and marketing, rather

than as a new concept. The paper is structured as follows: The Literature Review examines scholarly literature that is related to Strategic Communication. The Methodology is explained by exhibiting the comparative literature review as the principal research guide. The Discussion concludes with a reflection of the central debate in light of key findings. At last, the Conclusion supports one of the two views and recommends further research to improve the study of Strategic Communication.

In an attempt to substantiate our claim, it is inevitable that the substantial amount of the literature on Strategic Communication simply represents the confluence and amalgamation of all aspects and the specific academic disciplines — and they include, but are not limited to, public relations, corporate communication, marketing strategy, crisis management protocols, and change management processes. There is, as of yet, a continual discussion and heated debate within the scholarly community over whether Strategic Communication should be seen as an isolated and wholly new paradigm that should be examined apart from the rest, or as an ongoing and ever adapting format that effectively combines the best of various fields. This is a detailed review of important, seminal works, concentrating in particular upon several critical dimensions, for example (1) the exact definition of Strategic Communication and its wide (2) and how it harmoniously coexists with and is supportive to other existing academic disciplines, (3) practical applications and implications in change management and crisis communication, (4) the debate among theorists around paradigms versus frameworks, and (5) the nonexistent gaps in current literature on this topic matter. This section attempts to provide distinctive insights and deepen understanding of Strategic Communication as a critical and multi-faceted field of study that is open to consolidate as the communication challenges of the time change.

LITERATURE REVIEW

Defining Strategic Communication

Strategic communication has rapidly emerged as a prominent concept in communication studies. However, as noted by Nothhaft et al. (2018) and Botan (2018), it remains challenging to position strategic communication as a standalone theory. Instead, it is better understood as a multidisciplinary field with distinct research objects, a growing body of specialist knowledge, and organizing

concepts. These scholars highlight that strategic communication also involves specific terminologies, institutional manifestations, and research methods, positioning it as an applied field that bridges communication theory and practice. Furthermore, it emphasizes the use of information within organizations to plan and execute campaigns that manage relationships between organizations and their stakeholders.

A recurring theme in the literature is the broad applicability of strategic communication across multiple contexts. It functions as a macro-level framework, guiding communication practices aligned with organizational goals and audience expectations. Mahbob, Sulaiman, and Mahmud (2019) argue that strategic communication involves not only what is communicated but also what is deliberately left unsaid. It serves as the basis for selecting communication goals, defining action plans, and tailoring messages to influence behavior. Strategic communication's essence lies in designing purposeful communication plans to achieve specific objectives—ensuring the target audience understands the message and is motivated to take action.

Strategic Communication is the planned use of communication to achieve organizational objectives by aligning Organizational objectives with internal and external Stakeholders. It is, however, multipurpose in the evolving discourse, serving to build reputational capital (Zerfass et al., 2018), engage audiences (Zerfass et al., 2018), and, in times of crisis, facilitate crisis management (Zerfass et al., 2018). The book "Strategic Communication: Key insights are offered in Contemporary Perspective. In Chapter 1, it is framed as a field that attempts to understand how organizations craft communication in a purposeful way within a complex environment, and in Chapter 6 we highlight that the communication strategies must consider ethical considerations and clearly engage with stakeholders in a number of channels.

According to Werder et al. (2018), Strategic Communication departs from public relations, marketing, and corporate communication, and it's defined by its long term goal of alignment of efforts with organizational objectives. Scholars like van Ruler (2018) highlight the dual nature of the field: For some, it is a controlled, one way process to gain audience approval, while for others communication, is constitutive, and shapes strategic decisions concurrently. This divergence reflects Strategic Communication's dual role: Through stakeholder interaction, it builds strategy internally, while promoting strategic choices externally.

Reflecting on these developments, Estaswara (2021) emphasizes the interactive and negotiated nature of strategic communication from the perspective of communication science. Unlike linear, one-way models, strategic communication emphasizes multi-directional and participatory interactions, fostering deeper meaning-making processes through continuous dialogue and negotiation between multiple actors. This complexity underscores the shift from traditional communication models to more nuanced, iterative forms of interaction.

Adding depth to the discussion, Holtzhausen and Zerfass (2015), cited in Macnamara (2018), describe strategic communication as deliberate and purposive communication enacted by agents in the public sphere to achieve specific objectives. Macnamara (2018) also broadens the scope of strategic communication by linking it to contemporary management approaches, such as customer-centric strategies in business, citizen engagement, and participatory governance in public-sector organizations. In line with this, Frandsen and Johansen (2015) argue that strategic communication can be viewed as a discipline encompassing all types of organizational communication activities, focusing on collaborative engagement and agile management processes.

This is why Van Ruler (2018) raises the case of the communication processes as being continued managed in a continuous strategy loop (Strategic Communication). The omniscient, interactive process guarantees that strategies are created along with societal expectations. Communication is more than a tactical method of doing something, but it is also a way to deploy strategy in time, supporting both the presentation and realization aspects of organizational goals.

Strategic Communication and Public Relations, Corporate Communication, and Marketing

Public relations, corporate communication and marketing are the basic pillars of Strategic Communication that integrate to make this practice what it is. There is overlap among these disciplines, scholars especially highlight the relation of these disciplines in areas of brand management, stakeholder engagement and message consistency in platforms (van Ruler, 2018). Strategic Communication, however, diverges from the rest, adopting a holistic approach by integrating its

communication efforts within the organization's more long term objectives (Nothhaft et al., 2018).

Corporate communication presented itself as an effort to communicate organizational values to internal and external audiences, while public relations was either a means of two-way interaction through active communication with stakeholders, or a passive means to generate dialogue. Consumer engagement and building brand equity are the focus areas for marketing communication to build consumer engagement and build brand equity which serves as a basis for market repositioning. Strategic Communication takes all these fields into a harmony by aligning all communication activities to the organization's vision and strategic objectives (Werder et al., 2018).

Furthermore, Mahbob et al. (2019) tried to elaborate from an organizational perspective that strategic communication is effective when it incorporates elements such as communication patterns, direction, channels, content, and style. Additionally, leadership and interpersonal skills, as well as careful planning, execution, and evaluation, are essential for achieving communication effectiveness. This multi-faceted approach reinforces the dynamic nature of strategic communication in practice, reflecting both internal and external dimensions of communication within organizations.

van Ruler (2018) adds further nuance to the conceptualization of strategic communication, suggesting that it should be seen as an agile management process rather than a static set of practices. She proposes that strategic communication involves continuous meaning-making and negotiation, both internally and externally, through dynamic feedback loops. This diachronic, omnidirectional process aligns communication with strategy building, testing decisions through interaction, and refining them based on stakeholder responses. Van Ruler's framework reflects the evolution of strategic communication into an iterative, adaptive, and participatory process, positioning it as an essential component of modern organizational management.

Although they are connected, for instance, and interdependent, there is an objection by an unashamedly contingent – and critical – school of theorists and practitioners who worry about theoretical integrity under the weight of such a project. Specifically, Werder et al. (2018) offer a cautionary line of sight, whereby the theoretical limits of Strategic Communication continue to be necessarily fluid and evolving. This observation prompts the emergence of a significant inquiry: Do we herald the arrival of a new paradigm in communication

landscape with Strategic Communication, or is it merely an overall framework to bring together and combine existing practices in the communication discipline?

Paradigm vs. Framework: Scholarly Debates

This ongoing discourse amongst academics is whether Strategic Communication is a paradigm or a framework. Kuhn (1962) in van Ruler (2018) defines paradigm as a disruptive element that overthrows a discipline's bedrock foundations, and the ways in which problems are identified and solutions proposed. In this context, Strategic Communication can be seen as an evolution from representing simply as a mechanism for message transmission to a broader and more integrated model which pursues alignment with overarching strategic objectives. Specifically speaking, it is more beneficial to view communication as a process to develop organizational alignment around particular goals through intentional, coordinated communication undertakings, rather than seeing communication as a means of delivering messages.

Strategic communication is increasingly recognized as a vital management practice within organizations, as highlighted by various scholars. Macnamara & Gregory (2018), Werder et al. (2018), and Mishra & Balani (2018) emphasize that strategic communication transcends traditional theoretical models. This evolution reflects a shift in how organizations approach communication, recognizing its critical role in achieving organizational goals and fostering effective stakeholder relationships. Estaswara, Halim, & Burhan (2020) delves into the historical context of strategic communication, tracing its origins and illustrating how it has transformed into a strategic tool for organizational management. This historical perspective is essential for understanding how communication strategies have adapted to meet the changing needs of organizations in an increasingly complex and interconnected world.

In contrast, scholars like Hoffjann (2024) and Botan (2018) argue that strategic communication should be viewed as part of a broader communication framework. This perspective suggests that while strategic communication is crucial, it operates within a larger ecosystem of communication practices that include public relations, marketing, and internal communication. This integrative approach emphasizes the interconnectedness of various communication strategies and the need for organizations to adopt a holistic view of their communication efforts. The recognition of strategic communication as a

management practice signifies its importance in navigating challenges such as crisis management, reputation building, and stakeholder engagement. Organizations are now more than ever aware that effective communication can lead to enhanced organizational performance, increased transparency, and improved public perception.

Other scholars working in this field argue that what we see here is not a set of parallel ideas which simply happen to lead to apparently similar outcomes, but a complete framework consisting of a robust methodology and a systematic and coherent manner in which communicative practice is organized and coordinated to meet a particular set of ends. This assertion is further illustrated by Giddens (1984), for example, who posits in his structuration theory that such frameworks do not, by definition, require a transform in what we think or an entire total reformatting of current frames of reference. As van Ruler (2018) describes, Strategic Communication has its origin in communication theory on both theoretical and practical level and is a more or less instrumental way of managing different communicative processes, while at the same time a broader paradigm that includes all of the said processes.

And this is of course a highly important angle within this discourse because it impacts the act of trying to understand the theoretical foundations on which Strategic Communication rests upon. From a theoretical perspective, when we consider Strategic Communication as a paradigm, it becomes clear that previously accepted concepts of communication studies may require redefinition and reexamination. However, a significant level of scholarship and resources will be used to perfect and refine communicative practices when these activities are bounded to a particular locus, rather than for the radical transformation of the entire discipline.

From this perspective, strategic communication transcends conventional definitions by recognizing the necessity of interaction and negotiation in constructing meaning. This is particularly relevant in understanding how organizations navigate communication challenges in diverse environments and contexts. Alghasi & Falkheimer (2024), Diers-Lawson & Fredheim (2024), and Pettersen & Karlsen (2024) wrote as book sections on "Strategic Communication—Contemporary Perspective" further enrich this discourse, where they explore strategic communication as a theoretical construct, strategy, and even as a paradigm. Their examination invites scholars to consider the broader

implications of strategic communication, fostering a dialogue on the theoretical frameworks that inform practice.

Gaps in the Literature

Strategic Communication scholars offer diverse perspectives on how communication functions in practice. Van Ruler (2018) highlights two competing viewpoints: some regard communication as a one-way process aimed at securing audience approval, while others view it as a co-creative process that helps shape strategic decisions. This divergence has contributed to fragmentation within the field, complicating efforts to establish a unified conceptual framework.

While Strategic Communication has evolved, empirical studies exploring its status as a paradigm remain sparse. Much of the research focuses on its application within narrow fields (Werder et al., 2018). There is a need for comparative studies across industries and cultural contexts to examine how Strategic Communication varies in different settings and whether it constitutes a paradigmatic shift or remains a framework for applied practice.

The rise of digital communication platforms, such as social media and real-time engagement tools, has introduced new challenges for Strategic Communication frameworks. Estaswara (2021), Brønn (2021), and Macnamara & Gregory (2018) emphasize that existing frameworks need to evolve to accommodate the dynamic and interactive nature of digital communication. This points to a gap in the integration of digital tools and platforms into traditional models, necessitating more adaptive and fluid approaches to communication.

METODE

This section outlines the research methodology employed to explore whether Strategic Communication functions as a paradigm or a framework. It covers the research design, data collection methods, analysis techniques, and ethical considerations. The study adopts a qualitative research design, focusing on thematic analysis of scholarly literature and expert interviews. A qualitative approach is suitable because it allows for an in-depth exploration of theoretical concepts and their practical applications. This research design also helps uncover underlying assumptions within the field. Thematic analysis is employed to identify recurring patterns and themes in the literature and interview data. This method

allows for the comparison of different perspectives on Strategic Communication—whether it is a paradigm or a framework.

The study uses thematic analysis to interpret and categorize the data collected from the literature. Thematic analysis is well-suited to identify recurring patterns, key themes, and divergent viewpoints across various sources. By coding key themes—such as one-way vs. constitutive communication, the strategic development loop, and the integration of multiple disciplines—the analysis provides clarity on the evolving nature of Strategic Communication.

Given the conceptual focus of the study, a literature-based research approach is ideal. It allows the integration of existing knowledge and theories, facilitating critical reflection on how Strategic Communication has developed and continues to evolve. The reliance on secondary sources also enables comparative analysis across different scholars' views, ensuring the study captures diverse perspectives on whether Strategic Communication represents a paradigm or framework.

A literature-based qualitative design inherently limits the ability to test hypotheses empirically or gather new data directly from communication practitioners. However, the strength of this approach lies in its theoretical depth and ability to synthesize insights across disciplines. Future research could complement this study with empirical methods, such as interviews or surveys, to explore how Strategic Communication is applied in practice.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

The analysis of the literature reveals two primary perspectives on Strategic Communication: From one perspective, one perceives it as a practical framework for applied organizational communication practices, while from another perspective, it is conceptualized as a paradigm integrating various communication theories and practices. By their turn, Estaswara (2021), Németh (2021), and Hoffjann (2024) claim that the strategic communication has evolved beyond the classical frameworks and developed an interdisciplinary approach to the complex organizational processes of change management, crisis communication, and digital engagement. This implies paradigmatic patterns, thereby carrying over sectoral boundaries and incorporating aspects from public relations, corporate communication and marketing.

In opposition to this stance, scholars such as Falkheimer et al. (2017), van Ruler (2018), Werder et al. (2018), Holtzhausen et al. (2021), and Overton-De Klerk (2023) argue that while Strategic Communication continues to be a strategic tool that facilitates alignment of communication and organizational goals, it has yet to develop into a true paradigm. Such a perspective highlights the operational utility of Strategic Communication as a continuous–iterative process of managing communication under fluid contexts of organizational strategy. This theoretical fragmentation in the field is a result of the differing perspectives, which are described in the literature review, and this ongoing debate over whether Strategic Communication constitutes a new paradigm or not.

The scholarly investigation conducted in this research highlights two primary academic perspectives on Strategic Communication: the first is one that regards it as an interdisciplinary paradigm that crosses the traditional academic borders, while the other regards it as a practical framework under whose theories can be applied to real world situations. Strategic Communication is argued by many scholars to be an holistic, putting together insights from various disciplines such as public relations, corporate communication and marketing in an integrated body of knowledge. This approach is supported by Werder et al. (2018), Mishra & Balani (2018) and Holtzhausen et al. (2021), who suggest that this approach brings the communication strategies in line with the organization's broader objectives so that Strategic Communication becomes a meta discipline to manage reputation, engage stakeholders and build organizational identity in various contexts.

Scholars such as Falkheimer et al. (2017), Kostić S & Šarenac J (2020), Brønn (2021), and Alghasi & Falkheimer (2024) however, caution away from treating Strategic Communication as a simple interdisciplinary synthesis. However, they maintain that communication processes involve substantial complexity, and there are far more relating factors that you need to understand how to interpret and, therefore, extract the inherent nuance of the decisions made by individuals in an organization. This group of scholars emphasizes the importance of Strategic Communication to not only aligning messages with strategic objectives, but also to navigate complex processes of meaning making, identity negotiation and stakeholder influence in dynamic and uncertain environments. The domain of Strategic Communication is on ongoing debate, reflecting the common dynamic of the field as somewhere at the interface of

theoretical abstraction and practical application, a stimulant to scholarly competitiveness and empirical action.

Exploring on two perspectives: paradigm and framework through 41 papers, book sections, and books published year between 2018-2024 with open access as simple chart and calculation by categorizing each one of them based-on conclusion, result, or discussion in their works (see figure 1).

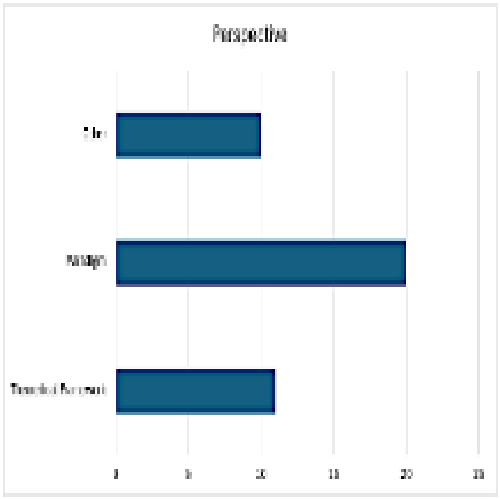


Figure *1* Chart of Authors Perspective on Their Work

Source: Authors

These and other multiple perspectives figure in the chart and reflect a majority of works in the area as a paradigm of strategic communication. Some use it as a theoretical framework, a smaller but significant number treat it as a paradigm, and the rest fall under "Other," a group that focuses on practical applications without actively debating theoretical or paradigmatic issues, whatever you prefer to call them. This distribution supports the primary objective of this paper: by arguing that rather than opposition, paradigmatic and framework perspectives serve to enrich the study and practice of strategic communication. The data also indicates that scholars should not only reconsider binary categorizations of strategic communication but must expand beyond these dichotomies to consider strategic communication, on both the conceptual and the practical side, as an integrated discipline.

Strategic Communication and Organizational Complexity

Heide et al. (2018) argue that Strategic Communication should move beyond simple, linear models, noting that real-world communication often takes place within complex, uncertain environments. They advocate for a holistic model, viewing Strategic Communication as a dynamic process embedded within organizational complexity. Their research emphasizes the interconnectedness between communication, power dynamics, and continuous strategy development. Unlike frameworks that suggest a top-down approach to messaging, Heide and colleagues propose a decentralized, interactive model, where communication flows are adaptive and reflexive. This aligns with CCO theory, emphasizing the constitutive role of communication in shaping strategy.

Similarly, Estaswara (2021), in his examination of Strategic Communication in Indonesian contexts, identifies the need for cultural adaptability within communication strategies. His research underscores that effective communication must align with local values, norms, and stakeholder expectations. Such perspectives expand the scope of Strategic Communication beyond Western-centric models, underscoring the importance of contextual factors and organizational complexity. His research and context had similarities with several scholars, Macnamara & Gregory (2018), Mahbob, Ibrahim, & Hassan (2022), Mahbob et al. (2019), and even Botan (2018) even though his view and perspective sought Strategic Communication part of theory, but the way his picture it using cocreational model and result in his work emerging issues and challenges in strategic communication related to risk communication, public safety and disaster management, and countering terrorism.

Communication Paradigm or Theoretical Framework Revisited

The research findings also point to a continued different perspectives between treating Strategic Communication as a framework for applied communication and positioning it as a paradigm. Botan (2018) note that the field's diversity and interdisciplinary nature complicate efforts to establish a singular paradigm. While paradigmatic approaches, such as those championed by Nothhaft et al. (2018), suggest that Strategic Communication encompasses a meta-theoretical framework for integrating various communication disciplines, others caution that too broad a conceptualization may dilute the field's practical relevance. Those works amplified by many scholars Brønn (2021), Hoffjann (2024), and Németh (2021), although Németh view not exactly as framework but methodologies and quite similar with Kostić & Šarenac (2020) and Lock et al.

(2020) that their perspective not entirely agrees view strategic communication as simply framework.

This different perspectives is further reflected in how organizations balance one-way and two-way communication models. For instance, Werder et al. (2018) emphasizes that in highly regulated industries or during crisis communication, organizations may favor controlled, one-way communication. Conversely, Heide et al. (2018) argue for two-way, dialogic communication models that better reflect the complexity of stakeholder relations and continuous organizational adaptation, furthermore strategic communication could improve organizations objectives by conceptualized with interdisciplinary framework, for example psychology or project management (Mitrović & Vulić, 2020). This dualities of thinking we could picture it from the book "Strategic Communication in Context: Theoretical Debates and Applied Research" (2021), the debates between view strategic communication as paradigm or broad-view of implementation of different communication field with capture strategic communication as communication theory split into two part. The first part of book shows strategic communication was theoretical framework and the other part could be conclude as the application of theory and paradigm.

DISCUSSION

Analyzing the Role of Strategic Communication in Complexity

Let us shift our focus to one of the critical insights from recent literature in the area of Strategic Communication, namely that it has to attend to the actuality of organizational complexity and the sheer flux of change in organizational life. As starter, Fredriksson & Pallas (2015) and Heide et al. (2018) put forward a more nuanced view: communication is not just a tool for achieving strategic goals but an ongoing process in which strategy is formed and reformulated. Like these earlier frameworks, this view rejects early views, which treated communication in organizations as linear and message driven, in favor of emphasizing the reflexive nature of communication within organizations. Communication strategies must change as organizations respond to new stakeholder expectations, social dynamics and new and emerging technologies.

This argument is reinforced, for example, by Estaswara (2021) who argues that effective communication must be locally context sensitive if one is to be effective and is concerned that strategic models must be both context sensitive

and flexible. According to LaBelle & Waldeck (2020) in their work many explores how Strategic Communication can be align to deliver organization's goals and objectives to the same audiences, strategic communication is one umbrella term that covers all types of Communication like management, marketing, public relations, and political communication directed to various stakeholders. This broad perspective is in line with the concept of paradigm as it includes a set of rules and practices that guide the way in which organizations do communicate effectively in a complex and changeable environment. In line with the notion of a paradigm, this broad perspective captures the principles and practice that bring organizations to communicate effectively in a complex and dynamic environment.

Theoretical Contributions and Practical Implications

From a theoretical standpoint, the contributions of scholars expand the conceptual boundaries of Strategic Communication by highlighting its interdisciplinary nature. These perspectives suggest that communication is no longer confined to supporting functions like public relations or marketing; rather, it is central to the strategic management of organizations. This aligns with Lock et al. (2020), Kostić & Šarenac (2020), Alghasi & Falkheimer (2024) argument that Strategic Communication serves as both a tool for organizational communication, control, and a mechanism for continuous adaptation.

Practical implications also emerge from this analysis. Heide et al. (2018) argue that organizations must develop communication strategies that are responsive to uncertainty and complexity, adopting a decentralized approach to stakeholder engagement. This suggests that linear communication models may be inadequate in addressing the challenges of modern organizations, where power relations and decision-making processes are often distributed across multiple stakeholders. Estaswara (2021) provides further evidence by emphasizing the importance of cultural awareness in communication strategies, particularly in non-Western contexts. Organizations that fail to account for these cultural nuances risk alienating key stakeholders and undermining their strategic objectives.

CONCLUSION

It is shown that Strategic Communication is both a theoretical framework and an emerging paradigm because of its dual status in communication studies.

As the field has transcended the study of individual communication static and has matured as a meta discipline, scholars insist that it is no longer a simple domain consisting of various discrete communication functions. But this shift also comes with challenges: on one hand, the field must push back on theoretical ambitions while on the other it needs to make its work relevant to practice.

A Strategic Communication course features how communication shapes organizational strategy and stakeholder engagement. Even as a framework or paradigm, it functions as an explanatory device in making sense of how communication influences complex organizational settings. Future research should fill the gap between theory and practice, explain how organizations digitally manage communication complexity within real world settings, and extend theoretical models to answer the challenges presented by digital communication technology.

The analysis of these 41 publications suggests that no lens is more paradigmatic, no more theoretical framework, but rather both are mutually strengthening as lenses. By treating strategic communication as a paradigm we can achieve a broad worldview that incorporates several components of communication. Meanwhile, the simultaneous view of viewing it as a framework makes it possible to apply communication theories in specific situations — structured methodologies for planning, implementation, and evaluation of communication strategies.

By combining these two approaches, scholars and practitioners can attend to the richness of strategic communication. The paradigm lens is used to understand communication in terms of systemic context, and the framework perspective is provided for the realization of communication strategies. Together both perspectives serve to help advance the field of strategic communication through the development and use of tools for understanding, planning and managing communication environments become more and more complex.

The present systematic literature review advertises the critical position of strategic communication in contemporary organizational administration. It brings together key contributions and perspectives, and underlines that organizations need to adopt strategic communication practices that are intentional, systematic and interdisciplinary. Other research is needed to understand the emerging nature of strategic communication and its ramifications for organizational effectiveness.

In this sense, Strategic Communication is an interdisciplinary field with no end in sight, its valuable input in both hierarchical and organizational practice. As

Strategic Communication itself could be considered by accepted scholars and practitioners as communication paradigm or a theoretical framework, it allows them to focus on how Strategic Communication itself shapes a strategy and adds value to an organization. The field will have to change as new technologies and future challenges occur, and communication should still be an integral part of the strategic decision making process.

REFERENCES

Alghasi, S., & Falkheimer, J. (2024). New Perspectives on Strategic Communication. In Strategic Communication – Contemporary Perspectives (pp. 7–14). Cappelen Damm Akademisk/NOASP. https://doi.org/10.23865/noasp.208.ch1

Balonas, S., Ruão, T., & Carrillo, M.-V. (Eds.). (2021). Strategic Communication in Context: Theoretical Debates and Applied Research. UMinho Editora/CECS. https://doi.org/10.21814/uminho.ed.46

Botan, C. H. (2018). Strategic Communication Theory and Practice: The Cocreational Model. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Brønn, P. S. (2021). Strategic Communication Requires Strategic Thinking. In Strategic Communication in Context: Theoretical Debates and Applied Research (pp. 23–43). UMinho Editora/CECS. https://doi.org/10.21814/uminho.ed.46.2

DeCarlo, M. (2018). Scientific Inquiry in Social Work. Open Social Work Education.

Deuze, M., & McQuail, D. (2020). Mcquail's Media & Mass Communication Theory (Seventh; M. Ainsley, Ed.). London: Sage Publishing.

Diers-Lawson, A., & Fredheim, N. A. G. (2024). Designing Strategic Communication Messages for Health in a High Trust Society: Analyzing the Factors Behind Vaccine Confidence in Norway. In Strategic Communication – Contemporary Perspectives (pp. 37–64). Cappelen Damm Akademisk/NOASP. https://doi.org/10.23865/noasp.208.ch3

Estaswara, H. (2021). Strategic Communication dalam Perspektif Ilmu Komunikasi. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 11(2), 79–90. https://doi.org/10.35814/coverage.v11i2.2028

Estaswara, H., Halim, U., & Burhan, B. (2020). Memaknai Strategic Communication. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.35814/coverage.v11i1.1725

Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., Platen, S. von, Simonsson, C., & Andersson, R. (2017). Is Strategic Communication too important to be left to Communication Professionals? Public Relations Review, 43(1), 91–101. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.011

Fredriksson, M., & Pallas, J. (2015). Strategic Communication as Institutional Work. In D. Holtzhausen & A. Zerfass (Eds.), The Routledge Handbook of Strategic Communication (pp. 143–156). New York: Routledge.

Heide, M., von Platen, S., Simonsson, C., & Falkheimer, J. (2018). Expanding the Scope of Strategic Communication: Towards a Holistic Understanding of Organizational Complexity. International Journal of Strategic Communication, 12(4). https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1456434

Hoffjann, O. (2024). "Tear down this wall". A theory of strategic communication that integrates both communication and organizational theory. Journal of

Communication Management. https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2023-0103

Holtzhausen, D., Fullerton, J. A., Lewis, B. K., & Shipka, D. (2021). Principles of Strategic Communication. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003002048

Kostić, S. C., & Šarenac, J. G. (2020). "New Normal" Strategic Communication. In Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0 (pp. 71–92). https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9416-1.ch005

LaBelle, S., & Waldeck, J. H. (2020). Strategic communication for organizations. In Strategic Communication for Organizations. https://doi.org/10.2307/j.ctvw1d664

Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2021). Theories of Human Communication Twelfth Edition. In Waveland Press, Inc. (Vol. 53).

Lock, I., Wonneberger, A., Verhoeven, P., & Hellsten, I. (2020). Back to the Roots? The Applications of Communication Science Theories in Strategic Communication Research. International Journal of Strategic Communication, 14(1), 1–24. https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1666398

Macnamara, J., & Gregory, A. (2018). Expanding Evaluation to Progress Strategic Communication: Beyond Message Tracking to Open Listening. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 469–486. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1450255

Mahbob, M. H., Ibrahim, N. A. N., & Hassan, M. S. (2022). The Influence of Communication Patterns on Strategic Communication. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i10/15404

Mahbob, M. H., Megat Ali, N. A. S., Wan Sulaiman, W. I., & Wan Mahmud, W. A. (2019). Komunikasi Strategik dan Peranannya Untuk Mewujudkan Komunikasi Berkesan dalam Organisasi (Strategic Communication and Its Role to Create an Effective Communication in Organization). Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(2), 49–67. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3502-04

Mishra, P., & Balani, M. (2018). Strategic Communication for Success: An Organizational Perspective. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 3(12), 929–931.

Mitrović, M., & Vulić, A. (2020). Project Management of Strategic Communication in Digital Era. https://doi.org/10.2991/senet-19.2019.13

Nasucha, M., & Turpyn, J. M. F. (2024). Indonesia's Communication Study Paradigm (A Preliminary Study). Jurnal Studi Jurnalistik, 5(2), 116–131. https://doi.org/10.15408/jsj.v5i2.37339

Németh, J. L. (2021). Defining Strategic Communication: An Almost Impossible Challenge, But Perhaps There Is Still A Solution. Hadtudomány, 31(E-

szám), 162–172. https://doi.org/10.17047/Hadtud.2021.31.E.162

Nothhaft, H., Werder, K. P., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic Communication: Reflections on an Elusive Concept. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 352–366. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1492412

Overton-De Klerk, N. (2023). Reflections on the current state and future of strategic communication as paradigm and practice. Communicare: Journal for Communication Studies in Africa, 42(1), 4–21. https://doi.org/10.36615/jcsa.v42i1.2486

Pettersen, L., & Karlsen, F. (2024). Strategic Communication in Digital Ecosystems: A Critical Discourse Analysis of Dating Applications. In Strategic Communication – Contemporary Perspectives (pp. 115–132). Cappelen Damm Akademisk/NOASP. https://doi.org/10.23865/noasp.208.ch6

van Ruler, B. (2018). Communication Theory: An Underrated Pillar on Which Strategic Communication Rests. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 367–381. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1452240

Werder, K. P., Nothhaft, H., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic Communication as an Emerging Interdisciplinary Paradigm. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 333–351. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1494181

Whittington, R. (2015). Giddens, structuration theory and strategy as practice. In Cambridge Handbook of Strategy as Practice (pp. 145–164). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139681032.009

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Implementasi Strategi Pemasaran Digital untuk Pengembangan UMKM di Pesantren Khalifa: Pendekatan Halal dan Digitalisasi Pasar

Mukhlishah[1], Imas Kurniasih[2], Muhtadin[3], Yani Mulyani[4]
[1,2,3]Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung
[4]Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhamamdiyah Bandung
email: mukhlishah@umbandung.ac.id
imaskurniasih@umbandung.ac.id
muhtadin@umbandung.ac.id
myliterature29@gmail.com

Kata Kunci: *Digital marketing; Halal; Community service.*

ABSTRACT

Community service program carried out through digital marketing training for MSMEs located at the Khalifa Islamic Boarding School. This program aims to improve the skills of MSMEs in using digital technology as a tool to expand their market coverage. With an approach that integrates halal principles, this training not only teaches digital marketing, but also ensures that the products being promoted meet the criteria in accordance with religious teachings. At the end of the activity, it is hoped that a strong network will be created between local MSMEs and the wider market, as well as increasing the competitiveness of MSMEs through the use of digital marketing.

Kata Kunci: *Pemasaran digital; Halal, Pengabdian masyarakat.*

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan pemasaran digital untuk UMKM yang berlokasi di Pesantren Khalifa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan UMKM dalam menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk memperluas cakupan pasar mereka. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip halal, pelatihan ini tidak hanya mengajarkan pemasaran digital, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dipromosikan memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran agama. Di akhir kegiatan, diharapkan tercipta jejaring yang kuat antara UMKM lokal dan pasar yang lebih luas, serta adanya peningkatan daya saing UMKM melalui pemanfaatan pemasaran digital.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, sehingga masyarakat diharuskan untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Salah satu perkembangan yang sangat signifikan adalah dalam penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran. Media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan oleh berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini menjadikan media sosial sebagai platform pemasaran yang sangat kuat dan efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui media sosial, pelaku usaha bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dari berbagai kalangan, baik lokal maupun internasional, dengan biaya yang relatif rendah. Ini membuka peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Pemasaran digital merujuk pada segala upaya untuk mempromosikan produk atau layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemasaran ini memungkinkan pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan konsumen secara langsung dan relevan dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai teknik yang digunakan dalam pemasaran digital meliputi pemasaran melalui internet, aplikasi seluler, pengiriman pesan SMS, dan iklan banner di berbagai platform online. Lebih dari itu, pemasaran digital menggabungkan elemen psikologis, sosial, dan teknologi, menciptakan media interaktif yang memudahkan komunikasi antara produsen, pasar, dan konsumen. Hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih erat antara ketiga pihak tersebut dalam era digital yang semakin berkembang.

Di Indonesia, pemasaran digital berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus berkembang, dengan tingkat penetrasi yang meningkat sekitar 10% setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat lebih dari 200 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, yang menandakan bahwa digital marketing memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh. Tren pemasaran digital diprediksi akan terus berkembang, mengingat semakin banyaknya platform digital yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperluas pasar.

Pemasaran digital memiliki dua tujuan utama yang sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menjalankan bisnis mereka:

1. Menentukan Target Pasar yang Tepat

Digital marketing memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, pengusaha dapat memasarkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi dengan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan pemasaran tradisional.

2. Melakukan Analisis Digital

Setelah menentukan target pasar yang tepat, penting untuk menggunakan alat analisis digital untuk menilai efektivitas pemasaran. Dengan berbagai alat analitik, pengusaha dapat mengukur kinerja iklan mereka, memahami perilaku konsumen, serta mengatur anggaran iklan dengan lebih efisien, sehingga kampanye pemasaran dapat dimaksimalkan.

Salah satu media komunikasi yang sangat potensial dalam memasarkan produk adalah media internet, khususnya media sosial. Pelaku UMKM di lingkungan Pesantren Khalifa dapat memanfaatkan platform e-commerce dan marketplace untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana promosi memberikan keuntungan besar dalam menjangkau lebih banyak konsumen secara lebih efisien.

Seperti yang dijelaskan oleh Stelzner (2012), media sosial memiliki potensi yang besar untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memungkinkan pengusaha untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan mempromosikan produk mereka. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berbagi pengalaman mereka tentang produk atau merek, yang bisa memperkuat hubungan dan meningkatkan keterlibatan (engagement), serta membuka peluang untuk menciptakan profit. Keterlibatan yang tinggi ini sangat penting dalam bisnis karena dapat memperkuat hubungan antara pengusaha dan konsumen, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan permasalahan utama di kalangan pelaku UMKM, khususnya yang berada di Pesantren Khalifa, yaitu rendahnya pemahaman tentang pentingnya pemasaran digital dan cara memanfaatkannya dengan efektif. Oleh karena itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Universitas Muhammadiyah Bandung merasa perlu untuk memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital berbasis prinsip halal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Pesantren Khalifa agar dapat memahami dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang tepat untuk mengoptimalkan potensi keuntungan mereka.

Kegiatan pengabdian ini diberi judul "Implementasi Strategi Pemasaran Digital untuk Pengembangan UMKM di Pesantren Khalifa: Pendekatan Halal dan Digitalisasi Pasar". Program ini bertujuan untuk memperkenalkan para pelaku UMKM pada konsep pemasaran digital yang mengintegrasikan prinsip halal dengan pemanfaatan teknologi digital. Diharapkan melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM di Pesantren Khalifa dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk mereka lebih luas, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama yang terkandung dalam setiap produk yang mereka tawarkan.



Gambar 1. Lokasi Tempat Pelaksanaan PKM

Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku UMKM yang berada di sekitar Pesantren Khalifa. Program ini bertujuan untuk memotivasi mereka agar dapat memanfaatkan pemasaran digital sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Target luaran dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ber-ISSN, serta peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan pemasaran digital yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di sekitar Pesantren Khalifa.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan dirancang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yakni peningkatan kemampuan UMKM di Pesantren Khalifa dalam menerapkan pemasaran digital berbasis prinsip halal. Berikut adalah metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Tahap Persiapan

a. Identifikasi Lokasi dan Pemilihan Sasaran

Tahap pertama dalam persiapan adalah identifikasi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), yang dilakukan melalui survei di Pesantren Khalifa, yang terletak di Jl. Citepus No.6A Cisayong, Tasikmalaya. Dalam survei ini, tim pengabdian melakukan observasi langsung untuk memahami kondisi dan potensi UMKM yang ada di sekitar pesantren, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Sasaran utama kegiatan ini adalah ibu rumah tangga yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Pesantren Khalifa.

b. Pengurusan Izin dan Kerja Sama

Tim pengabdian bekerja sama dengan pihak terkait, seperti ketua pengurus Pesantren Khalifa, untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dan menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan mendukung kegiatan ini, termasuk penyediaan fasilitas dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan.

c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran disusun untuk memastikan bahwa semua kebutuhan kegiatan dapat terpenuhi. RAB mencakup biaya honorarium narasumber, konsumsi, materi pelatihan, pembuatan sertifikat, serta pengadaan peralatan seperti laptop, proyektor, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan.

d. Penyusunan Proposal Kegiatan

Proposal kegiatan disusun untuk merinci tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang akan digunakan. Proposal ini diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan. Setelah melalui proses review, proposal disetujui dan kegiatan dapat dilaksanakan.

2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan Kegiatan

a. Penyuluhan dan Pemaparan Materi

Pada tahap implementasi, kegiatan diawali dengan penyuluhan yang melibatkan pemaparan materi tentang pemasaran digital dan prinsip halal yang relevan untuk pelaku UMKM di Pesantren Khalifa oleh Dr. Imas Kurniasih, Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mukhlishah, MA.g selaku anggota tim dari Universitas Muhammadiyah Bandung.



Gambar 2. Pemaparan Materi *Strategi Pemasaran Digital dan Proses Produksi Halal*

Dalam sesi memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep pemasaran digital, pentingnya media sosial dalam menjangkau pasar yang lebih luas, serta bagaimana mengintegrasikan prinsip halal dalam strategi pemasaran.

b. Diskusi dan Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan materi, sesi diskusi dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh peserta dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka. Dalam diskusi ini, peserta dapat mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang penggunaan aplikasi digital atau keterbatasan dalam memanfaatkan media sosial secara optimal.

c. Praktikum dan Simulasi

Sesi praktikum dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta tentang bagaimana menggunakan aplikasi media sosial untuk mempromosikan produk. Pelatihan ini mencakup cara mengoperasikan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta cara membuat konten yang menarik untuk promosi produk. Peserta juga diberikan simulasi dalam menggunakan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dengan biaya yang efisien.

d. Pendampingan dan Bimbingan Lanjutan

Setelah pelatihan dan simulasi, peserta diberikan pendampingan secara langsung untuk mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Pendampingan ini melibatkan sesi tanya jawab dan bimbingan dalam membuat konten promosi

yang sesuai dengan karakteristik produk dan pasar yang dituju. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan pemasaran digital dalam bisnis mereka dengan benar dan efektif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan angket dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap kemampuan pemasaran digital peserta. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi bagi pelaku UMKM agar dapat lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi digital.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Pesantren Khalifa, serta memperkenalkan pemasaran digital berbasis prinsip halal yang dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pemasaran di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Pesantren Khalifa Jl Citepus No.6A Cisayong, Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta UMKM, sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang aktif memproduksi dan memasarkan produk lokal. Program ini memberikan pelatihan strategi pemasaran digital berbasis prinsip halal, dengan fokus pada pengembangan keterampilan menggunakan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan pemasaran produk.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama kegiatan, beberapa hasil utama yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Setelah pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemasaran digital dalam memperluas jangkauan pasar. Peserta memahami cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan produk mereka. Sebelumnya, mayoritas peserta hanya menggunakan metode pemasaran konvensional dengan jangkauan terbatas.

2. Penerapan Praktis Strategi Pemasaran Digital

Peserta diberikan pelatihan praktis untuk menggunakan fitur-fitur digital pada smartphone, termasuk pengambilan foto produk yang menarik, pembuatan deskripsi produk yang jelas, dan pengunggahan konten ke marketplace seperti Tokopedia. Simulasi langsung ini membantu peserta mengatasi hambatan teknis yang mereka hadapi sebelumnya.

3. Integrasi Prinsip Halal dalam Pemasaran

Salah satu aspek penting dari pelatihan ini adalah penerapan prinsip halal dalam pemasaran. Peserta diajarkan untuk memastikan bahwa konten promosi, deskripsi produk, dan interaksi dengan pelanggan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim tetapi juga memperkuat identitas produk UMKM yang berbasis di Pesantren Khalifa.

4. Efisiensi Biaya Promosi

Dengan memanfaatkan media digital, peserta mengurangi biaya pemasaran konvensional, seperti pencetakan brosur dan iklan cetak. Hal ini memungkinkan peserta untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Pembahasan

Program pengabdian ini menunjukkan bahwa pemasaran digital dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya di lingkungan pesantren. Beberapa poin penting yang dapat dibahas lebih lanjut adalah:

1. Efektivitas Media Digital sebagai Saluran Pemasaran

Seperti yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller (2016), media digital memiliki potensi besar untuk memperluas pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional. Peserta pelatihan di Pesantren Khalifa membuktikan bahwa platform seperti WhatsApp dan Instagram dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan secara langsung, memberikan interaksi yang lebih personal, dan meningkatkan engagement dengan konsumen.

2. Prinsip Halal dalam Pemasaran

Penerapan prinsip halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi UMKM di Pesantren Khalifa. Menurut penelitian Nasution dan Siregar (2019), produk yang dipromosikan dengan memperhatikan prinsip halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memperluas peluang pasar,

khususnya di kalangan konsumen Muslim yang semakin sadar akan kehalalan produk.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta, beberapa tantangan masih muncul, seperti kurangnya akses ke perangkat teknologi yang memadai dan minimnya pengalaman peserta dalam memanfaatkan fitur-fitur canggih di platform digital. Hal ini sejalan dengan temuan Mandiri Institute (2020), yang menunjukkan bahwa UMKM sering kali mengalami kendala teknis dalam mengadopsi strategi pemasaran digital.

4. Rekomendasi untuk Keberlanjutan Program

Agar dampak dari program ini dapat bertahan dalam jangka panjang, perlu adanya pendampingan lanjutan untuk memastikan peserta dapat mengoptimalkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Selain itu, pelibatan lebih banyak pihak, seperti pemerintah daerah atau institusi swasta, dapat memberikan akses terhadap fasilitas yang lebih baik untuk mendukung digitalisasi UMKM.

Kesimpulan dan Implikasi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan manfaat nyata bagi UMKM di Pesantren Khalifa. Peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pemasaran digital tidak hanya membantu mereka memperluas pasar tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi modern. Implementasi strategi pemasaran digital berbasis prinsip halal juga memperkuat posisi UMKM dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia*.

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2020). *Principles of Marketing*. Pearson Education.

Nasution, S., & Siregar, P. (2019). *Halal Economy: Pendekatan dalam Pemasaran Produk Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 11(3), 22-30.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson.

Mandiri Institute. (2020). *Digital Marketing Bantu Pengusaha Pasarkan Produk di Masa Pandemi*. Katadata Insights.

Stelzner, M. A. (2012). *Social Media Marketing Industry Report: How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses*. Social Media Examiner.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing*. Pearson.

Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Translation of Mangkobar text by Novice Translators and Distribution of Time on Translation Tasks

Lili Suryani Batubara*
Psikologi/Fakultas Sosial Humaniora/Universitas Muhammadiyah Bandung
*email: suryanililibatubara@gmail.com

Keywords:
Translation Process; Time Distribution; Translation Tasks; Cultural Translation; Mangkobar text

ABSTRACT

This study aimed at finding out how novice translators distribute the time on translation tasks over the phases of translation process while translating mangkobar text from Angkola Language (AL) to Bahasa Indonesia (BI) and from Bahasa Indonesia (BI) to English (EL). The mangkobar text (cultural text) composed of around 221-word long. Five novice translators were involved in this research to translate the mangkobar text with experience and several criteria on translation. Their proficiency level of mother tongue AL (L1) was „very good", confirmed by "penasehat adat" in Padang Sidimpuan, score of a paper based TOEFL was more than 503, score of UKBI was more than 578. This study used a qualitative research employing an exploratory case study as a method. The data were collected using integrated problem and decision reports (IPDRs), keyboard logging program (Translog- II), screen recording tool (Camtasia studio 9), and retrospective questionnaire. Two findings were revealed in this study: 1) the novice translators distribute more time on processing in drafting phase whether in translating from AL to BI or BI to EL, 2) they have low capability in managing the time on translation process. It was found that the novice translators took less time when translating from AL to BI since both of languages are their mother tongue and first language so that they understood the source text easily. Meanwhile, it took longer time when translating from BI to EL since they have both linguistic and cultural differences between the SL and the TL.

Kata Kunci:
Proses Penerjemahan; Alokasi Waktu; Tugas Penerjemahan; Penerjemahan Budaya; Teks Mangkobar

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerjemah pemula membagi waktu dalam mengerjakan tugas penerjemahan pada setiap tahap proses penerjemahan saat menerjemahkan teks *mangkobar* dari Bahasa Angkola (AL) ke Bahasa Indonesia (BI) dan dari Bahasa Indonesia (BI) ke Bahasa Inggris (EL). Teks "mangkobar " (teks budaya) yang digunakan terdiri dari sekitar 221 kata. Lima penerjemah pemula dilibatkan dalam penelitian ini untuk menerjemahkan*

teks "mangkobar", dengan pengalaman serta kriteria tertentu dalam penerjemahan. Tingkat kemahiran mereka dalam bahasa ibu AL (L1) dikategorikan "sangat baik", yang dikonfirmasi oleh "penasehat adat" di Padang Sidimpuan. Skor TOEFL berbasis kertas mereka lebih dari 503, dan skor UKBI mereka lebih dari 578. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan menggunakan laporan masalah dan pengambilan keputusan terintegrasi ("Integrated Problem and Decision Reports " / IPDRs), program perekam aktivitas keyboard (Translog-II), alat perekam layar (Camtasia Studio 9), dan kuesioner retrospektif. Dua temuan utama terungkap dalam penelitian ini: 1)Penerjemah pemula menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap penyusunan draf, baik saat menerjemahkan dari AL ke BI maupun dari BI ke EL.
2) Mereka memiliki kemampuan yang rendah dalam mengelola waktu selama proses penerjemahan. Ditemukan bahwa penerjemah pemula membutuhkan waktu lebih singkat saat menerjemahkan dari AL ke BI karena kedua bahasa tersebut merupakan bahasa ibu dan bahasa pertama mereka, sehingga mereka lebih mudah memahami teks sumber. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan lebih lama saat menerjemahkan dari BI ke EL karena terdapat perbedaan linguistik dan budaya antara bahasa sumber (SL) dan bahasa sasaran (TL).

INTRODUCTION

Over the years, many scholars and researchers have been interested in finding out what happens in translator's mind during the translation process. It is driven by the idea that what goes on in translator"s head while they are translating is crucial to an understanding of translation, and is not derivable solely from an analysis of the final product, the translated text. The former refers to the mental activity involved in carrying out the translation work with all steps and decisions which are not open to direct observation. Therefore, mental processes, as the term used by Gopferich (2008, p. 1), are often referred to as „the translator"s black box" (Toury, 1982, p. 25). Meanwhile, the latter refers to everything in the translation process which can be observed by another person. One of the observable processes taking place while translating is time distribution (see Jakobsen, 2002).

Traditionally, time in translation has not been regarded as one of the defining factors, a supposition based on the ideas that while oral interpreters normally work at speech delivery speed, "translators generally have hours, days, or even weeks to complete the operations" (Gile, 1995, p. 111). This means that

they have time to consult with experts, colleagues, and search database, and dictionaries to solve individual problems. Performing a task with concurrent introspection increases the time for the task (Ericsson & Charness, 1997, p.10). This has also been shown for translation by Krings (2001) and Jakobsen (2003). The result regarding relative allocation of time for the different phases also differ from previous studies. The main difference is the relatively large proportion of time spent on the post writing phase by all participants. Jääskeläinen (1999, p. 122) reported similar findings from earlier study, assuming that a relatively long post-writing phase can be seen either as an individual characteristic or as being an evidence of particular phase in the development of translation students, possibly under the influence of translator training. The length of the ST is another potential contributing factor to the specific pattern of time distribution. All professionals and one translation student verbalized how and in what phases they usually work indicating awareness of their own procedural knowledge. Being accustomed to performing translation tasks, it is only to be expected that they should have developed their own preferred working habits and be sufficiently aware of them to be able to verbalize them already at this stage. They do this by orally producing TT chunks of various sizes, also orally producing alternative translations. The strength of this research used mangkobar text that presented several difficulties of terminological problems made it very difficult to translate, such as metaphor, puns, etc. This was also purposed to preserve and maintain the Angkola culture as local wisdom, as what Sibarani (2012) said that local wisdom is seen as a tool used to show how people"s living system maintain and preserve nature and surrounding environment that is the life hood of their life.

Based on the above phenomenon, the research question is formulated as "How do the novice translators distribute the time on translation tasks while translating Mangkobar text from AL to BI and BI to EL?". Therefore distributing the time on translation tasks is precisely the focus of this study. Specifically, this research is aimed at investigating the novice translators distribute the time on translation tasks over the phases of translation process while translating mangkobar text from AL to BI and from BI to EL. The result of this study gives an insight to novice translators in better management of time distribution in translation process and understanding more the cultural text.

METHODOLOGY

Following to the research questions that have been stated, this research was a qualitative research that focused on the exploring problems and deeply understanding a central phenomenon development (Cresswell, 2011, p.16). It was process oriented research.

3.1 Data Source and Data

The data used in this study were the ST, the TT, and the process of translating the ST. They were in the forms of linear representation from Translog-II and supported by screen recording from Camtasia Studio. Analysis of these data revealed the time distribution, translation tasks distribution employed by the novice translators. The source of the data used was the written source of the Mangkobar text consisting of three paragraphs from anak boru consists of 221 words.

3.2 Participants

The participants of this research were five novice translators. AL is their mother tongue and they are native speakers of BI and emphasizing on the participants" homogeneous profile. 1) Their mother tongue is AL; 2) They all have ever been participated in Mangkobar event; 3) They work as semi-professional translators and receive money for any translation- related work; 4) They are all lecturers5) They are all male 6) Their age are 30"s 7) Their experiences at least more than five years 8) They are all familiar with major web search techniques for translation process; 9) They are all familiar with the type and style of texts to be used, as a result of attending some Translation Workshop or Translation Seminar. Besides, there was a conscious effort to control the participants, which is specific variables that allowed to see how the quality of the translation was influnced by the process undertaken during the translation. The methods chosen were: Background Questionnaire (translation experience). There were 13 novice translators and they were given a background questionnaire to select the participants who met the given criteria (in appendix). 10 out of 13 returned the questionnaire and were suggested to take other participant selection criteria: 1. Their proficiency level of mother tongue AL (L1) was 'very good', confirmed by "penasehat adat" in Angkola, Padang Sidimpuan; 2. The proficiency level of BI (L2) required for the participant was 'unggul' with the range score 578 to 618 by Test of Bahasa Indonesia Proficiency (UKBI);

3. The proficiency level of English (L3) required for participant was between 503 and 550 by Test of English Proficiency (TOEFL).

3.3 Data Collection Method

In this research, the data were used to evaluate the research were collected by using the instruments including IPDRs, retrospective questionnaire, TAPs (the translation process was recorded and videotaped by using Translog–II and Camtasia Studio 9 that were installed in computer used in this research, then the recordings were transcribed to produce TAPs).

The translation process was conducted in a room that was designed as closely as possible to the workfield of translators. Translog-II and Camtasia Studio 9 were installed in laptop SONY VAIO Core I3. The novice translators were given the time to learn how to use the Translog-II and Camtasia Studio 9 and they could ask questions and made themselves familiar to work with Translog-II program and its features. The mangkobar text was given in Translog-II work sheet that available in the program. Translog-II as the keylogging recorder was used to observe the time spent by the novice translator in order to get the data concerning the distribution of time and distribution of translation tasks over the translation process. Then, the translation process was recorded by using Translog-II and Camtasia Studio 9. All of the novice translators were allowed to use all translation tools as their aids to support them in translation process.

The IPDRs was used to observe and record the translators activities while they were translating the text. The novice translators was given plenty of time until they couldd finish their work. Finishing their work, they were asked to complete the retrospective questionnaire to let them in giving the comment on their work. Triangulation is an attempt to use other means to overcome the problems that arise in the provision of data (Mahsun, 2011, p.236). This reserach used triangulation method to come to the research findings by combining keylogging: Translog-II, Camtasia Studio 9 and retrospective questionnaire.

3.4 Data Analysis

The data collected using TAPs analyzed qualitatively through the following procedures (Lauffer, 2000, p.202). The data were analyzed to find the mental processes while the novice translators were translating the mangkobar text. At this stage, the data were used to explore what happened during the translation process. All of the processes were described, such as pauses, deletion (spelling, word, clause, and sentence deletion), substitution, translation strategy preference, and time spent. Then, the data were analyzed the processes taking place when the novice translators were translating the text. At this stage, the data were used to explore the time distribution used over each of translation phases.

And then, the data also were analyzed to explore the information about the translation task used over each of translation phases. At this stage, the researcher counted the total number of translation tasks during the novice translators translating the text and classify them based on their classification stated by Brian Mossop (2000, p.40), including processing, production, documentation, and revision, technical revision, technical adjustment, production and revision, production and technical revision. Then, the researcher found out how the novice translators distributed translation tasks over each of translation phases.

Triangulation is an attempt to use other means to overcome the problems that arise in the provision of data (Mahsun, 2011, p. 236). The three triangulation techniques used: 1. Triangulation of data sources, 2. Methodological triangulation (data retrieval), and 3. Theory of triangulation.

FINDINGS and DISCUSSIONS

The distribution of time on translation tasks takes an important role in translation process. It shows how the translators manage their time in translating the text. Therefore, the distribution of time by novice translators was analyzed in this research. The analysis involved the total time spent by each of novice translators, the time spent for each of the activities over the three translation phases in translation process, and also the differences of each novice translators in distributing their time in translation process. In this research, the data were obtained from Translog recorded used as the data to analyze the total time spent and the distribution of time spent on translation tasks done by each of novice translators over the three phases of translation and also obtained

from Camtasia Studio recorded used to analyze the activities done by each of novice translators over the three phases of translation in translation process. The novice translators were asked to translate the cultural text from AL to BI and then translate it from BI to EL. In this research, there are two sessions in translating process, therefore the STs were in AL and BI; and the TTs were in BI to EL. The first ST was mangkobar text was composed of 221 words respectively. The second ST was in BI which was the result of their translation in the first session.

Based on the Translog recorded that five novice translators distribute the time over the three phases differently when translated the mangkobar text either in translating from AL to BI and from BI to EL. In terms of time spent, there was the difference between translated the mangkobar text from AL to BI and from BI to EL. In translating the text from BI to EL, four novice translators spent longer time than translating the text from BI to EL. It was displayed in Table 1 below.

No.	Novice Translator	Time Spent in Translation Process (minutes)	
		AL – BI	BI – EL
1.	Novice A	30:15.219	50:34.547
2.	Novice D	17:01.640	14:55.907
3.	Novice F	27:37.218	31:13.344
4.	Novice G	13:51.015	14:17.032
5.	Novice I	20:23.859	27:16.125

Based on the data displayed in Table 1, in translating the mangkobar text from AL to BI, novice A spent 30 minutes 15 seconds, novice D spent 17 minutes 02 seconds, novice F spent 27 minutes 37 seconds, novice G spent 13 minutes 51 seconds, and novice I spent 20 minutes 24 seconds. Meanwhile, in translating the mangkobar text from BI to EL, novice A spent 50 minutes 35 seconds, novice D spent 14 minutes 56 seconds, novice F spent 31 minutes 13 seconds, novice G spent 14 minutes 17 seconds, and novice I spent 27 minutes 16 seconds. It indicates that four novice translators spent longer time in translating the mangkobar text from BI to EL, meanwhile in the contrary one novice translator spent longer time in translating the mangkobar text from AL to BI. In this case, novice D found fewer difficulties when translated from BI to EL in terms of finding the equivalence of cultural terms to be drafted into TT. The findings show that the novice translators distributed the time differently on

translation tasks during the translation process either in translating the mangkobar text from AL to BI or BI to EL.The novice translators also were different in distributing their time over the three phases of translation in translation process. It included pre-drafting phase, drafting phase, and post-drafting phase. Novice translators spent longer time in drafting phase than the other phases of translation either in translating the mangkobar text either from AL to BI or from BI to EL. On the basis of TAPs, it was calculated the time spent on each phases, and it was represented in Figure 1. In addition, in time used for the task, a clear correlation was found between novice with more experience and faster performance of the task. Thus, novice with more experience, was showed by novice D who spent on the average 17 minutes on the first task (from AL into BI), and 15 minutes on the second task (from BI into EL). Experience, as expected, correlates with a shorter time to finish the task. The differences are substantial between novice with more experience and novice with less experience. Novice with more experience (10 years) in translating text and also as a custom practitioner in Angkola culture, therefore he could solve the problems fast, especially related to the cultural terms. In drafting phase, mostly he started to translate at clause level based on the context of the text.

In the first session, in which the ST was in AL, most of the novice translators distributed their time almost equal either in pre-drafting phase or in the drafting phase. Meanwhile, in the second session in which the ST was in BI (the translated text in the session one), most of the novice translators did not do the pre-drafting. However, the novice translators distributed longer time in drafting phase and post- drafting phase in translation process. It could be proved with the help of TAPs and retrospective questionnaire. In the second session, they had time for revisions in the post-drafting. They used it to make sure that they translated grammatically correct, spelling correction, and confirmed the naturalness of the TT. Only novice translator I distributed the time differently, he had no pre-drafting either in translating session 1 and 2, and he took longer time in translating from AL to BI than from BI to EL. If the two graphs are combined, it was summarized in the comparative time distribution for each of phases of translation process in figure 1 below.

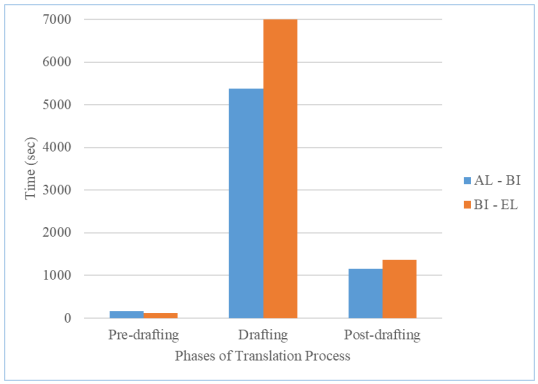


Figure 1: The comparative distribution of time over the phases of translation process

It was found that while translating the text either from AL to BI or BI to EL, the novice translators spent longer time on processing. In other words, they distributed longer time on processing in which it was included one of the translation tasks. These findings indicate that processing took an important role in translation process, the time distribution on processing increased on the second session. It was showed that novice translators had more percentage of time distribution of processing (28%) during translating the text Bahasa Indonesia to English since they needed more time in interpreting the source text (ST), in terms of choosing the most appropriate equivalence into target text (TT). They were not provided with the specific cultural terms in English since English is their second language that totally different in terms of culture. Meanwhile, the percentage of time distribution of processing was 25% from AL to BI. In other words, the novice translators distributed a lot of processing; in this case, they spent longer time in reading the source text (ST) or at least scanning and skimming the source text (ST) in order to get more understanding of the source text (ST). As it was emphasized by Maley (2010) stated that reading is the most readily available form of comprehensible input, especially in places where there is hardly any contact with the target language. Furthermore, understanding the source text (ST) was an important role in translation process since it was impossible to produce a good translation without having knowledge on the source text (ST). However, it does not mean that understanding could only be achieved after reading the source text (ST) in pre-drafting phase as stated by Rosa, 2017. The novice translators also gain their understanding of the source text (ST) while doing the revision. In revision that they did, they also have to read the source text (ST) to be compared to the target text (TT) draft. Understanding would become better since the information that was read already provided in both languages; the source language (SL) and target

language (TL). The novice translators with a predisposition for the pragmatic style were very fast, practical and went straight to the point, without giving importance to details. They were very confident about themselves and their knowledge. That is the reason why they did not invest a lot of time searching for equivalents or simply took the first equivalent they found.

Related to the reading, scanning and skimming activities, it was found that the novice translators also did the documentation. They distributed the documentation mostly in the pre- drafting phase in translation process, meaning that they distributed the time on documentation for searching the information related to the source text (ST) topic in which would help them in the whole translation process. Time spent on documentation was not increased significantly from 8% to 9%. The novice translators did more documentation during translating the text from BI to EL since the novice translators frequent pauses to solve the translation problems in terms of finding the appropriate equivalents to be drafted in the target text (TT) and encoding their understanding of the source text (ST) into the target text (TT) since the source text (ST) contained a lot of terminology related to cultural terms, so they frequent to visited the Google translate. Meanwhile, AL to BI had less time on documentation since they had their pre- existing background of knowledge of the source text (ST) however they used several translation aids such as printed dictionary, Google search, and also interaction with another people to expanding their background of knowledge of the topic in the source text (ST) to be translated in the pre- drafting with a short time. In addition, it also to solve the translation problems that faced in drafting phase. As stated by Khalzanova (2008), documentation is another way of economizing on time; would perhaps it is viewed less time consuming that thinking over various renderings. This research also found the decreasing on the production, production + revision, and production + technical revision while translating the text from BI to EL. It was found that the novice translators relied on their background of knowledge to type the translation draft and they had tendency to follow the language style of the source text (ST). It was different while translating the Mangkobar text from AL to BI, they composed more on the translation draft since they found more difficulty in deciding either to keep the source text (ST) terms in the target text (TT) or to use its almost similar equivalents as some of the words had no the exact equivalent in the target language (TL) and also the naturalness, language style and structure of the target text (TT), in terms of there were many choices of the target text (TT).

It was also found that the time spent on all the tasks related to the revisions (revision, and technical revision) was decreased in percentage from AL-BI to BI– EL. In this case, it was spent a little bit longer of time during translating the Mangkobar text from AL to BI since the novice translators are the native speaker of AL and BI, this was found that they had more background of knowledge of the source language (SL), had more understanding about the structure and style of source language (SL) made them to be quite careful of looking the appropriate diction for the appropriate context of the target text (TT). In line with the context in translation, Melby and Foster (2012) stated that it is impossible to ignore context in translating a text as it is related to the specifications from which the translator works. Surprisingly, the other finding found that the percentage of time distribution on technical adjustments was increased from 3% to 8% (AL–BI and BI–EL) as a result of the tiring condition and higher stress level in translation process. The situation of the first session (AL–BI) and the second session (BI- EL) was quite different. In translating the Mangkobar text from BI to EL, the novice translators were quite stressful since they did a lot of processing (read the source text) and documentation during the drafting phase. As the result, it affected their normal working rhythm in translation process.

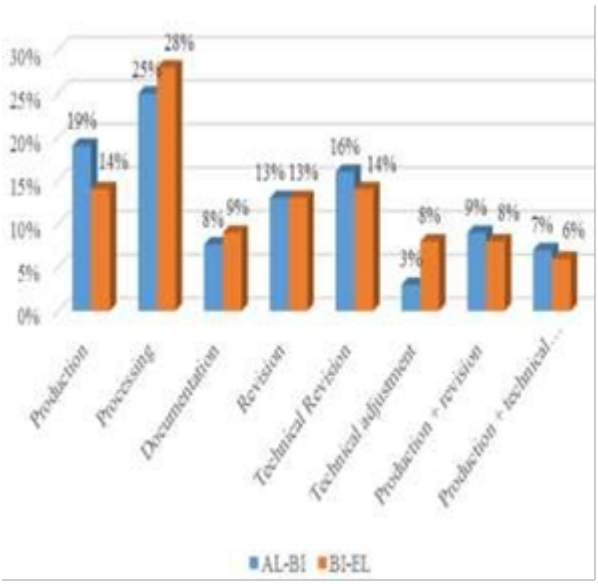


Figure 2: Comparative distribution of time on translation tasks during the translation process

CONCLUSION

Based on the findings, some conclusions can be drawn: first, the novice translators took longer time in translating the Mangkobar text from BI to

EL than translating from AL to BI could be accounted for by the stress and tiring of the novice translators, which led them spend more time to do the translation. The similarity of the two processes done by novice translators are either translating the mangkobar text from AL to BI or BI to EL, both of them distributed the longer time in drafting phase in which they did the translation and simultaneously did the revision. Second, both of them also distributed longer time on processing task in drafting phase in which they took pauses for reading the ST, interpreting the TT that done previously, finding the main topic in the text in order to get the more understanding of the ST. In terms of using translation aids, both of them used them to help the novice translators finish the translation work. Less successful processes, especially those of novices tend to be governed by local decision-making; they are thus linear by nature and proceed problem by problem, word by word or sentence by sentence. This often means a wasteful use of resources, since decision-making effort is not prioritized and strategically invested. Good translators in turn are more prepared to use their background knowledge and their own inferences about text and text type as a basis for their decisions.

This study supports Lehtinen and Palonen"s (2011) notion that the main characteristic which sets experts apart from novices is their ability to focus on and to choose the essential information. They also state that formal training can only create a basis on which expertise can be developed, as it takes at least 10.000 hours of methodical practice to become an expert." (p. 27). This may explain the differences between the novice translators in this research, as they had different amounts of work history and some only translated part- time. As it requires thousands of hours to reach the level of expertise, its development takes longer in terms of years if one translates only part-time.

REFERENCES

Alves, F. (2006). A Relevance-Theoretic Approach to Effort and Effect in Translation: Discussing the Cognitive Interface between Inferential Processing, Problem-solving and Decision-making. Proceedings of the International Symposium on New Horizons In Theoretical Translation Studies, 19-20. January, Department of translation. Hongkong: The Chinese University.

Bereiter, C. and Scardamalia, M. (1987). The Psychoogy of Written Composition. Hillsdale. New Jersey: Erlbaum.

Breedveld, H. (2002). Translation Process in time. Target 14 (2).

Brislin., Ricard W. (1976). Translation: Application and Research. New York: Gardner Press inc.

Cresswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Fourth Edition. Boston: Pearson.

Dimitrova, B.E. (2005). Expertise and Explicitation in the Translation Process Volume 64 dari Benjamins translation library: EST subseries. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Ericsson, K. A. and N. Charness. (1997). Cognitive and Developmental Factors in Expert Performance. In Expertise in Context : Human and Machine, ed. by P. Feltovich. K. M. Ford, and R. R. Hoffman, 3-41. Cambridge (MA): MIT Press.

Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Göpferich,S.(2008). Translationsprozessforschung. Stand-Methoden Perspectiven. Narr: Tubingen.

Gouadec, D. (2007). Translation as a Profession. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Jääskeläinen, R. (1999). Tapping the process: An explorative study of the cognitive and affective factors involved in translation. Joensuu: University of Joensuu.

Jakobsen, A. L. (2002). Translation drafting by professional translators and by student translators. In G. Hansen (ed), Empirical Translation Studies: Process and Product. Copenhagen Studies in Language 27. Copenhagen: Sumfunds litteratur.

Jakobsen, A. L. (2003). Effects of think aloud on translation speed, revision and segmentation. In Fabio Alves (ed), Triangulating translation: perspectives in process-oriented research. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Jensen, A. (2001). The effects of time on cognitive processes and strategies in translation. Copenhagen Working Papers in LSP.

Khalzanova, S. (2008). Revision and Time Constraints in Translation. A Dissertation. Spain: Universitat Rovira i Virgili.

Krings, H. P. (2001). Repairing Texts: Empirical Investigations of Machine Translation Postediting Processes. Kent: Kent State University Press.

Lauffer, S. (2002). The translation process: An analysis of observational

methodology. Cadernos de Traducao, Vol. 2 (10).

Lehtinen, E., Palonen, T. (2011). Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet. Ammattikasvatuksen aikakauskirja (Journal of Professional and Vocational Education) 13 (4): 24-42 [online]. Available:http://www.okka- saatio.com/aikakauskirja/pdf/ Aikak_4_2011_lehtinen.pdf. Accessed 14.5.2015.

Mahsun. (2011). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan strategi, metode, dan tekniknya. Jakarta: Rajawali Press.

Mossop, Brian. (2000). The workplace procedures of profesional translators. In A. Chesterman et al. (eds). Translation in Context. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Mossop, Brian. (2001). Revising and Editing for Translators. St. Jerome: Manchester.

Parinduri, M. Bakhsan. (2013). Panduan Markobar Dalam Budaya Mandailing. Medan: CV. Deli Grafika.

Rosa, Rusdi Noor. (2017). An Analysis on Translation and Translating: SFL Language Metafunctions in the Translation of Student and ProfessionalTranslators [Dissertation]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Postgraduate Program.

Schubert, K. (2009). Positioning Translation in Technical Communication Studies. The Journal of Specialised Translation [11], http://www.jostrans.org/issue11/art_schuber t.php (Accessed 2 November 2011)

Sibarani, R. (2012). Kearifan Lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan. Jakarta Selatan: Asosiasi Tradisi Lisan.

Siregar, G. B. (2010). Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Pabagas Boru. Medan: Penerbit Partama Mitra Sari.

Toury, G. (1982). A Rationale for Descriptive Translation Studies. Dispsitio, 7 (20), 23-39.